BUKU AJAR
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI

PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
KEMENTERIAN PERTANIAN
2017

BUKU AJAR

SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN

ISBN : 978-602-6367-24-2

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Pusat Pendidikan Pertanian

PENULIS

Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani

- Ir. Sumaryanto, MM
- Yudi Rustandi, S.ST.,M.Si

TIM REDAKSI

Ketua : Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt.,MP

Sekretaris : Dra. Rosari Hadi Armadiana, M.Pd

Pusat Pendidikan Pertanian
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian,
Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Gedung D, Lantai 5, Jl. Harsono RM, No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan 12550
Telp./Fax. : (021) 7827541, 78839234

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga Buku Ajar Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dapat diselesaikan dengan baik. Buku ajar ini merupakan acuan bagi mahasiswa Program Diploma 4 (D4) Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian lingkup Kementerian Pertanian dalam mengikuti proses perkuliahan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dalam menerima materi mata kuliah tersebut.

Terimakasih kami sampaikan kepada Sdr. Ir. Sumaryanto, MM dan Sdr. Yudi Rustandi, S.ST.,M.Si selaku Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang dan Malang yang telah menyusun buku ajar ini serta semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaiannya. Materi buku ajar ini merupakan Mata Kuliah Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani, sebagai rumpun dari ilmu sosial yag mempelajari bagaimana manusia saling ketergantungan diantara sesamanya. Bahwa manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dalam tiga ranah yaitu sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk berketuhanan. Sebagai mahkluk sosial sangat tergantung diantara sesamanya, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan secara individu atau seorang diri. Saling ketergantungan tersebut membuat diantara individu untuk saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan serta untuk memperbaiki kualitas kehidupannya. Lebih jauh yaitu dalam rangka membangun "*Spirit of group*" sehingga dinamis dalam menjalankan kehidupanya, dan tidak heran bila untuk mempertahankan group atau kelompoknya diciptakan wadah atau lembaga untuk dapat melindungi dan menjalankan segala aktivitasnya baik untuk memenuhi kebutuhan individunya atau kelompoknya.

Pembahasan bahan kajian pada mata kuliah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani ini tentunya dirancang untuk mendukung mahasiswa dapat berkomunikasi dengan masyarakat tani dengan berbagai tingkatan mulai dari kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi petani, dewan komoditas

pertanian, lembaga keuangan mikro agribisnis serta koperasi petani. Dengan tersedianya bahan ajar ini diharapkan para pengguna dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok yang ada, menerapkan secara langsung dalam penumbuhan kelembagaan seperti penyusunan organisasi dalam kelompok, penyusunan rencana kebutuhan dari kelompok yang ditumbuhkan, serta untuk membangun spirit dari kelompok.

Isi buku ajar ini mencakup materi tentang I. Kelembagaan; II. Konsep-Konsep Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan; III. Model Kelembagaan Petani; IV. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan); V. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Buku ajar dilengkapi dengan soal latihan dan tugas praktikum yang memudahkan mahasiswa untuk belajar secara utuh dan komprehensif.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan buku ajar ini. Smoga buku ajar ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi para mahasiswa pada pendidikan tinggi vokasi pertanian.

Jakarta, Juli 2017

Kepala Pusat Pendidikan Pertanian

Drs. Gunawan Yulianto, MM., MSi.

NIP. 19590703 198001 1 001

PRAKATA

Penyuluh Pertanian memiliki peran diantaranya sebagai pembawa perubahan dan sebagai pentransfer teknologi bidang pertanian dalam rangka peningkatan produktivitas dan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Pendekatan yang cukup efektif yaitu dengan menggerakan /mendorong melalui kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani, mulai dari penumbuhannya hingga pengembangannya.

Penyuluh Pertanian dalam menjalankan tugasnya perlu dibekali pemahaman dan penguasaan secara baik terhadap, kemampuan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, yang merupakan satu kompetensi penyuluh pertanian dalam mendukung pelaksanaan tugasnya di daerah masing-masing. Bagi para penyuluh, menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan petani merupakan jembatan dalam mewujudkan keberdayaan pelaku utama dalam peningkatan kemampuan teknis, membangun usahatani yang berdaya saing, berkelanjutan dan dapat meningkatkan posisi tawarnya lewat pendekatan pembinaan kelembagaan petani yang mencakup penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani.

Diantara satu profil lulusan STPP adalah sebagai penyuluh ahli, sehingga para lulusan yang nantinya dapat bertugas menjadi penyuluh harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan atau kompetensi dalam menumbuhkembangkan kelembagaan petani.Penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani. Oleh karena itu, petani dapat menumbuhkembangkan kelembagaan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani.

Pemahaman tentang pengertian kelembagaan yang berkembang di masyarakat masih beragam, sehingga perlu dilakukan perumusan kembali (rekonseptualisasi) yang akan berguna, baik itu untuk telaahan di tingkat akademisi maupun operasional di masyarakat petani di Indonesia.Mempelajari kelembagaan petani

tentunya juga harus terlebih dahulu menguasai teori sampai pada pemahaman rumusan istilah dan konsep kelembagaan yang lebih operasional.

Hakekatnya penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani adalah upaya untuk menjalankan tindakan kolektif, dengan keyakinan bahwa tindakan kolekif lebih murah dan efektif.Kelompoktani, Gapoktan, Kelembagaan Ekonomi Petani, dan Asosiasi Petani merupakan kelembagaan petani dalam menjalankan tindakan kolektif petani. Penumbuhkembangan kelembagaan merupakan satu komponen penunjang pembangunan pertanian perdesaan dimaksudkan untuk mendorong agar petani berproduktivitas tinggi, berdiversifikasi, serta mampu membangun jejaring kemitraan.

Bahan ajar ini ditulis dan dibuat untuk dipergunakan mahasiswa dalam lingkup yang terbatas yaitu mahasiswa Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP). Struktur bahan ajar dirancang sedemikian rupa dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya dikemas untuk digunakan pada kegiatan instruksional sehingga dapat membantu menjelaskan tujuan instruksional atau menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai. Struktur tersebut didasarkan kepada kebutuhan mahasiswa dan kompetensi akhir yang akan dicapai, memberikan kesempatan mahasiswa untuk berlatih, sedangkan kepadatan isi berdasarkan kebutuhan mahasiswa, dan umumnya memberikan penjelasan cara mempelajari bahan ajar. Struktur isi bahan ajar ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut : 1) Bab I adalah pendahuluan, memuat tentang deskripsi mata kuliah, prasyarat, manfaat pembelajaran dan capaian pembelajaran mata kuliah, dan 2) Bab II s.d VI adalah konten bahan ajar, memuat tentang pengantar materi, materi pembelajaran, rangkuman, soal latihan, tugas praktikum dan sumber informasi dan referensi. Dengan struktur ini diharapkan kompetensi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani yang seharusnya dikuasai oleh para mahasiswa dapat diwujudkan.

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

PRAKATA iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Deskripsi Mata Kuliah 1

B. Prasyarat 2

C. Manfaat Pembelajaran 2

D. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 3

E. Petunjuk Pembelajaran 3

BAB II. KELEMBAGAAN 4

A. PENGANTAR MATERI .....

1. Deskripsi Singkat 4
2. Manfaat Pembelajaran 4
3. Capaian Pembelajaran (CP Sub Mata Kuliah/Materi Pokok Bahasan) 4
4. Metode Pembelajaran 5

B. MATERI PEMBELAJARAN 5

1. Pengertian Kelembagaan 5
2. Peran dan Fungsi Kelembagaan 8
3. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kelembagaan 11
4. Istilah-Istilah dalam Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani .....

BAB III. KONSEP-KONSEP PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN .....

A. PENGANTAR MATERI 20

1. Deskripsi Singkat 20

2. Manfaat Pembelajaran 21
3. Capaian Pembelajaran (CP Sub Mata Kuliah/Materi Pokok Bahasan) .....
4. Metode Pembelajaran 21
B. MATERI PEMBELAJARAN 21
1. Perkembangan Istilah dan Konsep Kelembagaan Dilihat Berdasarkan Teori Lembaga dan Organisasi .....
2. Penggunaan Istilah dan Rekonseptualisasi Lembaga dan Organisasi .....
3. Istilah dan Konsep Kelembagaan Dilihat Dari Berbagai Perspektif Keilmuan .....
4. Konsep Pengembangan Kelembagaan Berdasarkan Pendekatan Kelembagaan Baru .....
C. RANGKUMAN 38
D. SOAL LATIHAN 39
E. TUGAS PRAKTIKUM 40
F. SUMBER INFORMASI DAN REFERENSI 42
BAB IV. MODEL KELEMBAGAAN PETANI 45
A. PENGANTAR MATERI 45
1. Deskripsi Singkat 45
2. Manfaat Pembelajaran 45
3. Capaian Pembelajaran (CP Sub Mata Kuliah/Materi Pokok Bahasan) .....
4. Metode Pembelajaran 46
B. MATERI PEMBELAJARAN 46
1. Tinjauan Umum Model Kelembagaan Pertanian 46
2. Rancangan Model Kelembagaan 47
3. Kelompok Tani (Poktan) 48
4. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 50
5. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) 52
a. Kemitraan Bermediasi 52
b. Kelembagaan Klinik Agribisnis 53
c. Badan Usaha Milik Petani (BUMP) 54
d. Koperasi Tani 57

e. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis 60
f. Asosiasi Komoditas Pertanian 62
g. Dewan Komoditas Pertanian Nasional 63
C. RANGKUMAN 64
D. SOAL LATIHAN 64
E. TUGAS PRAKTIKUM 66
F. SUMBER INFORMASI DAN REFERENSI 66
BAB V. PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI (POKTAN) DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) .....
A. PENGANTAR MATERI 68
1. Deskripsi Singkat 68
2. Manfaat Pembelajaran 68
3. Capaian Pembelajaran (CP Sub Mata Kuliah/Materi Pokok Bahasan) .....
4. Metode Pembelajaran 69
B. MATERI PEMBELAJARAN 69
1. Penumbuhan Kelompok Tani (Poktan) 70
2. Penumbuhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 78
3. Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) .....
4. Latihan dan Kunjungan, Supervisi (LAKU SUSI) 94
C. RANGKUMAN 102
D. SOAL LATIHAN 103
E. TUGAS PRAKTIKUM 104
F. SUMBER INFORMASI DAN REFERENSI 106
BAB VI. PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI (KEP) .....
A. PENGANTAR MATERI 107
1. Deskripsi Singkat 107
2. Manfaat Pembelajaran 107
3. Capaian Pembelajaran (CP Sub Mata Kuliah/Materi Pokok Bahasan) .....
4. Metode Pembelajaran 107

B. MATERI PEMBELAJARAN 108

1. Kriteria Umum Penumbuhan dan Pengembangan KEP 109
2. Sasaran 110
3. Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani 112
4. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani 115
5. Istilah-Istilah Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani .....

C. RANGKUMAN 119

D. SOAL LATIHAN 120

E. TUGAS PRAKTIKUM 121

F. SUMBER INFORMASI DAN REFERENSI 121

DAFTAR PUSTAKA 122

LAMPIRAN 123

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Rekonseptualisasi Sesuai Dengan Padanan Penggunaan Konsep Dengan Berpedoman Kepada Sistematika Konsep di Berbagai Literatur Terakhir Yang Lebih Kuat 23

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Strategi Pengembangan Kelembagaan Petani 86
2. Bagan Alur Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi 92
3. Pelaksanaan Gerakan RDK dan RDKK 94
4. Contoh Jadwal Latihan dan Kunjungan 98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Form RDK, Rekapitulasi RDK, RDKK, Rekapitulasi RDKK dan RDKK Bersubsidi 123

2. Form LAKU SUSI 140

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani, sebagai rumpun dari ilmu sosial yang memepelajari bagaimana manusia saling ketergantungan diantara sesamanya. Bahwa manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dalam tiga ranah yaitu sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk berketuhanan. Sebagai mahkluk sosial sangat tergantung diantara sesamanya, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan secara individu atau seorang diri. Saling ketergantungan tersebut membuat diantara individu untuk saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan serta untuk memperbaiki kualitas kehidupannya. Lebih jauh yaitu dalam rangka membangun "*Spirit of group*" sehingga dinamis dalam menjalankan kehidupanya, dan tidak heran bila untuk mempertahankan group atau kelompoknya diciptakan wadah atau lembaga untuk dapat melindungi dan menjalankan segala aktivitasnnya baik untuk memenuhi kebutuhan individunya atau kelompoknya.

Di era modern saat ini, telah berkembang berbagai bentuk lembaga, baik yang berbentuk formal maupun infromal. Mengenai bentuk kelembagaan sangat tergantung dari keperluan dan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga dibentuk. Bentuk kelembagaan yang banyak terdapat diperdesaaan dan sangat dirasakan peran serta fungsinya, diantaranya kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Tujuan pembentukan kelompok tani adalah agar petani di perdesaan dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan memenuhi kebutuhan para anggotanya dalam rangka menjalankan usaha tani yang berorientasi agribisnis. Kelompok tani tersebut dibentuk atas dasar kepentingan, kesamaan wilayah dan kesadaran dari anggota untuk berkelompok. Sebagai bagian dari pembangunan pada sektor pertanian, kelompok tani dan anggotanya berperan sebagai pelaku utama dan pelaku usaha sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Menjadikan kelompok tani sesuai dengan tujuan yaitu terpenuhinya

kebutuhan kelembagaan petani diperlukan komponen atau unsur-unsur pendukung agar dapat berkembang dimulai dari penumbuhan, pengembangan sehingga mampu berdaya saing, mandiri dan berkelanjutan. Dengan demikian mempelajari kelembagaan petani sangat membantu para pegiat pemberdayaan masyarakat, diantaranya mahasiswa dan praktisi untuk dapat mengembangkan kelembagaan petani yang ada menuju kemandirian dan menanamkan kekuatan dalam pembangunan disektor pertanian.

Pembahasan bahan kajian pada mata kuliah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani ini tentunya dirancang untuk mendukung mahasiswa dapat berkomunikasi dengan masyarakat tani dengan berbagai tingkatan mulai dari kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi petani, dewan komoditas pertanian, lembaga keuangan mikro agribisnis serta koperasi petani. Dengan tersedianya bahan ajar ini diharapkan para pengguna dapat mengidentifikasi kelompok kelompok yang ada, menerapkan secara langsung dalam penumbuhan kelembagaan seperti penyusunan organisasi dalam kelompok, penyusunan rencana kebutuhan dari kelompok yang ditumbuhkan, serta untuk membangun spirit dari kelompok.

B. Prasyarat

Persyaratan untuk mengikuti Mata Kuliah Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani, yaitu mahasiswa telah mengikuti dengan tuntas dan lulus Mata Kuliah Perencanaan Penyuluhan Pertanian I.

C. Manfaat Pembelajaran

Fungsi pembelajaran adalah agar tercapainya tujuan belajar, yaitu terjadinya perubahan dalam diri seseorang ke arah yang positif dan terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.

Setelah mahasiswa menempuh dan menyelesaikan Mata Kuliah Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani, diharapkan dapat membentuk kemampuan intelektual, berfikir kritis dan munculnya kreatifitas serta perubahan perilaku atau

pribadinya berdasarkan praktik atau pengalaman belajar melalui mengidentifikasi**,** menunjukkan dan menumbuhkan kelembagaan petani.

D. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mahasiswa mempelajari dan mendalami bahan kajian, menyelesaikan soal latihan dan mengerjakan praktikum mampu mengidentifikasi**,** menunjukkan dan menumbuhkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam bentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi pertanian, lembaga keuangan mikro agribisnis dan koperasi petani.

E. Petunjuk Pembelajaran

Agar mahasiswa berhasil dengan baik mempelajari bahan ajar ini, ikutilah petunjuk belajar berikut ini.

1. Bacalah dengan cermat petunjuk belajar ini sampai Anda memahami betul apa, untuk apa dan bagaimana mempelajari bahan ajar ini.
2. Pelajari dan pahami bagian demi bagian serta temukan kata-kata kunci yang terdapat pada bahan ajar. Carilah pengertian kata-kata kunci tersebut baik yang terdapat dalam bahan ajar ini maupun dari berbagai literatur yang bisa Anda akses.
3. Lakukan tukar pikiran diantara sesama teman dan juga bisa anda konsultasikan dengan dosen, atau asisten dosen.
4. Mantapkan dan perdalam pemahaman Anda melalui diskusi dalam kelompok kecil atau secara klasikal pada saat latihan dan praktikum.
5. Laksanakan presentasi atau simulasi untuk melatih keterampilan Anda agar tercapai kompetensi yang telah di tetapkan.
6. Buatlah resume dalam bentuk tulisan (artikel, makalah atau laporan) yang telah Anda kuasai sebagai dasar pembelajaran berikutnya.

BAB II.

KELEMBAGAAN

A. PENGANTAR MATERI

Tulisan ini merupakan dasar dalam mempelajari penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani. Sebelum mempelajari lebih jauh bagaimana konsep, model, teknik dan strategi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani tentunya harus dikuasai gambaran tentang materi dasar kelembagaan.

Pemahaman tentang kelembagaan perlu dibangun dan diseragamkan diawal karena sampai saat ini masih berkembang berbagai pengertian kelembagaan ditinjau dari berbagai bidang keilmuan.

1. Deskripsi Singkat

Bab I pada bahan ajar ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang ruang lingkup kelembagaan dan membekali mahasiswa menguasai kompetensi dalam mengidentifikasi dan mempertunjukkan : 1) pengertian kelembagaan, 2) peran dan fungsi kelembagaan, dan 3) prinsip-prinsip pengembangan kelembagaan pada proses penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani.

Pelaksanaan proses pembelajaran yang akan dilalui oleh mahasiswa untuk menguasai kompetensi ini yaitu dimulai pada pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-2.

2. Manfaat Pembelajaran

Fungsi pembelajaran adalah agar tercapainya tujuan belajar, yaitu terjadinya perubahan dalam diri seseorang ke arah yang positif dan terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.

Setelah mahasiswa melalui proses pembelajaran pada bab ini diharapkan dapat membentuk kemampuan intelektual, berfikir kritis dan munculnya kreatifitas serta perubahan perilaku atau pribadinya berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu

yaitu melalui; 1) pengertian kelembagaan, 2) peran dan fungsi kelembagaan, dan 3) prinsip-prinsip pengembangan kelembagaan. Konten yang dipelajari merupakan dasar untuk proses penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani.

3. Capaian Pembelajaran (CP Sub Mata Kuliah/ Materi Pokok Bahasan)

Mahasiswa menguasai kompetensi dalam mengidentifikasi dan mempertunjukkan : 1) pengertian kelembagaan, 2) peran dan fungsi kelembagaan, dan 3) prinsip-prinsip pengembangan kelembagaan pada proses penumbuh kembangan kelembagaan petani.

4. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan pada bab ini sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan adalah berupa metode ceramah, tanya jawab dan *discovery learning* (pembelajaran penemuan).

B. MATERI PEMBELAJARAN

1. Pengertian Kelembagaan

Pemahaman tentang pengertian kelembagaan yang berkembang di masyarakat masih beragam. Diantara berbagai pengertian terdapat pemahaman bahwa penumbuhan kelembagaan adalah untuk mengatur perikelakuan para anggota masyarakat yang berlaku di suatu wilayah; dan menggambarkan terbentuknya sebuah bangunan sosial (*social institution*).

Kelembagaan juga diartikan sebagai kumpulan norma-norma dan tindakan yang berkaitan dengan kebutuhan primer dalam kehidupan bersosial atau berinteraksi antar masyarakat, dan membentuk piranti sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia ketika bersosialisasi dalam bermasyarakat. Konsekuensi dari dibentuknya kelembagaan bagi masyarakat adalah terdapatnya sanksi terhadap penyimpangan (pelanggaran) sebagai suatu kekuatan (norma) yang digunakan agar para anggota masyarakat mentaatinya. Pendapat Hayami dan Kikuchi (1981) *dalam* Totok Mardikanto (2009) memberikan pengertian tentang kelembagaan yaitu sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat).

Gambaran untuk praktek penyelenggaraan kelembagaan di kehidupan masyarakat saat ini, kelembagaan dideskripsikan sebagai terjemahan dari kata "*institusion*" yang dikaitkan dengan dua pengertian yaitu " *social institusion* " atau pranata sosial dan "*social organization*" atau organisasi sosial.

Sebuah bentuk relasi sosial kemasyarakatan dapat dikatakan sebagai satu bentuk kelembagaan apabila memiliki empat komponen, sebagai berikut;

1) Komponen person, di mana orang-orang yang terlibat di dalam suatu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.
2) Komponen kepentingan, di mana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh suatu kepentingan atau tujuan, sehingga diantara mereka terpaksa harus sering berinteraksi.
3) Komponen aturan, di mana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepekatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
4) Komponen struktur, di mana setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri.

Sebagai sebuah konsepsi pemahaman kelembagaan menurut Pakpahan (1989) *dalam* Elizabeth (2010) yaitu apabila kelembagaan dilihat dari sudut organisasi maka kelembagaan merupakan sistem organisasi dan kontrol terhadap sumberdaya. Seadangkan apabila kelembagaan ditinjau dari sudut individu, maka merupakan gugus kesempatan bagi individu dalam membuat keputusan dan melaksanakan aktivitasnya.

Beragam pengertian kelembagaan yang dikemukakan oleh para ahli sebelumnya, menggambarkan bahwa kelembagaan memiliki ciri- ciri sebagai berikut :

1) Kelembagaan berkenaan dengan sesuatu yang permanen. Menjadi permanen, karena dipandang rasional dan disadari kebutuhannya dalam kehidupan.
2) Berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan perilaku yang terdiri dari nilai, norma, hukum, peraturan- peraturan, pengetahuan, ide-ide, belief

dan moral. Sesuatu yang abstrak tersebut merupakan suatu yang kompleks dari beberapa hal yang sesungguhnya terdiri dari beberapa bentuk yang tidak sepadan (selevel). Hal yang abstrak ini kira-kira sama dengan *public mind*, atau "wujud ideal kebudayaan".

3) Berkaitan dengan perilaku atau seperangkat *mores* (tata kelakuan), atau cara bertindak yang mantab yang berjalan di masyarakat (*establish way of behaving*). Perilaku yang terpola yang merupakan kunci keteraturan hidup.

4) Kelembagaan juga menekankan kepada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi.

5) Kelembagaan merupakan cara standar untuk memecahkan masalah. Tekanannya adalah pada kemampuannya untuk memecahkan masalah.

Lebih spesifik menurut Pakpahan (1989) suatu kelembagaan dicirikan oleh 3 (tiga) hal utama, yaitu :

1) Batas yuridiksi (*yurisdiction of boundary*), berarti hak hukum atas (batas wilayah kekuasaan) atau (batas otoritas) yang dimiliki oleh suatu lembaga atau mengandung makna kedua-kuanya.

2) Hak kepemilikan (*property right*), konsep *property* atau pemilikan sendiri muncul dari konsep hak (*right*) dan kewajiban (*obligations*) yang diatur oleh hukum, adat, dan tradisi atau consensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumber daya.

3) Aturan representasi (*rule of representation*), mengatur permasalahan siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa dalam proses pengambilan keputusan.

2. Peran dan Fungsi Kelembagaan

Terdapat berbagai model kelembagaan yang tumbuh diperdesaan, akan tetapi sebagain besar berbentuk kelembagaan non bisnis. Tumbuh kembangnya kelembagaan di perdesaan dimaksudkan untuk mewadahi potensi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang tersedia di wilayah perdesaan. Kelembagaan diperdesaan merupakan faktor penting penggerak pembangunan

dipedesaan dan merupakan pendorong untuk mencapai keberhasilan pembangunan perdesaan. Pembangunan perdesaan baru akan mencapai keberhasilan bila melibatkan dan memberdayakan segala bentuk kelembagaan (sosial, adat-budaya) desa dan masyarakat. Para perencana dan pengambil kebijakan hendaknya meninjau pemikiran bahwa kebudayaan tradisional terkait erat dengan proses sosial, ekonomis dan ekologis masyarakat secara mendasar; bersifat dinamis (selalu selaras dan mengalami perubahan), karenanya tidak bertentangan dengan proses pembangunan itu sendiri (Dove M.R., 1986).

Dengan dukungan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang tersedia, pembangunan pertanian di perdesaan sesungguhnya dapat me*recovery* sekaligus menjadi tulang punggung (*back bone*) bagi perkembangan sektor riil dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini terbukti karena daya dukungnya yang tinggi, mampu bertahan ketika sektor lain terpuruk. Upaya pengembangan *social network* salah satunya dapat dilakukan melalui strategi pemberdayaan kelembagaan tradisional masyarakat dengan mempertimbangkan kekuatan *indigenous* dan *local konowledge* yang selama ini hidup eksis bagi mereka (Elizabeth, 2007).

Peningkatan peran kelembagaan di dalam pembangunan perdesaan diperlukan adanya partisipasi masyarakat lokal sebagai suatu keharusan dalam strategi pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dalam upaya mewujudkan dan memperkuat kemandirian masyarakat perdesaan. Dengan demikian, peran dan fungsi penumbuhkembangan kelembagaan sebagai salah satu komponen penunjang pembangunan pertanian perdesaan dimaksudkan tidak untuk melebarkan kesenjangan antara golongan masyarakat, justru mendorong agar masyarakat berproduktivitas tinggi, berdiversifikasi, serta mampu membangun jejaring kemitraan. Sebuah fakta empiris mengungkapkan bahwa Lembaga di perdesaan lahir untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya. Sifatnya tidak linier, namun cenderung merupakan kebutuhan individu anggotanya, berupa: kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman (*safe*), kebutuhan hubungan sosial (*social affilination*), pengakuan (*esteem*), dan pengembangan pengakuan (*self actualization*). Manfaat utama lembaga adalah mewadahi kebutuhan salah satu

sisi kehidupan sosial masyarakat, dan sebagai *social control*, sehingga setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat (Elizabeth, 2003).

Hermanto R., (2006) menyebutkan bahwa kelembagaan pertanian di Indonesia dapat dibedakan menjadi sebagai berikut : (1) kelembagaan sosial nonbisnis yang merupakan lembaga pertanian yang mendukung penciptaan teknologi, penyampaian teknologi, penggunaan teknologi dan pengerahan partisipasi masyarakat, seperti lembaga penelitian, penyuluhan, kelompok tani dan sebagainya, dan (2) lembaga bisnis penunjang yang merupakan lembaga yang bertujuan mencari keuntungan, seperti koperasi, usaha perorangan, usaha jasa keuangan dan sebagainya. Sedangkan Permentan No. 67 Tahun 2016, kelembagaan dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, korporasi. Kelembagaan difasilitasi, diberdayakan oleh Pemerintah atau Pemda agar tumbuh, berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya. Kelembagaan pertanian yang saat ini berkembang di pedesaan adalah kelompok tani (POKTAN) dan Gabungan Kelompok tani (GAPOKTAN).

Menurut Mardikanto T. (2009), pengertian kelompok tani adalah sekumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri petani dewasa (pria/wanita maupun petani taruna yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan dipimpin oleh seorang kontak tani. Selanjutnya KEMENTAN RI dalam Permentan No 67 Tahun 2016, menyatakan bahwa : 1) Kelompok tani (POKTAN) adalah sekumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkat-kan dan mengembangkan usahanya, dan 2) Gabungan Kelompok tani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Dari kedua pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kelembagaan petani merupakan : a) organisasi yang anggotanya petani dan pelaku usaha pertanian yang dibentuk oleh mereka baik formal maupun informal, b) kelembagaan petani yang formal dapat berbentuk koperasi atau badan hukum lainnya, c) kelembagaan petani yang non formal dapat berbentuk kelompok tani, Gapoktan dan asosiasi petani, dan d) kelembagaan petani tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya.

Kelembagaan petani diperdesaan meruapakan instrumen penting dan faktor pendorong pertumbuhan pembangunan perdesaan, sehingga secara umum fungsi kelembagaan petani dapat digunakan sebagai alat pengamatan aktivitas dan interaksi masyarakat dan pihak lain yang memiliki kepedulian dan kebutuhan dengan petani. Adanya kelembagaan petani tersebut dapat mengatur hubungan antar petani dalam komunitas dan antar petani di luar komunitas, disesuaikan dengan norma dan pranata yang telah diatur oleh kelembagaan petani.

Kementan (2016), menjelaskan bahwa kelembagaan petani mempunyai fungsi :

1) Sebagai wadah proses pembelajaran : meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktifitas dan pendapatan bertambah.
2) Wahana kerjasama, untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani di dalam dan antar kelompokj serta dengan pihak lain, sehingga usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan ganguan.
3) Unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, adalah usaha tani yang dilaksanakan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi baik dari kualitas maupun kuantitas.
4) Serta unit jasa penunjang yaitu mampu melakukan akses dengan berbagai lembaga lain guna memajukan kegian kelompok.

Berdasarkan pengamatan di lapangan (empiris), maka fungsi kelembagaan petani diantaranya, adalah :

1) Koordinasi diantara petani, petani dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.
2) Media difusi inovasi teknologi dan informasi yang lain dalam rangka pengembangan kelompok.
3) Menjembatani antara anggota kelompok dengan pihak luar.
4) Menyusun rencana usaha kelompok, rencana definitif kelompok, dan rencana kebutuhan definitif kelompok.
5) Memberikan kekuatan moral diantara para petani.
6) Saling asah, asih, dan asuh sebagai media belajar.

3. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kelembagaan

Elizabeth dan Darwis, (2003) memberikan gambaran bahwa manfaat utama lembaga adalah mewadahi kebutuhan salah satu sisi kehidupan sosial masyarakat, dan sebagai kontrol sosial, sehingga setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat di suatu wilayah.

Kelembagaan petani yang menginginkan tetap tumbuh dan berkembang (berkelanjutan) serta tetap eksis dalam peningkatan kapasitasnya harus memegang prinsip-prinsip kelembagaan petani sebagai berikut :

a. Prinsip Otonomi (Spesifik Lokal).

Pengertian prinsip otonomi yang harus dipenuhi pada pengembangan kelembagaan petani dapat dibagi kedalam dua bentuk yaitu :

1) Otonomi Individu.

Pada tingkat rendah, makna dari prinsip otonomi adalah mengacu pada individu sebagai perwujudan dari hasrat untuk bebas yang melekat pada diri manusia sebagai salah satu anugerah paling berharga dari sang pencipta (Basri, 2005). Kebebasan inilah yang memungkinkan individu-individu menjadi otonom sehingga mereka dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada

di dalam dirinya secara optimal. Individu-individu yang otonom ini selanjutnya akan membentuk komunitas yang otonom, dan akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul.

2) Otonomi Desa (Spesifik Lokal).

Pengembangan kelembagaan di pedesaan disesuaikan dengan potensi desa itu sendiri (spesifik lokal). Pedesaan di Indonesia, disamping bervariasi dalam kemajemukan sistem, nilai, dan budaya; juga memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang beragam pula. Kelembagaan, termasuk organisasi, dan perangkat-perangkat aturan dan hukum memerlukan penyesuaian sehingga peluang bagi setiap warga masyarakat untuk bertindak sebagai subjek dalam pembangunan yang berintikan gerakan dapat tumbuh di semua bidang kehidupannya. Disamping itu, harus juga memperhatikann elemen-elemen tatanan yang hidup di desa, baik yang berupa elemen lunak (soft element) seperti manusia dengan sistem nilai, kelembagaan, dan teknostrukturnya, maupun yang berupa elemen keras (*hard element*) seperti lingkungan alam dan sumberdayanya, merupakan identitas dinamis yang senantiasa menyesuaikan diri atau tumbuh dan berkembang (Syahyuti, 2007).

b. Prinsip Pemberdayaan.

Pemberdayaan mengupayakan bagaiamana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Program kelembagaan untuk menuju kepada kelembagaan yang mandiri, didasarkan kepada prinsip pemberdayaan yaitu mulai perencanaan, proses, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dikerjakan oleh masyarakat yang mempunyai program. Payne, (1997) menyatakan bahwa inti utama pemberdayaan adalah tercapainya kemandirian.

c. Prinsip Kemandirian Lokal.

Penyelenggaraan pembangunan dimasyarakat perdesaan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Diantaranya melalui pendekatan pembangunan cara pandang kemandirian lokal. Pendekatan ini mengisyaratkan bahwa semua tahapan dalam

proses pemberdayaan harus dilakukan secara desentralisasi. Dengan demikian upaya-upaya pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan desentralisasi akan menumbuhkan kondisi otonom, dimana setiap komponen akan tetap eksis dengan berbagai keragaman (*diversity*) yang dikandungnya (Amien, 2005).

Tidak dapat dipungkiri bahwa tumbuh kembangnya kelembagaan petani diperdesaan masih banyak yang terkendala baik secara teknis dan non teknis. Secara non teknis kegagalan pengembangan kelembagaan petani selama ini salah satunya akibat mengabaikan kelembagaan lokal yang hidup di pedesaan, karena dianggap tidak memiliki jiwa ekonomi yang memadai.

Ciri kelembagaan pada masyarakat tradisional adalah dimana aktivitas ekonomi melekat pada kelembagaan kekerabatan dan komunitas. Pemenuhan ekonomi merupakan tanggungjawab kelompok-kelompok komunal genealogis. Ciri utama kelembagaan tradisional adalah sedikit kelembagaan, namun banyak fungsi. Beda halnya dengan pada masyarakat modern yang dicirikan oleh munculnya banyak kelembagaan dengan fungsi-fungsi yang spesifik dan sempit-sempit (Saptana, dkk, 2003).

Kelembagaan yang mandiri merupakan kebutuhan yang tidak bisa diabaikan dan sebagai titik tolak agar kelembagaan dapat berkelanjutan, karena kelembagaan yang kuat harus berasal dan dibangun atas dasar kekuatan dan kemampuan dari dalam kelembagaan masyarakat tersebut. Amien, (2005) menyatakan bahwa kemandirian lokal menunjukkan bahwa pembangunan lebih tepat bila dilihat sebagai proses adaptasi-kreatif suatu tatanan masyarakat dari pada sebagai serangkaian upaya mekanistis yang mengacu pada satu rencana yang disusun secara sistematis. Kemandirian lokal juga menegaskan bahwa organisasi seharusnya dikelola dengan lebih mengedepankan partisipasi dan dialog dibandingkan semangat pengendalian yang ketat sebagaimana dipraktekkan selama ini.

4. Istilah-Istilah dalam Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani

Istilah-istilah atau pengetian yang dijelaskan pada bagian ini merupakan pengertian yang diambil dari Permentan No. 67 Tahun 2017, selanjutnya akan digunakan dalam pembahasan konten bahan ajar ini. Istilah dan pengertian tersebut sebagai berikut :

a. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

b. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

c. Klasifikasi Kemampuan Poktan adalah pemeringkatan kemampuan Poktan ke dalam 4 (empat) kategori yang terdiri dari: Kelas Pemula, Kelas Lanjut, Kelas Madya dan Kelas Utama yang penilaiannya berdasarkan kemampuan Poktan.

d. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

e. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.

f. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan petani.

g. Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan petani.

h. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

i. Usaha tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.

j. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.

k. Pelaku Utama selanjutnya disebut Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

l. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

m. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

n. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

C. RANGKUMAN

Kelembagaan merupakan suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat). Kelembagaan memiliki empat komponen, sebagai berikut : 1) komponen person, 2) komponen kepentingan, 3) komponen aturan, dan 4) komponen struktur. Lembaga di perdesaan lahir untuk memenuhi kebutuhan

sosial masyarakatnya. Manfaat utama lembaga adalah mewadahi kebutuhan salah satu sisi kehidupan sosial masyarakat, dan sebagai *social control*, sehingga setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat.

Kelembagaan dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, korporasi. Diantara kelembagaan yang berkembang di perdesaan saat ini adalah kelembagaan pertanian yaitu kelompok tani (POKTAN) dan Gabungan Kelompok tani (GAPOKTAN).

Peningkatan kapasitas kelembagaan diperlukan adanya partisipasi masyarakat lokal sebagai suatu keharusan dalam strategi pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dalam upaya mewujudkan dan memperkuat kemandirian masyarakat perdesaan. Dengan demikian, penumbuhkembangan kelembagaan sebagai salah satu komponen penunjang pembangunan pertanian perdesaan dimaksudkan tidak untuk melebarkan kesenjangan antara golongan masyarakat, justru mendorong agar masyarakat berproduktivitas tinggi, berdiversifikasi, serta mampu membangun jejaring kemitraan.

D. SOAL LATIHAN

Untuk mengukur kemampuan Anda dalam memahami dan menguasai materi ajar pada bab ini, kerjakan soal-soal berikut ini :

1. Sebutkan pengertian kelembagaan menurut beberapa ahli ? Selanjutnya simpulkan pengertian kelembaan tersebut menurut pemahaman Anda!
2. Kelembagaan merupakan bentuk relasi sosial kemasyarakatan yang memiliki komponen-komponen dan ciri-ciri yang melekat pada kelembagaan tersebut.

   Sebutkan dan jelaskan: 1) komponen kelembagaan dan 2) ciri-ciri kelembagaan!
3. Kelembagaan diyakini berperan dalam mewujudkan dan memperkuat pembangunan perdesaan.

   Jelaskan : 1) bagaimana peran kelembagaan dalam mewujudkan pembangunan di perdesaan dan 2) berikan contoh penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani untuk terwujudnya pembangunan desa mandiri!

4. Sebutkan dan jelaskan fungsi kelembagaan menurut Permentan No 67 tahun 2016!
5. Tujuan menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan yang kuat yaitu agar kelembagaan menjadi mandiri dan berkelanjutan, di mana kelembagaan yang kuat harus berasal dan dibangun atas dasar kekuatan dan kemampuan dari dalam kelembagaan masyarakat tersebut.

Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pengembangan kelembagaan petani dalam mencapai tujuan tersebut!

E. TUGAS PRAKTIKUM

Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan dengan menggunakan metode *discovery learning* (pembelajaran penemuan). Topik pada latihan ini adalah "Peranan Kelembagaan Petani (POKTAN dan GAPOKTAN) pada pembangunan pertanian di Indoensaia".

Tahapan pelaksanaan latihan, sebagai berikut :

1. Mengumpulkan bahan-bahan berupa profil (POKTAN dan GAPOKTAN) dan artikel dari jurnal (Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani) untuk dieksplorasi.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah untuk selanjutnya dirumuskan hipotesis (pernyataan sementara).
3. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang relevan dengan masalah yang ditemukan.
4. Pengolahan data untuk mendapatkan konsep dan generalisasi di mana mahasiswa mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban/ penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis.
5. Melakukan pemeriksaan (verifikasi) secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil proses data.
6. Menarik kesimpulan/generalisasi. Prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi dirumuskan berdasarkan hasil verifikasi.

F. SUMBER INFORMASI DAN REFERENSI

Kementerian Pertanian. *Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan*, Nomor 16. Tahun 2006. Jakarta Tahun 2006.

Kementerian Pertanian. Permentan No. 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Jakarta. Tahun 2016.

Kementerian Pertanian. *Pedoman Teknis Pemberdayaan Kelompok Tani di Lokasi Sentra Pangan*. Pusat Penyuluhan Pertanian. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Jakarta. Tahun 2015.

Toto Mardikanto. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press, Surakarta. Tahun 2009.

Agus Purbathin Hadi. *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelemebagaan dalam Pembangunan*. Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA).

Elizabeth, R dan Anugrah, IS. *Kelembagaan Ekonomi pada Komunitas Petani Sayuran di Provinsi Bali*. Prosiding Seminar Nasional. PESKP. Bogor. Tahun 2010.

Rosganda Elizabeth. *Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. PUSLITBANGTAN.

Michael R. Dove. *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi.* Yayasan Obor Indonesia . Tahun 1986.

Elizabeth R dan Darwis V. *Karakteristik Petani Miskin dan Persepsinya Terhadap Program JPS di Propinsi Jawa Timur*. Tahun 2003. SOCA. Bali.

Payne, M. *Modern Social Work Theory*. Second Edition. McMilan Press Ltd. London. Tahun 1997.

Hermanto R. *Rancangan Kelembagaan Petani Dalam Implementasi Prima Tani Di Provinsi Sumatera Selatan. Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 5 No. 2, Juni 2007 : 110-125.

Syahyuti. *Strategi dan Tantangan Dalam Pengembangan Gabungan Kelompok tani (GAPOKTAN) sebagai Kelembagaan Ekonomi di Perdesaan*. Kelembagaan DAS.

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Jl A. Yani 70 Bogor. Tahun 2007.

Faisal Basri. *Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah*. Universitas Brawijaya, Malang. (http://128.8.56.108/iris-data/PEG/Bahasa/malang/Malangtantangan. pdf., 22 Maret 2005).

Syahyuti. *Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Kelembagaan Ekonomi Di Perdesaan*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian Jl A. Yani No. 70 Bogor 16161. Tahun 2007.

BAB III.

KONSEP-KONSEP PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

A. PENGANTAR MATERI

1. Deskripsi Singkat

Bahan kajian yang dipelajari dalam tulisan ini merupakan dasar untuk mencapai kompetensi menetapkan konsep penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani. Sebelum mempelajari lebih lanjut bagaimana konsep penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani tentunya harus dikuasai terlebih dahulu gambaran tentang materi pendukungnya yang akan dibahas pada materi bahan ajar di bawah ini.

Materi bahan ajar ini diawali dengan penggambaran bagaimana memahami pengertian yang benar untuk istilah kelembagaan, lembaga dan organisasi. Setelah itu dilanjutkan dengan memahami berbagai pendekatan dalam membangun kelembagaan. Melalui pemilihan dan penetapan pendekatan kelembagaan diharapkan dapat menumbuhkembangkan kelembagaan baru yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Penguasaan terhadap kompetensi memiih dan menetapkan konsep penumbuhan dan pengembangan kelembagaan merupakan faktor penting dan sebagai instrumen dasar dalam mempelajari model-model penumbuhan dan pengembangan kelembagaan.

Pelaksanaan proses pembelajaran yang akan dilalui oleh mahasiswa untuk menguasai kompetensi ini yaitu dimulai pada pertemuan ke-3 sampai dengan pertemuan ke-4.

2. Manfaat Pembelajaran

Fungsi pembelajaran adalah agar tercapainya tujuan belajar, yaitu terjadinya perubahan dalam diri seseorang ke arah yang positif dan terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.

Setelah mahasiswa melalui proses pembelajaran pada bab ini diharapkan dapat membentuk kemampuan intelektual, berfikir kritis dan munculnya kreatifitas serta perubahan perilaku atau pribadinya berdasarkan praktik atau pengalaman belajar konsep-konsep penumbuhan dan pengembangan kelembagaan.

3. Capaian Pembelajaran (CP Sub Mata Kuliah/Materi Pokok Bahasan)

Mahasiswa menguasai kompetensi dalam mengidentifikasi, memilih, mengambil keputusan dan menetapkan salah satu konsep pengembangan dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan.

4. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan pada bab ini sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan adalah berupa metode ceramah, tanya jawab dan *Problem Based Learning* (Pembelajaran Berbasis Masalah).

B. MATERI PEMBELAJARAN

1. Perkembangan Istilah dan Konsep Kelembagaan Dilihat Berdasarkan Teori Lembaga dan Organisasi

Landasan terbaru penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani di indonesia yaitu Permentan no. 67 tahun 2016. Permentan tersebut menyebutkan bahwa kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuh-kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Penyebutan istilah dan konsep kelembagaan yang dipahami saat ini masih berdasarkan kepada perspektif keilmuan masing-masing. Mempelajari kelembagaan petani tentunya juga harus terlebih dahulu menguasai teori sampai pada pemahaman rumusan istilah dan konsep kelembagaan yang lebih operasional.

Syahyuti (2012) mengemukakan beberapa pandangan mengenai definisi lembaga sebagai organisasi dan lembaga sebagai institusi serta definisi ‘kelembagaan’ (institusi) yang dikemukakan oleh para ahli. Syahyuti sendiri menyatakan bahwa

terdapat empat cara untuk membedakannya, yaitu : 1) bahwa kelembagaan cenderung tradisional sedangkan organisasi cenderung modern, 2) kelembagaan berasal dari masyarakat itu sendiri sedangkan organisasi datang dari atas, 3) kelembagaan dan organisasi berada dalam satu kontinum di mana organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga dan 4) organisasi merupakan bagian dari kelembagaan.

Pengamatan dalam penggunaan istilah dan konsep kelembagaan untuk kepentingan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani bisa dimulai dengan penelahaan tentang istilah *institution* pada literatur berbahasa Inggris, ataupun istilah lembaga dan kelembagaan dalam literatur berbahasa Indonesia. Akan tetapi penggambaran tersebut cenderung tidak konsisten dan tidak memperoleh pengertian yang sama antar ahli. Selain itu, penggunaan konsep ini seringkali bercampur dengan konsep *organization*. Hal yang sama juga terjadi pada literatur berbahasa Indonesia, antara istilah lembaga, kelembagaan dan organisasi. Penggunaan istilah kelembagaan dalam literatur berbahasa Indonesia tidak selalu merupakan terjemahan langsung atau dapat disamakan dengan konsep *institutional* dalam literatur berbahasa Inggris. Contohnya, kelembagaan sering digunakan untuk menyebut organisasi petani pengguna air di Bali yaitu subak, padahal dalam literatur berbahasa Inggris subak biasanya disebut sebagai *nonformal organization*. Kekeliruan yang paling sering adalah menerjemahkan kata *institution* menjadi kelembagaan, sedangkan kata lembaga dimaknai persis sebagai organisasi.

Penyebabnya adalah karena banyak pihak yang menulis tentang objek ini namun tidak mengembangkan konsep dan teorinya. Ketidaksepakatan ini dinyatakan oleh Uphhof (1986) bahwa "apa yang disebut dengan *'institution' masih menjadi subjek debat di kalangan para ahli sosial. Istilah "institution" dan "organization" sering digunakan bolak balik sehingga menimbulkan kebingungan"*. Richard Scott yang telah merangkum seluruh perkembangan teori kelembagaan juga menemukan hal serupa. Scott (2008), Ia menemukan penggunaan asumsi yang berbeda dan penuh pertentangan satu sama lain.

2. Penggunaan Istilah dan Rekonseptualisasi Lembaga dan Organisasi

Penjelasan sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa terdapat kecenderungan baik dalam literatur berbahasa Inggris maupun Indonesia, ditemui berbagai kekeliruan dan ketidaksepakatan istilah lembaga dan organisasi. Dengan demikian perlu dilakukan perumusan kembali (rekonseptualisasi) yang akan berguna baik itu untuk telaahan di tingkat akademisi maupun operasional di masyarakat petani di Indonesia. Matrik Rekonseptualisasi dalam Syahyuti (2012) diharapkan dapat menjadi pedoman dan memudahkan dalam memahami pengertian dari istilah lembaga, organisasi dan kelembagaan. Dalam konteks di sini secara khsusus pengertian tentang kelembagaan lebih banyak disinggung, terlihat bahwa kata "kelembagaan" banyak dipakai untuk menyebut objek-objek yang sesungguhnya berbeda. Untuk itu kelembagaan akan dibahas tersendiri dalam sub bab berikutnya.

Tabel 1. Rekonseptualisasi Sesuai Dengan Padanan Penggunaan Konsep Dengan Berpedoman Kepada Sistematika Konsep Di Berbagai Literatur Terakhir Yang Lebih Kuat.

Terminologi Dalam Literatur Berbahasa Inggris	Terminologi Dalam Literatur Berbahasa Indonesia	Terminologi Semestinya	Materi Di Dalamnya
1. Institution	Kelembagaan, institusi	Lembaga	Norma, nilai, regulasi pemerintah, pengetahuan petani tentang regulasi, dll.
2. Institutional	Kelembagaan, institusi	Kelembagaan	Hal-hal berkenaan dengan lembaga
3. Organization	Organisasi, lembaga	Organisasi	Contoh: kelompok tani, koperasi, asosiasi petani berdasar komoditas
4. Organizational	Keorganisasian, kelembagaan	Keorganisasian	Hal-hal berkenaan dengan organisasi, misalnya perihal kepe-mimpinan, keanggota-an, manajemen, dan keuangan organisasi.

Sumber : Syahyuti 2012

Matrik di atas menjelaskan bahwa lembaga adalah terjemahan langsung dari kata *institution*. Sedangkan organisasi adalah terjemahan langsung dari kata *organization*. Keduanya merupakan kata benda. Sementara untuk kata kelembagaan merupakan terjemahan dari kata *institutionall,* yang mempunyai makna “berbagai hal yang berhubungan dengan lembaga”. Demikian pula dengan kata keorganisasian merupakan terjemahan kata *organizational* yang mempunyai makna berbagai hal yang berhubungan dengan organisasi. Apabila diserupakan dengan kata ”kepresidenan” yang bermakna segala hal yang berhubungan dengan presiden, dan ”kehutanan” yang bermakna sebagai hal-hal yang berhubungan dengan hutan.

Rumusan operasional kelembagaan mungkin akan lebih mudah digambarkan dengan contoh bahwa apabila perangkat komputer dianalogkan sebagai organisasi maka software yang dapat menggerakkan komputer agar bisa digunakan adalah kelembagaan. Contoh lain; apabila tubuh manusia dianalogkan sebagai suatu organisasi maka mekanisme aliran darah atau sirkulasi darah atau mekanisme pencernaan adalah kelembagaannya.

Lembaga

Berdasarkan paham kelembagaan baru, terdapat tiga bagian pokok dalam lembaga. Ketiga bagian tersebut menjadi objek pokok kalangan sosiologi dan sosiologi ekonomi dalam menggambarkan lembaga selama ini, yaitu mencakup aspek-aspek; 1) normatif, 2) regulatif, dan 3) kultural-kognitif.

Pertama, aspek normatif. menyebut bahwa norma sebagai penentu pokok perilaku individu dalam masyarakat Soekanto (1999), serta Uphoff (1992).

Norma merupakan komponen pokok dan paling awal dalam lembaga. Karena itulah, para ahli yang berada di sisi ini sering mengklaim sebagai telah melahirkan kelembagaan yang asli (*genuine institutionalism)*. Pada prinsipnya, norma akan menghasilkan preskripsi, bersifat evaluatif, dan melahirkan tanggung jawab dalam kehidupan aktor di masayarkat. Norma memberi pengetahuan apa tujuan kita, dan bagaimana cara mencapainya. Norma bersifat membatasi *(constraint)* sekaligus

mendorong *(empower*) aktor. Kompleks norma pada hakekatnya menjelaskan apa kewajiban bagi aktor. Bagi sebagian kalangan, lembaga yang menjadikan norma sebagai objek pokoknya disebut dengan "lembaga normatif" atau "paham kelembagaan historik".

Kedua, aspek regulatif. Portes (2006) menyebut lembaga sebagai *"sekumupulan aturan baik formal maupun non formal yang membentuk kesalinghubungan antar peran dalam organisasi sosial"*. Dalam objek ini terkait perihal latar aturan (*rule setting)*, monitoring, dan sanksi-sanksi. Lembaga diukur dari kapasitasnya untuk menegakkan aturan, misalnya melalui mekanisme hadiah dan sanksi. Aturan ditegakkan melalui mekanisme informal dan formal.

Ketiga, aspek kultural-kognitif. Menurut (scott, 2008) Inti dari objek kultural-kognitif ini adalah pada makna *(meaning)*. Fokus dalam kultural-kognitif adalah pada bagaimana kehidupan sosial menggunakan kerangka makna dan bagaimana makna-makna diproduksi dan direproduksi. Realitas sosial adalah konstruksi manusia sebagai produk interaksi sosial, dimana individu bertindak sesuai persepsinya terhadap dunia sosial. Tumbuhnya perhatian pada objek pengetahuan dalam kajian lembaga merupakan penyumbang utama lahirnya Teori Kelembagaan Baru.

Berdasarkan tiga objek ini, maka "lembaga" dapat dirumuskan sebagai hal yang berisi norma, regulasi, dan kultural-kognitif yang menyediakan pedoman, sumber daya, dan sekaligus hambatan untuk bertindak bagi aktor. Fungsi lembaga adalah menyediakan stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat, meskipun ia pun dapat berubah. Demikian pula untuk petani, lembaga memberikan pedoman bagi petani dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari khususnya dalam bidang agribisnis. Berbagai norma yang hidup di masyarakat termasuk norma-norma pasar berserta seperangkat regulasi menjadi pertimbangan petani untuk bertindak sebagaimana ia memahaminya (kultural-kognitif). Lembaga tak hanya berisi batasan-batasan, namun juga menyediakan berbagai kriteria sehingga individu dapat memanfaatkan apa yang ia sukai (DiMaggio and Powell 1991).

Organisasi

Perlu pemahaman yang benar tentang organisasi dan lembaga, karena masih sebagian dari masyarakat mempunyai kecenderungan memandang bahwa organisasi itu merupakan lembaga. Padahal sesungguhnya organisasi merupakan elemen dari lembaga. Keberadaan organisasi sangat bergantung pada lingkungan kelembagaannya. Sebagaimana organisasi merupakan sebuah unit pembuatan keputusan tempat aktor berinteraksi secara lebih intensif untuk menjalankan aktifitas mencapai beberapa tujuan yang telah didefinisikan secara lebih tegas. Dalam dunia pertanian, organisasi, sebagaimana Scott (2008), terdiri atas beragam level, mulai dari level internasional sampai dengan grup-grup mandiri *(individual organization),* misalnya kelompok tani dan koperasi-koperasi pertanian.

Organisasi merupakan arena sosial dimana tindakan rasional berlangsung (sebagaimana pendapat Selznick *dalam* Scott, 2008). Perilaku dalam organisasi pasti rasional, karena pilihan-pilihan dibatasi dan dipandu oleh aturan-aturan (Scott, 2008). Adanya organisasi akan mempercepat tercapainya kestabilan tindakan. Ini merupakan jiwa dasar dari pelembagaan.

Adanya organisasi akan membantu untuk menyederhanakan dan mendukung pembentukan keputusan individu. Aktivitas bertani tetap bisa berjalan tanpa organisasi, karena lembaga sesungguhnya telah memberi cukup pedoman dan kesempatan. Namun, dalam organisasi perilaku akan lebih tertata, lebih terpola, sehingga lebih bisa diprediksi pula. Pendekatan kelembagaan baru paling tepat digunakan dalam mempelajari organisasi, karena ia telah menjadi prespektif yang pokok dalam memahami tindakan-tindakan ekonomi, dimana ia lebih banyak perhatian pada konteks sosial (Portes, 2006; Nee, 2005). Menurut Nee (2005), kelembagaan baru adalah sebuah integrasi dari sekumpulan relasi-relasi sosial dan lembaga-lembaga sebagai pedoman yang lalu menjadi pengatur dalam kondisi elemen-elemen formal dari struktur kelembagaan dan organisasi sosial nonformal dari jaringan dan norma-norma memfasilitasi, memotivasi, dan menentukan perilaku ekonomi anggota masyarakat.

3. Istilah dan Konsep Kelembagaan Dilihat Dari Berbagai Perspektif Keilmuan

Menurut Arturo (1987), Kelembagaan lebih dipandang sebagai suatu manajemen dan keterkaitan antara sumber daya manusia, keuangan dan hubungan atau sistem kerja antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya. Sebagai contoh konkrit, hasil kerja lembaga dapat berupa infrastruktur, penyediaan barang atau pelayanan (jasa), seperti pembangunan irigasi dan pengobatan bagi orang sakit. Hasil yang dapat diperoleh dari pengembangan kelembagaan adalah mekanisme kegiatan yang teratur dan saling mendukung (terkoordinasi) yang pada akhirnya memberikan situasi dan kondisi yang kondusif dalam pemberian pelayanan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Konkritnya dapat dicontohkan pada suatu kelembagaan penelitian. Hasil pegembangan kelembagaan penelitian tidak diukur dari berapa jumlah hasil penelitian yang telah dihasilkan tetapi sudahkah hasil-hasil penelitiannya tersebut menjadikan solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, atau apakah hasil penelitian tersebut sudah dirasakan oleh masayarakat dapat memenuhi kebutuhannya.

Pendekatan pengembangan kelembagaan sebenarnya sudah banyak dibahas dalam berbagai bidang seperti sosiologi, antropologi, hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi karena kini mulai banyak ekonom berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi umumnya karena kegagalan kelembagaan. Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku dan adat istiadat. Dalam bidang ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) untuk kepentingan bersama atau umum (*public*). Ilmu psikologi melihat kelembagaan dari sudut tingkah laku manusia (*behaviour*). Ilmu hukum menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut hukum, aturan dan penegakan hukum serta instrumen dan proses litigasinya.

Pendekatan ilmu biologi, ekologi atau lingkungan melihat institusi dari sudut analisis system lingkungan (*ecosystem*) atau sistem produksi dengan menekankan struktur dan fungsi system produksi atau system lingkungan kemudian dapat

dianalisis keluaran serta kinerja dari system tersebut dalam beberapa karakteristik atau kinerja (*system performance atau system properties*) seperti produktivitas, stabilitas, sustainabilitas, penyebaran dan kemerataanya. Ilmu ekonomi yang berkembang dalam cabang barunya ilmu ekonomi institusi baru (*neo institutional economics*) melihat kelembagaan dari sudut biaya transaksi (*transaction costs*) dan tindakan kolektif (*collective action*). Di dalam analisis biaya transaksi termasuk analisis tentang kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam atau faktor produksi (*property rights*), ketidakseimbangan akses dan penguasaan informasi (*information asymmetry*) serta tingkah laku opportunistik (*opportunistic behaviour*).

Memahami lebih jauh kelembagaan dan organisasi memang unik, membedakan pengertian diantara keduanya juga tidaklah mudah. Namun demikian setidaknya bisa dengan empat cara berikut untuk memperjelas perbedaan kedua istilah tersebut, yaitu :

*Pertama***,** kelembagaan cenderung tradisional, sedangkan organisasi cenderung modern. Kelembagaan merupakan sesuatu yang tradisional, atau tidak modern. Cara berpikir seperti ini merupakan ciri khas ideologi modernisasi yang menuntut keseragaman dalam segala hal, baik manajemen maunpun kelembagaan. Pembedaan atas tradisional dan modern ini sejalan dengan pembedaan yang diajukan oleh Horton dan Hunt (1984): "*… institution do not have members, they have followers*".

*Kedua***,** kelembagaan dari masyarakat itu sendiri dan organisasi datang dari atas. Cara pembedaan ini relatif mirip dengan pembedaan di atas, namun ini tidak dalam konteks tradisional-modern, namun bawah-atas. Kelembagaan dan organisasi merupakan bipolar yang secara diametral dapat dipertentangkan. Keduanya merupakan social form yang berada pada dua ujung garis kontinuum: kelembagaan berada di sebelah kiri, dan organisasi di sebelah kanan.

Ketiga, kelembagaan dan organisasi berada dalam satu kontinum, dimana organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga. Menurut Norman Uphoff

(1986), tujuan akhir adalah organisasi yang melembaga, atau kelembagaan yang memiliki aspek organisasi. Jadi, mereka hanya berbeda dalam tingkat penerimaan di masyarakat saja.

Keempat, organisasi merupakan bagian dari kelembagaan. Dalam konteks ini, organisasi merupakan organ dalam suatu kelembagaan. Keberadaan organisasi menjadi bagian teknis yang penting yang menjamin beroperasinya kelembagaan.

Setelah mempelajari istilah dan konsep kelembagaan dari berbagai definisi dan perspektif keilmuan, dapat dirangkum berbagai unsur penting dari kelembagaan, sebagai berikut :

a. Institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat;
b. Norma tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur;
c. Peraturan dan penegakan aturan/hukum;
d. Aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajiban anggota;
e. Kode etik;
f. Kontrak;
g. Pasar;
h. Hak milik **(***property rights* atau *tenureship***);**
i. Organisasi;
j. Insentif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan.

Tidak ada manusia atau organisasi yang bisa hidup tanpa interaksi dengan masyarakat atau organisasi lain yang saling mengikat. Dengan demikian elemen-elemen pembentuk institusi atau kelembagaan diantaranya bisa terdiri dari unsur-unsur aturan, tingkah laku atau kode etik, norma, hukum dan faktor pengikat lainnya antar anggota masyarakat yang membuat orang saling mendukung dan

bisa berproduksi atau menghasilkan sesuatu karena ada keamanan, jaminan akan penguasaan atas sumber daya alam yang didukung oleh peraturan dan penegakan hukum serta insentif untuk mentaati aturan atau menjalankan institusi.

4. Konsep Pengembangan Kelembagaan Berdasarkan Pendekatan Kelembagaan Baru

Terbentuknya teori kelembagaan baru dimulai sejak tahun 1970-an merupakan hasil interaksi antara teori kelembagaan dengan organisasi, yaitu dengan tumbuhnya perhatian pada pentingnya bentuk-bentuknya keorganisasian (*organization forms)* dan lapangan organisasi (*organization fields*)(Scott, 2008).

Ditinjau dari pendekatan Teori Kelembagaan Baru, organisasi petani dalam bentuk formal semata-mata hanyalah pilihan. Karena untuk melihat berkembangnya kelompok tani, dengan aktivitas agribisnis di dalamnya, yang dibutuhkan adalah pengorganisasian petani (dalam makna luas) yang efektif. Indikator dari tumbuh kembangnya agribisnis yang dikelola petani secara efektif dan efisien adalah adanya transaksi yang dijalankan dengan biaya murah, dan tersedia jaringan antar pelaku dengan bentuk terpola sehingga dapat menjadi wadah yang dapat diakses petani dengan mudah.

Menghimpun petani dalam sebuah organisasi yang terorganisir diperlukan adanya struktur yang jelas. Struktur yang terbentuk tersebut harus dapat memobilisasi agar tindakan kolektif berjalan. Hakekatnya pengorganisasian petani adalah upaya untuk menjalankan tindakan kolektif, dengan keyakinan bahwa tindakan kolekif lebih murah dan efektif. Mewujudkan tindakan kolektif bagi komunitas dalam kontek ini adalah petani yang diwadahi oleh kelompok tani, dibutuhkan daya kohesi, relasi sosial yang stabil, adanya hierarki, dan saling percaya dalam relasi yang saling tergantung (Beard dan Dasgupta, 2006). Ditambahkan oleh King (2008), agar tindakan kolektif berjalan, maka harus dapat ditemukan cara dan strategi untuk memotivasi individu agar mau melibatkan diri.

Kelompok tani atau Gapoktan merupakan salah satu wadah dalam menjalankan tindakan kolektif petani. Tanpa organisasi sekalipun, tindakan kolektif masih dapat

dijalankan (Davis Peter*, at.al*. 2009). Selama ini penumbuhkembangan kelompok tani maupun gapoktan masih menghadapi banyak kendala, baik dari dalam maupun dari luar kelompok yang menyebabkan gagal dijalankannya organisasi-organisasi formal petani tersebut. Penyebabnya adalah karena petani-petani telah memiliki berbagai relasi sebagai sandaran untuk menjalankan berbagai tindakan kolektif, dimana relasi-relasi tersebut berada di luar organisasi-organisasi formal. Para petani enggan berorgansiasi karena kompensasi yang diterima tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan yang mereka peroleh (Hellin *et al.* 2007). Perilaku demikian didasari oleh seperangkat rasionalitas tersendiri.

Karakteristik rasionalitas petani yang hidup di alam pra industri menurut Scott (1998) dan hidup di garis batas subsistensi, adalah norma mendahulukan selamat dan enggan mengambil resiko. Namun, menurut Popkin (1979) petani pada hakekatnya ingin meningkatkan ekonominya dan berani mengambil resiko. Hubungan patron klien yang dilihat Scott (1993) sebagai melindungi yang lemah, bagi Popkin (1979) adalah suatu hubungan eksploitasi. Hayami dan Kikuchi (1987) menerima pendekatan moral ekonomik Scott maupun *petani rasional* Popkin, dan merumuskan apa yang disebutnya ”rasional ala petani”. Pandangan ini senada dengan Boeke (1974) bahwa perkembangan masyarakat lebih bersifat sosial daripada ekonomi. Banyak petani sesungguhnya terlibat dalam ekonomi subsisten sekaligus dengan ekonomi kapitalis; maka mereka tentu menetapkan prinsip rasional.

Petani mempunyai rasionalitas sendiri tentang kebutuhan dan kepentingannya yang secara reflektif dimunculkan dalam tindakan-tindakan individual mereka (Taufiq, 2007). Berlangsungnya penghimpunan beberapa tindakan individual ini untuk menjadi tindakan kolektif, diperlukan kondisi tertentu di mana petani merasa perlu mengalokasikan sumberdayanya untuk kepentingan bersama. Penumbuhkembangan kelompok tani merupakan proses panjang pengelolaan kesadaran dan kepentingan petani dalam membangun kelompok sebagai basis kekuatan.

Penelitian Grootaert (2001) membuktikan bahwa terlibat dalam organisasi formal memberikan beberapa keuntungan. Pada hakekatnya, salah satu alasan membangun organisasi, atau institusi dalam bentuk lembut (*soft)*, adalah untuk menghindari kegagalan kolaborasi atau kerjasama yang sudah disepakati (Gottward, 2003). Petani memiliki alasan sendiri apakah ia akan menjalankan usahanya dalam kelompok atau tidak. Petani membandingkan antara kompensasi yang diperolehnya jika terlibat dalam organisasi formal dengan pengorbanan yang harus diberikannya. Jika tambahan pendapatan yang diperoleh tidak sebanding, mereka cenderung enggan terlibat (Badstue *et al.,* 2006). Untuk menjalankan tindakan kolektif, karakter demografi dan karaktersosial ekonomi anggota yang homogen terbukti memberi pengaruh lebih baik (Grootaert, 2001).

Sudut pandang lain berasal dari studi Sunito S. dan Saharuddin (2001) menemukan kecenderungan bahwa beberapa faktor internal yang mempengaruhi petani untuk terlibat dalam organisasi adalah: homogenitas anggota organisasi, motivasi pembentukan organisasi, dan basis ikatan horizontal antar petani. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan organisasi petani adalah: historik relasi dengan pihak luar, serta bentuk dan tingkat intervansi pihak luar terhadap organisasi petani. Sehingga bagi petani berorganisasi secara formal hanya merupakan salah satu opsi yang dapat dipilih petani dalam menjalankan usaha agribisnisnya. Menurut Badstue *et al.,I* (2006) kuncinya adalah pada keuntungan apa yang ditawarkan dan dapat secara secara riil diperoleh petani. Dibutuhkan insentif yang jelas sehingga petani mau berkerjasama dan berpartisipasi secara penuh.

Sementara, menurut Simmons (2002) ada empat area strategis yang menjadi pertimbangan petani terlibat dalam berorganisasi, yakni: (1) apakah mereka dapat mengakses ke pasar karena sebelumnya mereka menghadapi biaya transaksi yang tinggi, (2) apakah mereka dapat mengakses kredit dengan bunga yang tidak mahal, (3) apakah mereka disediakan berbagai pelayanan untuk memperbaiki manajemen resiko di sektor hulu, dan (4) apakah mereka disediakan informasi, penyuluhan serta dukungan logistik sehingga biaya transaksi yang lebih rendah dapat mereka

raih. Kualitas relasi merupakan kunci yang penting. Keberhasilan pertanian kontrak tergantung kepada bagaimana kualitas relasi sebelum terbentuk kelompok *(pre-existing groups)*, tingkat demokratisasi yang dijalankan, serta kejelasan perjanjian antar pihak. Timbulnya berbagai konflik menimbulkan kesan buruk bagi petani kecil, yang akan menyebabkan mereka mengurangi keterlibatannya. Petani mau terlibat karena yakin dengan berbagai keuntungan langsung maupun tidak langsung. Berbagai keuntungan tidak langsung adalah memberdayakan kalangan perempuan, mampu mengembangkan kultur komersial dimana petani belajar bernegosisasi, paham dalam pergudangan, dan berkomunikasi dengan pihak-pihak luar.

Berdasarkan gambaran teori kelembagaan baru, konsep pengembangan keorganisasian petani setidaknya perlu memperhatikan lima prinsip berikut;

Satu, pemerintah mesti mempertimbangkan bahwa organisasi formal bagi petani hanyalah sebuah opsi, bukan keharusan yang mutlak. Pembentukan organisasi formal membutuhkan upaya yang panjang, sementara petani pada hakekatnya dapat menjalankan usahanya secara efisien dalam relasi pasar yang tidak formal.

Dua, pengembangan organisasi tidak lagi terikat pada egosubsektor dan keproyekan, sehingga tidak harus satu kegiatan diwadahi dalam satu organisasi tersendiri. Secara konseptual, seluruh petani cukup diwadahi oleh beberapa kelompok tani (sebagai *individual organization*) dan sebuah Gapoktan (sebagai *interorganizational group*). Kedua organisasi ini dapat menjalankan seluruh aktivitas agribisnis (bersifat *multipurpose*) mulai dari penyediaan saprodi, kredit, sampai dengan pengolahan dan pemasaran. Gapoktan pada prinsipnya adalah juga organisasi petani yang berwatak persis seperti koperasi.

Tiga, organisasi hanyalah alat, bukan tujuan. Dengan demikian, jumlah kelompok tani dan Gapoktan bukan lagi indikator pembangunan pertanian di satu wilayah. Indikator semestinya adalah seberapa efisien seluruh aktivitas agribisnis telah dapat dijalankan petani.

Empat, petani sepantasnya dihargai sebagai individu yang rasional. Pemerintah harus meyakini bahwa mereka dapat dan mampu memutuskan apa yang baik bagi dirinya, termasuk dalam berorganisasi. Norma hidup berkelompok yang hidup dalam satu masyarakat tidaklah sama. Penyuluhan tentang kehidupan berorganisasi yang diberikan PPL misalnya, mestinya hanyalah sebatas pengetahuan untuk membuka wawasan petani.

Lima, bentuk keorganisasian yang ditawarkan ke petani sebaiknya adalah yang mampu memperkuat relasi vertikal petani dengan pelaku pertanian lain. Pembentukan kelompok tani belum memadai, karena masih sebatas relasi horizontal. Sebagai contoh, studi Simmons (2002) menemukan bahwa petani mau terlibat dalam organisasi (dalam kasus pertanian kontrak) adalah karena adanya akses ke pasar, selain karena dapat meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya, dan memperkecil resiko berusaha.

Pemahaman pengembangan kelembagaan berdasarkan konsep kelembagaan baru telah dijelaskan sebelumnya. Pada prakteknya penerapan konsep yang akan dijadikan sebagai landasan untuk dilaksanakan di sebuah pengembangan kelembagaan perlu dibarengi oleh suatu pendekatan/perspektif. Pada pembahasan ini akan diperkenalkan tiga pendekatan untuk mempraktekkan *community development* atau pengembangan kelembagaan yaitu : 1) Pendekatan Bantuan Teknis/*Technical Assistance*, 2) Pendekatan Pemandirian/*Self-Help*, dan 3) Pendekatan Konflik/*Conflict* (Christenson dan Robinson; 1999 *dalam* Salman D. 2009).

Ketiga pendekatan ini juga dapat dipilih dan ditetapkan sebagai alternatif dalam pengembangan kelembagaan petani. Pendekatan tersebut terdiri dari :

a. Pendekatan Bantuan Teknis (*Technical Assistance*)

Pendekatan ini mengasumsikan komunitas (kelompok tani) sebagai sebuah sistem yang kompleks dengan struktur yang fungsional dan dikelola oleh figur otoritas yang legitimatif. Perubahan tidak dimaksudkan untuk mengubah struktur dan otoritas tersebut, tetapi hanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dari struktur.

Pendekatan ini mempercayai bahwa ilmu pengetahuan mampu menyediakan sarana untuk memecahkan permasalahan/memenuhi kebutuhan, karena itu inti masalah yang ingin dipecahkan adalah bagaimana komunitas memiliki kapasitas untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam memecahkan permasalahan manusia, tetapi permasalahan tersebut lebih banyak pada hal-hal teknis.

Peranan seorang outsider/fasilitator dalam konteks ini adalah bagaimana menghantarkan kemampuan teknis. Bila kelompok tani memerlukan kemampuan untuk membangun irigasi atau dam, maka fasilitator harus berperan untuk menghantarkan kemampuan dimaksud, sekaligus mencarikan akses untuk sumberdaya fisiknya. Bila kelompok tani memerlukan kapasitas untuk mengoperasikan traktor atau mesin pompa, tugas fasilitator untuk melakukan pelatihan dalam peningkatan kapasitas tersebut.

b. Pendekatan Pemandirian (*Self-Help*)

Pendekatan ini mengasumsikan masyarakat (kelompok tani) sebagai unit mekanik dan kohesif, yang di dalamnya tercampurkan individu yang memiliki kemampuan dengan yang tidak memiliki kemampuan. Perubahan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dari komunitas (anggota kelompok tani) melalui konsolidasi struktur dan kesadaran-kesadaran kritis.

Pendekatan ini mempercayai bahwa anggota kelompok mempunyai hak dan kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan/ memenuhi kebutuhan secara kolektif. Artinya potensi kolektivitas dalam pemecahan masalah/ pemenuhan kebutuhan selalu terdapat dalam kelompok tani, masalahnya adalah bagaimana mengkonsolidasikan dan mendorong kapasitas anggota kelompok tani untuk mengambil aksi kolektif.

Peranan seorang fasilitator/outsider dalam pendekatan ini adalah bagaimana menanamkan kesadaran kritis tentang pentingnya aksi kolektif dalam memecahkan masalah. Selain itu, fasilitator juga berperan dalam pengorganisasian anggota kelompok tani (*community organizing*), karena dengan organisasi itulah mereka memiliki wadah untuk mengkonsolidasi diri dan sumberdaya dalam menggalang aksi kolektif.

c. Pendekatan Konflik (*Conflict*)

Pendekatan konflik membayangkan masyarakat berisi kelompok-kelompok yang secara kontinyu berjuang untuk memelihara atau menambah basis kekuatan/ kekuasaan mereka. Individu dibayangkan sebagai diri yang malang, yang terhimpit dan tertindas. Karena itu, perubahan dimaksudkan untuk mengubah struktur agar kekuasaan tidak berada di tangan satu pihak saja.

Pendekatan ini berasumsi bahwa kekuasaan adalah hal paling mendasar dari semua sumberdaya. Upaya tiap orang adalah bagaimana merebut kekuasaan. Bagi paradigma ini, masalah yang perlu dipecahkan adalah konsentrasi kekuasaan yang hanya berada pada beberapa orang saja. Tujuan dari *community development* adalah terjadinya pembagian kembali kekuasan (*redistribution of power*).

Peranan seorang fasilitator dalam pendekatan konflik adalah menanamkan kesadaran kritis tentang ketimpangan kekuasaan yang menyebabkan limitasi dalam akses sumberdaya. Selain itu, fasilitator juga harus mendampingi pertentangan yang berlangsung agar tidak meledak menjadi konflik besar yang mendorong disintegrasi komunitas.

C. RANGKUMAN

Penggunaan istilah dan konsep ”lembaga” adalah terjemahan langsung dari *”institution”*, dan organisasi adalah terjemahan langsung dari *”organization”*. Keduanya merupakan kata benda. Sementara ”kelembagaan” adalah terjemahan dari ”*institutional”*, yang bermakna sebagai ”berbagai hal yang berhubungan dengan lembaga”.

Konsep umum mengenai lembaga meliputi apa yang ada pada tingkat lokal atau masyarakat, unit manajemen proyek, badan, parastatus, departemen-departemen di pemerintah maupun milik swasta. Kelembagaan lebih dipandang sebagai suatu manajemen dan keterkaitan antara sumber daya manusia, keuangan dan hubungan atau sistem kerja antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya.

Fungsi lembaga adalah menyediakan stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat, meskipun ia pun dapat berubah. Demikian pula untuk petani, lembaga memberikan pedoman bagi petani dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari khususnya dalam bidang agribisnis.

Berdasarkan Teori Kelembagaan Baru, organisasi petani dalam bentuk formal semata-mata hanyalah pilihan. Untuk berjalannya pembangunan pertanian, atau aktivitas agribisnis khususnya, yang dibutuhkan adalah pengorganisasian petani (dalam makna luas) yang efektif. Dengan demikian, pengembangan keorganisasian usaha petani setidaknya perlu memperhatikan lima prinsip berikut; 1) pemerintah mesti mempertimbangkan bahwa organisasi formal bagi petani hanyalah sebuah opsi, bukan keharusan yang mutlak, 2) pengembangan organisasi tidak lagi terikat pada egosubsektor dan keproyekan, sehingga tidak harus satu kegiatan diwadahi dalam satu organisasi tersendiri, 3) organisasi hanyalah alat, bukan tujuan, 4) petani sepantasnya dihargai sebagai individu yang rasional, dan 5) bentuk keorganisasian yang ditawarkan ke petani sebaiknya adalah yang mampu memperkuat relasi vertikal petani dengan pelaku pertanian lain.

Penerapan konsep pengembangan kelembagaan dapat ditinjau dari tiga aspek pendekatan/perspektif, sebagai berikut : 1) *Technical Assistance*; Pendekatan ini mempercayai bahwa ilmu pengetahuan mampu menyediakan sarana untuk memecahkan permasalahan/ memenuhi kebutuhan, 2) *Self Help*; Pendekatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dari komunitas melalui konsolidasi struktur dan kesadaran-kesadaran kritis atas setiap perubahan, dan 3) *Conflict*; Pendekatan ini berasumsi bahwa kekuasaan adalah hal paling mendasar dari semua sumberdaya. Upaya tiap orang adalah bagaimana merebut kekuasaan. Oleh karena itu, perubahan dimaksudkan untuk mengubah struktur agar kekuasaan tidak berada di tangan satu pihak saja.

D. SOAL LATIHAN

Untuk mengukur kemampuan Anda dalam memahami dan menguasai materi ajar pada bab ini, kerjakan soal-soal berikut ini :

1. Menurut Permentan No. 67 tahun 2016, apakah yang dimaksud dengan kelembagaan petani dan cakupannya ?
2. Bagaimana membedakan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah lembaga, organisasi dan kelembagaan!
3. Berdasarkan paham kelembagaan baru, jelaskan yang dimaksud dengan lembaga dan aspek-aspeknya!
4. Jelaskan bagaimana pemahaman Anda mengenai organisasi
5. Jelaskan pengertian kelembagaan berdasarkan berbagai bidang keilmuan!
6. Berikan gambaran perbedaan antara organisasi dan kelembagaan!
7. Sebutkan dan jelaskan unsur penting dari kelembagaan!
8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hakekat pengorganisasian petani adalah upaya untuk menjalankan tindakan kolektif!
9. Jelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi pengembangan organisasi petani!
10. Bagaimana petani mempertimbangkan untuk terlibat dalam keorganisasian!
11. Jelaskan lima prinsip dalam konsep pengembangan kelembagaan petani!
12. Sebutkan dan jelaskan pendekatan/perspektif dalam pengembangan kelembagaan!

E. TUGAS PRAKTIKUM

Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan dengan menggunakan Model Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem Based Learning*). Topik pada latihan ini adalah “Konsep Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan POKTAN atau GAPOKTAN”.

Tahapan pelaksanaan latihan, sebagai berikut :

1. Mengorientasikan Mahasiswa Pada Masalah

   Dosen menjelaskan dengan rinci apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan dijelaskan bagaimana Dosen akan mengevaluasi proses pembelajaran.

Empat hal yang perlu mahasiswa pahami dan menjadi dasar dalam melakukan proses pembelajaran ini, sebagai berikut :

a. Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru, tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan bagaimana menjadi mahasiswa yang mandiri.

b. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak "benar", sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian dan seringkali bertentangan.

c. Selama tahap penyelidikan, mahasiswa didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi.

d. Selama tahap analisis dan penjelasan, mahasiswa akan didorong untuk menyatakan ide-idenya secara terbuka dan penuh kebebasan.

2. Mengorganisasikan Mahasiswa Untuk Belajar

a. Pembelajaran PBL dimulai dengan membentuk kelompok-kelompok mahasiswa. Masing-masing kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Pada tahap ini mahasiswa harus belajar berkolaborasi karena pemecahan suatu masalah sangat membutuhkan kerjasama dan *sharing* antar anggota kelompok.

b. Setiap kelompok yang telah terbentuk dihadapkan pada satu kasus, yaitu; berupa Profil POKTAN atau Profil GAPOKTAN untuk ditelaah, dipilih dan ditetapkan konsep pengembangan kelembagaan yang paling sesuai untuk diterapkan pada POKTAN atau GAPOKTAN tersebut.

c. Konsep yang harus dipilih adalah menentukan salah satu pilihan pendekatan/perspektif dari 3 pilihan pendekatan pengembangan kelembagaan yaitu : 1) Technical Assistance, 2) Self Help, dan 3) Conflict.

3. Melakukan Penyelidikan Kelompok

a. Pada tahap ini mahasiswa melakukan penyelidikan untuk kasus yang telah diberikan.

b. Penelaahan data pada kasus dan visualisasi data dalam berbagai bentuk.

c. Mahasiswa melakukan eksperimen sampai betul-betul memahami dimensi situasi permasalahan.

d. Mahasiswa mengorganisir informasi dan permasalahan yang ditemui agar dapat menciptakan dan membangun ide. Ide yang dimaksud adalah membangun konsep pengembangan kelembagaan yang utuh dan komprehensif.

4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya dan Mempamerkannya

a. Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan hasil karya. Hasil karya lebih dari sekedar laporan tertulis, tentunya kualitasnya sangat dipengaruhi tingkat berpikir mahasiswa.

b. Langkah selanjutnya adalah mempamerkan hasil karyanya dalam berbagai bentuk, disesuaikan dengan hasil karya kelompok masing-masing mahasiswa.

c. Unjuk karya harus melibatkan mahasiswa lainnya, dosen-dosen, dan asisten dosen pengampu mata kuliah yang dapat menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik.

5. Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah

a. Fase ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa secara mandiri menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka gunakan.

b. Selama fase ini dosen meminta mahasiswa untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajarnya.

c. Hasilnya dilaporkan dalam bentuk makalah, artikel atau laporan mandiri sebagai bukti bahwa mahasiswa telah menguasai kompetensi memilih dan menetapkan konsep pengembangan kelembagaan.

F. SUMBER INFORMASI DAN REFERENSI

Syahyuti. *Rekonseptualisasi Lembaga dan Organisasi untuk Teori dan Praktek Penyuluhan Pertanian Yang Lebih Efektif*. Makalah Pertemuan Nasional Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Indonesia, di Universitas Padjajaran tanggal 25-26 Januari 2012.

Norman Uphoff. Local Institutions and Participation for Sustainable Development. Gatekeeper Series SA31. IIED, London. 1992.

Norman Uphoff. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases. Kumarian Press, Cornell University, USA. 1986.

Richard W. Scott. Institutions and Organizations: Ideas an Interest. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage Publication. Third Edition. 266 hal. 2008.

Richard W. Scott. Institutions and OrganizationsFoundations for Organizational Science**:** Foundations for Organizational Science. A Sage Publications Series. Sage Publications, Inc. 1995.

Walter W. Powell, Paul J. DiMaggio. The New Institutionalism in Organizational Analysis. University of Chicago Press, Oct 25, 1991.

Victor Nee. The New Institutionalism in Economics and Sociology. Dalam: *The Handbook of Economic Sociology*. 2nd ed. Niel J. Smelser dan Richard Swedberg (eds.) Princeton University Press. 2005.

Beard, Victoria A. and Aniruddha Dasgupta. Collective Action and Community-driven Development in Rural and Urban Indonesia. Urban Studies, Vol. 43, No. 9, 1451–1468, August 2006. Sage Publication and Urban Studies Journal Limited.

Brayden King. A Social Movement Perspective of Stakeholder Collective Action and Influence. Sage Publication and International Association for Business and Society.http://bas.sagepub.com. 2008.

Peter Davis. Everyday Forms of Collective Action in Bangladesh: Learning from Fifteen Cases. CAPRi Working Paper No. 94. International Food Policy Research Institute: Washington,DC. 2009.

Jon Hellin, Mark Lundy; and Madelon Meijer. Farmer Organization, Collective Action and Market Access in Meso-America. Capri Working Paper No. 67 • October 2007. Research Workshop on Collective Action and Market Access for Smallholders. October 2-5, 2006 - Cali, Colombia. International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington. 2007.

Hayami dan Kikuchi. *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*, Editor: Gunawan Wiradi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1987.

Taufik Tanasaldy. Politik Identitas Etnis Di Kalimantan Barat, Politik Local Di Indonesia, KITLV-Jakarta, pp. 461-490. 2007.

Christiaan Grootaert. Does Social Capital Help the Poor?: A Synthesis of Findings from the Local Level Institutions Studies in Bolivia, Burkina Faso and Indonesia. The World Bank: Social Development Family Environmentally and Socially Sustainable Development Network. Local Level Institutions Working Paper No. 10, June 2001.

Jochen Gottwald. Is rational choice the best choice for understanding the peasant?: A constructivist reading of the Rational Choice Controversy. 2003.

Lone B Badstue. Mauricio R. Bellon; Julien Berthaud; Xo chitl Juarez; Irma Manuel Rosas; Ana Marıa Solano; and Alejandro Ramırez. 2006. ”Examining the Role of Collective Action in an Informal Seed System: A Case Study from the CentralValleysof Oaxaca, Mexico”. Human Ecology, Vol. 34, No. 2, April 2006.

Satyawan Sunito dan Saharuddin. 2001. Farmer Organizations in Upland Natural Resource Management in Indonesia. Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 29. This report is part of the ASB Project in Indonesia. The Asian Development Bank, under RETA 5711, financially supported this specific work.

Phil Simmons, 2002. Overview of Smallholder Contract Farming in Developing Countries. ESA Working Paper No. 02-04. Agricultural and Development Economics Division The Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Jose R Molinas, Who Cooperates?: A Study of Membership in Peasant Cooperatives. Instituto Desarrollo. Asunción, Paraguay. 2005. Paper prepared for the XXI International Congress of the Latin American Studies Association, Chicago, IL, September 24-26, 1998. Universidad Católica Asunción, Paraguay e-mail: jmolinas@infonet.com.py.

Arturo Israel. Institutional Development; Incentives To Performance. Published for the World Bank by Johns Hopkins University Press, London, 1987,214 pp.

Darmawan Salman. Kerangka Community Development Untuk Pengelolaan Social Forestry. Web Percik Pemikiran. Post : 10 Mei 2009. http://darmawansalman.blogspot.co.id/2009/05/kerangka-community-development-untuk.html.

Satyawan Sunito dan Saharuddin. Farmer Organizations in Upland Natural Resource Management in Indonesia. Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 29. This report is part of the ASB Project in Indonesia. The Asian Development Bank, under RETA 5711, financially supported this specific work. Tahun 2001.

BAB IV.

MODEL KELEMBAGAAN PETANI

A. PENGANTAR MATERI

1. Deskripsi Singkat

Bab IV ini memberikan informasi gambaran tentang ruang lingkup model-model kelembagaan petani serta membekali mahasiswa untuk menguasai kompetensi dalam mengidentifikasi, mempertunjukkan, mengargumentasikan : 1) tinjauan umum model kelembagaan pertanian, 2) rancangan model kelembagaan, 3) kelompok tani, 4) gabungan kelompok tani (gapoktan), 5) kelembagaan ekonomi petani yang meliputi; kemitraan bermediasi, kelembagaan klinik agribisnis, Badan Usaha Milik Petani (BUMP), koperasi petani dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), dan 6) asosisasi komoditas pertanian.

2. Manfaat Pembelajaran

Fungsi pembelajaran adalah agar tercapainya tujuan belajar, yaitu terjadinya perubahan dalam diri seseorang ke arah yang positif dan terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.

Setelah mahasiswa melalui proses pembelajaran pada bab ini diharapkan dapat membentuk kemampuan intelektual, berfikir kritis dan munculnya kreatifitas serta perubahan perilaku atau pribadinya berdasarkan praktik atau pengalaman belajar tentang model-model kelembagaan petani.

3. Capaian Pembelajaran (CP Sub Mata Kuliah/Materi Pokok Bahasan)

Mahasiswa memiliki kompetensi dalam mengetahui, memahami, mempertunjukkan serta menjelaskan tentang : 1) tinjauan umum model kelembagaan pertanian, 2) rancangan model kelembagaan, 3) kelompok tani, 4) gabungan kelompok tani (gapoktan), 5) kelembagaan ekonomi petani yang meliputi, kemitraan bermediasi, kelembagaan klinik agribisnis, badan usaha milik petani, koperasi petani dan lembaga keuangan mikro agribisnis, dan 6) asosisasi komoditas pertanian. Sebagai

dasar untuk menumbuhkan berbagai alternatif dalam kelembagaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat tani.

4. Metode Pembelajaran

Untuk mahasiswa dapat memiliki kompetensi pada sub pokok bahasan ini metode yang digunakan terdapat berapa yang dapat diterapkan :

a. Discovery Learning yaitu mencari dan mengumpulkan informasi deskripsi pengetahuan tentang model kelembagaan.
b. Contextual Instruction yaitu membahas teori kaitannya situasi nyata dan melakukan studi lapang/terjun di dunia nyata.
c. Cooperative learning yaitu membahas masalah model kelembagaan petani secara berkelompok.
d. Small Group Discussion yaitu Membentuk kelompok kecil, memilih bahan sub pokok bahasan, diskusi dan presentasi.

B. MATERI PEMBELAJARAN

1. Tinjauan Umum Model Kelembagaan Pertanian

Selama ini kelembagaan perekonomian perdesaan dinilai oleh banyak ahli sangat rapuh dan dipandang sebagai penyebab kegagalan pengembangan perekonomian di perdesaan. Kerapuhan tersebut ditunjukkan oleh tidak efektifnya pemberdayaan faktor kepemimpinan (sebagai penggerak kemajuan) di perdesaan, tidak terbangunnya tata nilai yang menggerakkan kemajuan ekonomi di perdesaan, struktur dan keorganisasian ekonomi perdesaan yang dibiarkan rapuh, otonomi yang tidak mengangkat kedaulatan (politik) masyarakat perdesaan dalam kegiatan ekonomi serta dibiarkannya faktor kompetensi sumberdaya manusia perdesaan terbengkalai (Pranadji, 2003).

Menurut Hermanto dan Subowo (2006), secara empiris model kelembagaan pertanian yang terdapat di perdesaan dibedakan, antara lain: 1) kelembagaan sosial nonbisnis yang merupakan lembaga pertanian yang mendukung penciptaan teknologi, penyampaian teknologi, penggunaan teknologi dan

pengerahan partisipasi masyarakat, seperti lembaga penelitian, penyuluhan, kelompok tani dan sebagainya, dan 2) lembaga bisnis penunjang yang merupakan lembaga yang bertujuan mencari keuntungan, seperti koperasi, usaha perorangan, usaha jasa keuangan dan sebagainya.

2. Rancangan Model Kelembagaan

Berbagai bentuk kelembagaan ekonomi petani telah banyak ditumbuh-kembangkan di perdesaan. Namun, eksistensi dan kinerjanya masih kurang menggembirakan, bahkan keberadaannya dalam menopang perekonomian di perdesaan cenderung tidak berkesinambungan. Hal ini karena kebanyakan kelembagaan yang ditumbuhkan tersebut lebih bersifat "*top down*" dan bahkan cenderung mengeneralisasikan suatu bentuk kelembagaan untuk diintroduksikan tanpa memperhatikan struktur sosial dan kebutuhan masyarakat setempat. Akibatnya banyak kelembagaan baru yang masuk di perdesaan tidak memperoleh respon dan konsensus dari masyarakat. Oleh karena itu, introduksi kelembagaan baru ke dalam masyarakat perlu menyesuaikan diri dengan bentuk-bentuk kelembagaan tradisional yang telah ada.

Rancangan model kelembagaan merupakan *framework* dari beberapa bentuk kelembagaan, yang pengembangannya dilakukan secara *bottom up* melalui pendekatan *Participatory Assessment and Planning Approach* (PAPA), yaitu pendekatan yang harus dimulai dari petani dan petani akan menentukan kelembagaannya yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungannya. Meskipun kenyataannya, masyarakat memiliki struktur sosial dan kebutuhan yang berbeda terhadap kelembagaan yang mengatur tata kehidupan di antara mereka, tetapi dengan adanya rancangan model kelembagaan, akan sangat membantu menentukan secara partisipatif kebutuhan dan pilihan kelembagaan yang dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat sebagai suatu upaya meningkatkan pendapatan mereka secara bertahap dan nyata dari tahun ke tahun.

Beberapa model pengembangan kelembagaan petani menurut Permentan No. 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani dapat dikelompokkan, antara

lain: 1) Kelembagaan Kelompok tani, 2) Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), 3) Kelembagaan Ekonomi Petani, 4) Asosiasi Komoditas Pertanian, dan 5) Dewan Komoditas Pertanian. Fungsi dan peran dari masing-masing kelembagaan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, saling menyatu dan saling terkait satu sama lain dalam kerangka sistem dan usaha agribisnis.

3. Kelompok Tani (Poktan)

Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Pemberdayaan Petani dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Kegiatan penyuluhan melalui pendekatan kelompok untuk mendorong terbentuknya Kelembagaan Petani yang mampu membangun sinergitas antar Petani dan antar Poktan dalam upaya mencapai efisiensi usaha. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kemampuan Poktan dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian, dengan melaksanakan penilaian Klasifikasi Kemampuan Poktan secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangannya.

Karakteristik Poktan

Poktan merupakan Kelembagaan Petani non formal dengan kriteria sebagai berikut:

a. Ciri Poktan

1) Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota.
2) Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani.
3) Memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, kawasan/hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi.

b. Unsur Pengikat Poktan

1) Kawasan Usaha tani yang menjadi tanggungjawab bersama di antara anggota.
2) Kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota.
3) Kader yang mampu menggerakkan Petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh anggota.
4) Pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama, dan
5) Motivasi dari tokoh masyarakat dalam menunjang program yang telah ditetapkan.

c. Fungsi Poktan

1) Kelas belajar: Poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi Usaha tani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik.
2) Wahana kerja sama: Poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam Poktan dan antar poktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan Usaha tani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan, dan
3) Unit produksi: Usaha tani masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

4. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Kelembagaan Petani ditumbuhkembangkan untuk memenuhi kelayakan usaha skala ekonomi dan efisiensi usaha, sehingga berfungsi sebagai unit usaha penyedia

sarana dan prasarana produksi, unit Usaha tani/produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro (simpan pinjam).

Pada tahap pengembangannya, Gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi, dan permodalan kepada anggotanya serta menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha dengan pihak lain. Penggabungan Poktan ke dalam Gapoktan, diharapkan akan menjadikan Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri serta berdaya saing.

Karakteristik Gapoktan

Gapoktan yang mampu mandiri dan berdaya saing, memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Ciri Gapoktan

a) Memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama.

b) melaksanakan pertemuan berkala dan berkesinambungan, antara lain rapat anggota dan rapat pengurus.

c) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Gapoktan sesuai dengan kesepakatan dan melakukan evaluasi secara partisipatif.

d) Memfasilitasi kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir.

e) Memfasilitasi Usaha tani secara komersial berorientasi agribisnis.

f) Melayani informasi dan teknologi bagi Usaha tani anggota Poktan yang bergabung dalam Gapoktan dan Petani lainnya.

g) Menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha antara Gapoktan dengan pihak lain.

h) Melakukan pemupukan modal usaha, baik melalui iuran anggota maupun dari penyisihan hasil usaha Gapoktan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

2) Unsur Pengikat Gapoktan

Unsur pengikat Gapoktan meliputi adanya:

a) Tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi Usaha tani.

b) Pengurus dan pengelola unit-unit usaha Gapoktan yang profesional untuk memajukan Usaha tani Gapoktan sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggota.

c) Pengembangan komoditas produk unggulan yang merupakan industri kegiatan pengembangan usaha melalui kerjasama kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar Gapoktan mulai dari sektor hulu sampai hilir.

d) Manfaat bagi Petani sekitar dengan memberikan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana produksi, modal, informasi, teknologi, pemasaran, dan lain-lain.

3) Fungsi Gapoktan

a) Unit Usaha Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi

Gapoktan sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi antara lain pupuk, benih bersertifikat, pestisida, alat mesin Pertanian, dan permodalan Usaha tani yang bersumber dari kredit/ permodalan Usaha tani maupun dari swadana Petani/sisa hasil usaha.

b) Unit Usaha tani/Produksi

Gapoktan memiliki unit usaha yang memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil.

c) Unit Usaha Pengolahan

Gapoktan dapat memberikan pelayanan, baik berupa penggunaan alat mesin Pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi komoditas, mencakup proses pengolahan, sortasi/*grading* dan pengepakan untuk meningkatkan nilai tambah produk.

d) Unit Usaha Pemasaran

Gapoktan dapat memberikan pelayanan/fasilitasi pemasaran hasil Pertanian anggotanya, baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan usaha

dengan pihak lain, maupun pemasaran langsung. Dalam pengembangannya, Gapoktan memberikan pelayanan informasi harga komoditas kepada anggotanya agar tumbuh dan berkembang menjadi Usaha tani mandiri.

e) Unit Usaha Keuangan Mikro (simpan-pinjam)

Gapoktan dapat memfasilitasi permodalan Usaha tani kepada anggota melalui kredit/permodalan Usaha tani maupun dari swadana Petani/sisa hasil usaha.

5. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)

a. Kemitraan Bermediasi

Di samping pengembangan kelembagaan Gapoktan juga diperlukan adanya pengembangan kelembagaan Kemitraan Bermediasi seperti yang telah dikembangkan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia dalam usaha membantu peningkatan pendapatan petani melalui pengembangan sistem pemasaran (Sumardjo et al., 2004 dalam Surip et al., 2006). Model kemitraan bermediasi atau disebut sebagai model MOTRAMED terdiri dari tiga lembaga yang bermitra, yaitu kelompok tani/Gapoktan, pengusaha besar/menengah, dan mediator. Petani dan pengusaha besar/menengah menyepakati produk yang dinegosiasikan hanya yang memenuhi syarat (jumlah dan mutu), dan sedapat mungkin diikat dalam perjanjian kerjasama secara tertulis (*contract farming*). Dalam hal ini, pengusaha besar/menengah diharapkan dapat memberikan jaminan harga minimal pembelian atau rumus harga tertentu yang disepakati pada saat menjelang musim panen. Selanjutnya, mediator merupakan suatu lembaga netral yang memiliki pengetahuan dan kompetensi terhadap obyek yang dimitrakan, serta dikenal dan dipercaya oleh kelompok tani dan pengusaha besar/menengah. Mediator bertugas membuat kajian tentang peluang untuk membangun kemitraan, berusaha meyakinkan dan membangun kepercayaan kelompok tani/Gapoktan maupun pengusaha besar/menengah tentang pentingnya dan manfaat membangun kemitraan bisnis. Dari pengembangan kelembagaan Kemitraan tersebut dapat jadikan sebagai salah satu sarana pengembangan agribisnis industrial di perdesaan melalui sub-

sistem pengolahan dan pemasaran sehingga peningkatan nilai tambah kepada petani secara optimal dan berkesinambungan dapat diwujudkan. Hal ini berimplikasi bahwa diperlukan adanya dukungan dari kelembagaan keuangan mikro terutama untuk mendukung secara finansial kebutuhan inovasi yang dikembangkan dalam kemitraan tersebut.

b. Kelembagaan Klinik Agribisnis

Kelembagaan klinik agribisnis merupakan terobosan inovasi kelembagaan yang dikembangkan dalam implementasi Prima Tani. Kehadiran klinik agribisnis di tingkat perdesaan tidak ditujukan untuk mengisi kefakuman aspek pelayanan bidang pertanian di perdesaan pasca program intensifikasi melalui sistem Bimas, tetapi lebih ditujukan kepada pemberdayaan masyarakat petani (*self empowerment*) serta memberikan "*room to manuver*" (ruang untuk bergerak) didalam menghadapi tantangan globalisasi dan demokrasi serta menumbuhkan dan meningkatkan kapabilitas petani dalam menghadapi persoalan usaha taninya. Dengan demikian pada awal pembentukan klinik agribisnis, hendaknya perlu ditetapkan ciri-ciri klinik agribisnis yang akan dikembangkan.

Klinik agribisnis seyogianya dibangun dengan bekerjasama dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan bila memungkinkan klinik tersebut idealnya ditempatkan di BPP. Hal ini dapat memposisikan klinik agribisnis di perdesaan menjadi salah satu sarana pusat pelayanan informasi untuk pengembangan agribisnis di perdesaan. Disamping itu, peningkatan eksistensi dan kinerja klinik agribisnis juga perlu dirancang/desain dalam rangka meningkatkan daya sosial yang tinggi terhadap inovasi teknologi. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan demplot hasil temuan paket teknologi yang sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah.

Demplot tersebut, di samping sebagai prototype penerapan teknologi spesifik lokasi dan bila dikelola dalam skala yang relatif luas juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan (income generating) dari klinik tersebut dalam menjalankan fungsinya. Untuk mewujudkan berbagai kegiatan demplot di

klinik agribisnis, dukungan finansial dari kelembagaan keuangan mikro sangat diperlukan. Di samping itu, peran lembaga penyuluh, lembaga penelitian dan Gapoktan dalam mendesain berbagai kegiatan demplot juga sangat menentukan keberhasilan pengembangan klinik agribisnis. Dengan demikian, klinik agribisnis yang dibentuk tidak saja sebagai pusat informasi agribisnis dan wadah "collective learning" di dalam menemukan solusi bagi persoalan usaha taninya, tetapi juga sebagai proses "social learning" di wilayah perdesaan untuk merancang sistem kehidupan yang lebih baik.

c. Badan Usaha Milik Petani (BUMP)

Mardikanto T. (2009) memberikan pengeritian untuk Badan usaha Milik Petani (BUMP) yaitu sebagai Badan Usaha yang dibentuk, dimiliki, dan dikelola oleh petani, dengan tujuan untuk memperbaiki mutu budidaya dan pengelolaan usaha tani demi terwujudnya peningkatan produktivitas, nilai-tambah produk, dan perbaikan pendapatan usaha tani, perbaikan daya-tawar dan kemampuan membangun kemitraan yang sinergis, yang maju, inovatif, dan berkelanjutan.

Esensi pengembangan BUMP tersebut, mencakup:

1) BUMP dibentuk oleh inisiatip (wakil) petani untuk membangun kelembagaan petani yang benar-benar mampu melayani kebutuhan petani di semua sub-sistem kegiatan agrobisnis.
2) BUMP dimiliki oleh petani, wakil (yang diberi mandat) oleh kelompok-tani/ Gapoktan, dan atau pribadi-pribadi yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan atau komitmen untuk melakukan pemberdayaan (masyarakat) petani
3) Lingkup kegiatan BUMP pada awalnya terpusat pada semua bentuk layanan kepada petani, pada keseluruhan sub-sistem kegiatan agro-bisnis.
4) Pada tahapan lebih lanjut, BUMP akan memperluas lingkup kegiatannya pada semua layanan pengembangan ekonomi perdesaan.
5) BUMP dikelola oleh pemilik/pemegang saham dan tenaga-tenaga professional yang dipilih dan ditetapkan oleh pemilik/pemegang saham.

6) BUMP merupakan lembaga yang mandiri, bebas dari campur-tangan kepentingan (oknum aparat) pemerintah.

Meskipun demikian, seperti halnya dengan Badan Usaha pada umumnya, BUMP selalu tunduk pada kebijakan pemerintah, utamanya kebijakan pembangunan pertanian dan kebijakan pembangunan ekonomi perdesaan.

Pemikiran tentang pengembangan BUMP, untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Agus Pakpahan (BRI, 2007) yang terinspirasi dari pembelian *Crystal Sugar Company* oleh sekitar 1.500 petani di Amerika pada 1973, dan sekarang telah berkembang menjadi eksportir gula-bit terbesar. Sedang pengembangan BUMP PT. Gapoktan Facilitator Sejahtera di Sukoharjo, berangkat dari keinginan FACILITATOR yaitu Himpunan Mahasiswa Program Doktor Pemberdayaan Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret di Surakarta (UNS-Solo) untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai media penerapan ilmu-ilmu yang dperolehnya di bangku kuliah.

Secara konseptual, Pakpahan mengemukakan bahwa BUMP merupakan sarana Gotong Royong Modern yang dikembangkan dari gagasan Bung Hatta yang mengembangkan koperasi di Indonesia. Melalui BUMP, diyakini petani akan lebih cepat mencapai kemajuan apabila petani membangun BUMP-nya itu bersinergi dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta (BUMS). Dengan sudut pandang sinergis, BUMP dapat menjadi mitra dunia usaha yang tertarik untuk bekerjasama dengan petani. Karena itu, BUMP petani perlu memperkuat dan membangun organisasi ekonominya yang andal dan terpercaya. Badan Usaha yang lain (BUMN dan Swasta) pun perlu mampu mentransformasikan dirinya agar bisa bermitra dengan petani (BUMP) apabila mereka ingin mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Bahkan, BUMN atau BUMS yang menanamkan ”modalnya” dalam pengembangan organisasi ekonomi petani (BUMP) akan memetik hasilnya dalam bentuk keuntungan yang besar di kemudian hari.

Bentuk usaha BUMP yang pada intinya merupakan badan usaha yang dimiliki dapat memilih bentuk usaga (Badan Hukum) yang luas. Apakah berbentuk koperasi

atau perseroan terbatas (PT) merupakan hal lain yang tidak dapat dipaksakan, tergantung pada keinginan para petani. Yang perlu diingat adalah kelemahan dan kelebihannya dari dua struktur badan usaha yang berbeda tersebut. BUMP dapat dikembangkan sebagai hibrida perseroan dan koperasi.

Yang dimaksud adalah semangatnya koperasi tetapi wujudnya PT. Semangat koperasi ini dengan sendirinya akan terwujud melalui struktur kepemilikan perseroan yang melibatkan ribuan orang petani dan sifatnya terbuka. Dengan model ini maka BUMP memiliki kapasitas untuk *meleverage* modal sehingga kapasitasnya bisa meningkat hingga 3-5 kalinya. Selanjutnya, dengan modal yang bisa diperoleh dari perbankan atau dari pasar modal, maka kapasitas BUMP bisa cukup kuat untuk meningkatkan nilai tambah dan melakukan adu tawar yang kuat dengan pihak mitra bisnisnya. Tentang hal ini, pembentukan BUMP dilandasi pemikiran bahwa, apapun bentuk usaha yang dimiliki oleh petani (maupun pengusaha mikro dan kecil lainnya), hanya akan bisa berkembang jika mampu menjalin kemitraan yang sinergis dengan pelaku usaha lain yang lebih besar, baik yang berupa BUMN/ BUMD maupun Swasta.

d. Koperasi Tani

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Berdasarkan keanggotaannya, Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang (perorangan/individu). Sedangkan Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Tujuan berkoperasi untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan (Undang Undang Nomor. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian).

Manfaat Koperasi

Manfaat koperasi bagi anggotanya antara lain: 1) Sebagai tempat menyimpan dan meminjam uang dengan cepat serta persyaratan yang mudah, 2) Tempat pemasaran produk hasil pertanian dari anggota dengan harga yang layak, sehingga menguntungkan, 3) Sebagai tempat membeli sarana produksi pertanian maupun kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan cepat dan harga yang relatif murah atau sama dengan harga pasar, 4) Mengatasi permasalahan ekonomi secara bersama-sama sehingga menjadi lebih ringan bila dibandingkan dengan membeli sendiri-sendiri, dan 5) Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota mengenai perkoperasian dan cara-cara berproduksi yang lebih maju melalui pelatihan, serta sebagai wadah belajar bersama. Sedangkan manfaat bagi kelembagaan Koperasi dapat memberikan kemudahan, antara lain: mendapat fasilitasi menjadi distributor sarana dan prasarana pertanian dan dapat meminjam modal usaha dari Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB).

Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi sebagai berikut:

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, artinya menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan dapat mengundurkan diri sesuai syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka artinya keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
2) Pengawasan dan pengelolaan dilakukan secara demokratis, maksudnya dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota.

Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi.
4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen.
5) Ada pembagian sisa hasil usaha (SHU), dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

6) Ada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, artinya tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

7) Kemandirian, maksudnya dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri.

8) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Dalam mengembangkan Koperasi, juga menerapkan prinsip lainnya, yaitu:

(1) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi, dan (2) kerja sama antar koperasi. Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Jenis-jenis Koperasi ditentukan berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Oleh karena itu dijumpai beberapa jenis koperasi, yaitu:

1) Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang memberikan kepercayaan pada Anggotanya dalam bentuk pinjaman uang.

2) Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari, agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang layak.

3) Koperasi Produsen adalah Koperasi yang anggotanya terdiri dari orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa. Orang tersebut adalah buruh, pedagang, pengusaha kecil dan menengah.

4) Koperasi Serba Usaha adalah Koperasi yang menjalankan usaha lebih dari satu macam usaha kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya.

5) Koperasi Jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.

Kelembagaan Petani diarahkan pada peningkatan kemampuan dan penguatan kelembagaan petani menjadi organisasi yang kuat dan mandiri dalam bentuk kelembagaan ekonomi petani.

Bentuk upaya pemberdayaan petani dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani salah satunya dilakukan melalui pembentukan koperasi petani. Pengembangan koperasi, sebenarnya telah dilaksanakan sejak lama, namun dalam pelaksanaannya seringkali terkendala oleh beberapa hal diantaranya:

1) Pelayanan koperasi kepada petani sebagai anggota belum memuaskan.
2) Permodalan koperasi masih sangat terbatas.
3) Kapasitas pengurus dalam mengelola koperasi belum memadai.
4) Cakupan usaha kegiatan koperasi masih terfokus pada kegiatan on-farm.
5) Kepercayaan masyarakat tani terhadap koperasi masih relatif rendah.

Sejalan dengan adanya perbaikan dan penyempurnaan terhadap program perkoperasian dan semakin berkembangnya usaha petani secara berkelompok, maka pengembangan kelembagaan petani melalui pembentukan koperasi digalakan kembali dengan tujuan:

1) Membangun kembali citra koperasi sebagai lembaga ekonomi milik petani.
2) Meningkatkan kapasitas manajerial bagi pengurus, pengawas, dan pembina koperasi.
3) Memfasilitasi pengembangan koperasi berbasis komoditas dengan pendekatan sistem agribisnis.
4) Meningkatkan sarana, prasarana, dan permodalan koperasi dalam bidang agribisnis.
5) Meningkatkan pelayanan koperasi melalui penerapan “one stop shopping” kepada petani dalam penyediaan sarana produksi, pembelian produk petani, dan penyediaan modal usaha.

e. Lembaga Keuangan Mikro Agribinis

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi usaha agribisnis berskala mikro di perdesaan. Lembaga ini merupakan pemberdayaan dari Gapoktan Penerima dana BLM PUAP dan atau salah satu unit usaha LKM-A yang berada didalam Gapoktan, LKM-A dibentuk dalam rangka memberikan solusi bagi petani agar dapat lebih mudah akses dan mendapatkan pelayanan keuangan dalam rangka meningkatkan usaha mereka.

Pemberdayaan LKM-A merupakan exit stategi dari program PUAP, karena mulai tahun 2016 program PUAP telah berakhir, oleh sebab itu sebagai tindak lanjut dari Program tersebut maka Penumbuhan LKM-A ini merupakan program berkesinambungan dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Sesuai dengan Undang Undang Nomor : 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, maka Pemberdayaan LKM-A akan dikembangkan sesuai dengan ke 2 (dua) Undang tersebut. Dimana dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu juga masih terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, juga untuk memberikan kepastian hukum.

Dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian termaktub bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemeintah dan seluruh rakyat. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan LKM-A ini sangat diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Komponen pendukung yang tidak kalah pentingnya adalah peran Pendampingan di lapangan yang dilaksanakan oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dalam rangka Pemberdayaan LKM-A. PMT berperan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan LKM-A dan antara lain membangun kapasitas organisasi, mendampingi dalam aspek manajemen keuangan, pengurusan badan hukum dan izin usaha dan sistem pelaporan serta linkage program dengan lambaga keuangan. Pengaturan pelayanan keuangan mikro/LKM-A dibutuhkan dalam rangka: 1) Melindungi kepentingan petani dan masyarakat tani yang meminjam dan menyimpan uang di LKM-A, 2) Sebagai azas legalitas dalam upaya melindungi operasionalisasi LKM-A, 3) Sebagai azas legalitas mengembangkan pola *linkages* (jejaring) usaha dengan lembaga keuangan lainnya, dan 4) Penguatan serta pengembangan usaha LKM-A.

f. Asosiasi Komoditas Pertanian

Pembentukan Asosiasi Komoditas Pertanian ditujukan untuk meningkatkan posisi tawar melalui peningkatan profesionalisme dalam mengelola Usaha tani dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi secara lebih baik.

Asosiasi Komoditas Pertanian merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani dalam membela kepentingan para Petani berkaitan dengan jenis usaha para anggota asosiasi. Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani. Asosiasi dapat dibentuk secara berjenjang dari pusat sampai dengan di wilayah kabupaten/kota.

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

1) Menampung dan menyalurkan aspirasi Petani.
2) Mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha tani.
3) Memberikan masukan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petani.
4) Mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di dalam negeri dan di luar negeri.

5) Mendorong persaingan Usaha tani yang adil.

6) Memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi.

7) Membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani.

Pembentukan asosiasi dapat diinisiasi oleh para Petani yang telah mengelola usaha tani secara intensif, selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi organisasi formal, berbadan hukum dengan susunan, jumlah dan jangka waktu kepengurusan asosiasi disusun secara efisien dan demokratis.

g. Dewan Komoditas Pertanian Nasional

Dewan Komoditas Pertanian Nasional sebagai mitra pemerintah dalam perumusan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petani. Dalam pengembangan Dewan Komoditas Pertanian Nasional dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan Petani.

Dewan Komoditas Pertanian Nasional bersifat nirlaba, mandiri, profesional dan mampu mengelola dan mengembangkan tugas dan fungsi lembaga.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial. Dewan Komoditas Pertanian Nasional dibentuk di pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Organisasi Dewan Komoditas Pertanian Nasional terdiri dari unsur-unsur (1) tokoh masyarakat. (2) Petani dan Pelaku Usaha. (3) Asosiasi Komoditas Pertanian. (4) pakar. (5) akademisi. dan/atau (6) konsumen produk dan jasa agribisnis.

Dewan Komoditas Pertanian Nasional berfungsi sebagai wadah dalam memperjuangkan kepentingan Petani, dengan tugas antara lain:

1) Menampung dan penyalurkan aspirasi Pelaku Utama dan Pelaku.

2) Usaha mengenai pengembangan agribisnis.

3) Memberikan masukan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengenai pengembangan agribisnis.

4) Memberikan data, informasi, dan masukan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

5) Membantu mediasi antar Asosiasi Komoditas Pertanian.

C. RANGKUMAN

Model Kelembagaan petani yang utama yang dalam akses kegiatan sosial dikenal kelompok tani yang memiliki ciri dan prinsip serta peran dan fungsi tertentu untuk mewadahi kebutuhan dan keinginan anggotanya. Gapoktan merupakan gabungan dari bererapa kelompok tani yang memiliki ciri, prinsip dan peran fungsi untuk dapat memberikan pelayanan kebutuhan ekonomi kepada para anggota/kelompok yang didalamnya.

Kelembagaan ekonomi petani yang dapat dibentuk oleh para petani dalam rangka kegiatan pengembangan usaha tani seperti kemitraan mediasi, jasa konsultasi agribisnis, klinik agribisnis dan kelembagaan yang dapat meningkatkan mutu budidaya, produktivitas, nilai tambah produk dan perbaikan pendapatan usaha tani dapat dalam bentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP) atau koperasi petani serta lembaga keuangan mikro agribisnis. Kelembagaan petani yang dapat membangun jaringan baik dalam negeri dan luar negeri serta dapat menjamin dalam pembelaan hukum dapat berbentuk asosiasi komoditas pertanian dan dewan komoditas pertanian.

D. SOAL LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai materi model kelembagaan petani, kerjakanlah latihan soal berikut ini:

1. Apa yang kelembagaan petani yang terdapat dalam masyarakat yang dapat pendukung dalam pembangunan disektor pertanian.
2. Apa yang dimaksud dengan kelembagaan ekonomi petani.
3. Sebutkan jenis kelembagaan ekonomi petani yang terdapat diperdesaan.
4. Bagaimana peran dan fungsi dari kelompok tani agar dapat dirasakan oleh anggota dan lembaganya.

5. Bagaimana ciri-ciri dari kelompok tani sebagai kelembagaan petani.
6. Jelaskan karakteristik dari gabungan kelompok tani untuk pembentukannya.
7. Apakah peran dan fungsi dari gabungan kelompok tani dalam rangka pemenuhi keinginan dan kebutuhan para anggota/kelompok tani.
8. Jelaskan tahapan dalam pembentukan lembaga keuangan mikro.
9. Apakah yang dimaksud dengan Gapoktan sebagai vocal point dalam farm model dalam wilayah perdesaan.
10. Apakah yang dimaksud dengan kemitraan mediasi dalam model kelembagaan petani.
11. Jelaskan karakteristik dari klinik agribisnis sebagai lembaga diseminasi dan difusi inovasi teknologi pertanian.
12. Jelaskan apa maksud dan tujuan dari pembentukan kelembagaan Badan Usaha Milik Petani.
13. Apakah manfaat dibentuknya koperasi petani dalam memperbaiki fasilitas yang diharapkan para petani ?
14. Apakah maksud dari bentuknya lembaga keuangan mikro agribinis di wilayah perdesaan ?
15. Jelaskan manfaat dibentuknya lembaga keuangan mikro agribisnis bagai para petani.
16. Apakah yang dimaksud asosiasi komoditaspetani dan dewan komoditas pertanian ?
17. Apakah tugas dari asosiasi komoditas pertanian dan dewan komoditas pertanian ?

E. TUGAS PRAKTIKUM

1. Praktik Case Studi Pustaka

a. Lakukan studi pustaka atau penelusuran jurnal terkait model-model pengembangan kelembagaan petani yang dipandang memungkinkan dan relevan untuk dikembangkan.

b. Review hasil penelusuran jurnal tersebut dan presentasikan secara berkelompok.

2. Tugas Praktek di Wilayah

a. Mahasiswa membentuk kelompok yang terdiri 3-4 orang untuk mempelajari dari suatu wilayah (tingkat kecamatan) tentang model model kelembagaan petani yang terdapat pada wilayah tersebut.

b. Setiap mahasiswa dalam satu wilayah untuk mengidentifikasi kelembagaan petani (Kelompok tani, Gapoktan, BUMP, Klinik Agribisnis, Mediasi Kemitraan, koperasi petani, LKM-A, Asosiasi komoditas Pertanian) yang terdapat, dengan mengamati proses pembentukan, jenis kegiatan, tatacara dalam penyelenggaraan kelembagaan petani, bentuk keorganisasian yang dilakukan.

c. Hasil dari identifikasi tersebut untuk dicermati/dianalisis sebagai bahan untuk menggambarkan penyelenggaraan dari berbagai model kelembagaan yang terdapat satu wilayah yang dikunjungi.

d. Hasil dari kegiatan praktek terebut disusun dalam laporan untuk dipresentasekan di dalam kelas serta untuk dapat tukar fikiran dengan sesama mahasiswa serta dosen pengampuh.

e. Penyempurnaan hasil dari presentasi untuk disusun sebagai laporan oleh setiap mahasiswa, kemudian disampaikan kepada dosen pengampuh.

F. SUMBER INFORMASI DAN REFERENSI

Abu Huraerah dan Purwanto, 2006. *Dinamika Kelompok*. Refika Aditama. Bandung.

Hermanto dan Subowo, G. 2006. *Model Sistem dan Usaha Agribisnis di Lahan Rawa Pasang Surut: Konsepsi dan Strategi Pengembangannya*. Balai Litbang Hutan Tanaman Palembang. Palembang Tahun 2006.

Kementerian Pertanian, Permentan No. 67 Tahun 2016. *Pembinaan Kelembagaan Petani*. Jakarta.

Kementerian Pertanian, 2013. *Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani*. Kementerian pertanian RI. Jakarta.

Mardikanto T. (2009). *System Penyuluhan Pertanian*. UNS Press. Solo.

Mardikanto, T. 2009. B.U.M.P. Badan Usaha Milik Petani. *Sebuah Inovasi Kelembagaan Untuk Pengembangan Ekonomi Perdesaan*. Diterbitkan atas kerjasama FACILITATOR dan PT. GAPOKTAN FACILITATOR SEJAHTERA. Sukoharjo-Solo. Tahun 2009.

Mardikanto, T. 2010. Model- Model Perberdayaan Masyarakat. UNS Press. Solo.

Pranadji T. 2003. *Menuju Transformasi Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

Sumardjo et al., 2004. *Teori dan Praktek Kemitraan Agribisnis*. Penebar Swadaya. Jakarta.

Syamsiah, 2000. *Pembinaan kelompok tani* . Universitas Terbuka. Jakarta.

Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Undang Undang Nomor. 17 Tahun 2012 TentangPerkoperasian. Jakarta 2012.

Undang Undang Nomor : 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

BAB V.

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI (POKTAN) DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)

A. PENGANTAR MATERI

1. Deskripsi Singkat

Bab V ini memberikan informasi gambaran tentang ruang lingkup penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta membekali mahasiswa untuk menguasai kompetensi dalam mengidentifikasi, mempertunjukkan, menumbuhkan. 1) Kelompok tani (POKTAN), 2) Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), 3) Pedoman Penyusunan Rencana Definitif Kelompok tani (RDK) Dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) dalam proses penumbuhkembangan kelembagaan petani, dan 4) metode untuk penumbuhan dengan dalam bentuk Latihan dan Kunjungan serta Supervisi.

2. Manfaat Pembelajaran

Fungsi pembelajaran adalah agar tercapainya tujuan belajar, yaitu terjadinya perubahan dalam diri seseorang ke arah yang positif dan terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.

Setelah mahasiswa melalui proses pembelajaran pada bab ini diharapkan dapat membentuk kemampuan intelektual, berfikir kritis dan munculnya kreatifitas serta perubahan perilaku atau pribadinya berdasarkan praktik atau pengalaman belajar tentang Penumbuhan dan Pengembangan kelembagaan Kelompok tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok tani (Gapoktan).

3. Capaian Pembelajaran (CP Sub Mata Kuliah/Materi Pokok Bahasan)

Mahasiswa memiliki kompetensi dalam mengetahui, memahami, mempertunjukkan serta menjelaskan tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dalam wilayah kerja penyuluh pertanian, sebagai berikut : 1) Kelompok tani (POKTAN), 2) Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), 3) Penyusunan

Rencana Definitif Kelompok tani (RDK) Dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK), dan 4) System Latihan dan Kunjungan (LAKU) dan Supervisi dalam proses penumbuhkembangan kelembagaan petani.

4. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mampu menguasai kompetensi pada sub pokok bahasan ini berupa metode sebagai berikut :

1) Discovery Learning yaitu mencari dan mengumpulkan informasi deskripsi pengetahuan tentang penumbuhan kelompok tani dan Gapoktan.
2) Contextual Instruction yaitu membahas teori kaitannya situasi nyata dan melakukan studi lapang/terjun di dunia nyata.
3) Cooperative learning yaitu membahas masalah penumbuhan kelembagaan petani secara berkelompok.
4) Problem Based Learning yaitu Belajar dengan menggali informasi untuk memecahkan masalah faktual yang dirancang pengampu.
5) Small Group Discussion yaitu Membentuk kelompok kecil, memilih bahan sub pokok bahasan, diskusi dan presentasi.

B. MATERI PEMBELAJARAN

Untuk peningkatan kesejahteraan para petani diperlukan dukungan sumber daya manusia berkualitas melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok yang dapat mendukung sistem agribisnis berbasis pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan). Sehubungan dengan itu perlu dilakukan pembinaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok yang kuat dan mandiri untuk meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya.

Pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya, dengan menumbuh kembangkan kerja sama antar petani dan pihak lainnya yang terkait

untuk mengembangkan usaha taninya. Selain itu pembinaan kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani anggotanya secara lebih efektif, dan memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya.

Penumbuhan dan pengembangan Poktan dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk merubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usaha taninya dan meningkatkan kemampuan Poktan dalam melaksanakan fungsinya. Pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Kegiatan penyuluhan melalui pendekatan kelompok dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergi antar petani dan antar Poktan dalam rangka mencapai efisiensi usaha.

1. Penumbuhan Kelompok Tani (Poktan)

a. Dasar Penumbuhan kelompok Tani

1) Penumbuhan Poktan, dapat dimulai dari kelompok-kelompok/organisasi sosial yang ada di masyarakat (misalnya kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok remaja desa, kelompok adat dan lain-lain) yang selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk menumbuhkan Poktan, yang terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan dari usaha taninya.

2) Kelompok tani juga dapat ditumbuhkan dari petani dalam satu wilayah (satu RW/dusun atau lebih, satu desa/kelurahan atau lebih), dapat berdasarkan domisili atau hamparan tergantung dari kondisi penyebaran penduduk dan lahan usaha tani sesuai kebutuhan mereka di wilayahnya.

3) Kelompok tani ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani dengan jumlah anggota berkisar antara 20 sampai 25 orang petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha taninya.

4) Kegiatan-kegiatan Poktan yang dikelola tergantung kepada kesepakatan anggota, dapat berdasarkan jenis usaha, unsur-unsur subsistem agribisnis (pengadaan sarana produksi pertanian, pemasaran, pengolahan hasil pertanian, dan lainnya).

5) Dalam penumbuhan Poktan, yang perlu diperhatikan adalah kondisi-kondisi kesamaan kepentingan, sumberdaya alam, sosial-ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antar petani. Hal ini dapat menjadi faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok, dimana setiap anggota kelompok dapat merasa memiliki dan menikmati manfaat dari apa yang ada dalam kegiatan Poktan.

b. Prinsip-Prinsip Penumbuhan Kelompok Tani

Penumbuhan poktan, didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut.

1) Kebebasan, artinya menghargai para individu/petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan serta memilih kelompok tani yang mereka kehendaki sesuai dengan kepentingannya. Setiap individu dapat menjadi anggota satu atau lebih dari kelompok tani.

2) Keterbukaan, artinya penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara pelaku utama dan pelaku usaha.

3) Partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola poktan (merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan melakukan evaluasi).

4) Keswadayaan, artinya mengembangkan kemampuan penggalian potensi diri para anggota dalam penyediaan dana dan sarana, serta pendayagunaan sumberdaya guna terwujudnya kemandirian poktan.

5) Kesetaraan, artinya hubungan antara pelaku utama dan pelaku usaha harus merupakan mitra sejajar.

6) Kemitraan, artinya penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling

menguntungkan, dan saling memperkuat antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh pertanian.

c. Pelaksanaan Penumbuhan Kelompok Tani

Penumbuhan poktan, dilaksanakan melalui tahapan, yaitu persiapan dan proses penumbuhan sebagai berikut.

1) Persiapan Penumbuhan Kelompok Tani

a) Penyuluh pertanian melakukan identifikasi melalui pengumpulan data dan informasi yang meliputi antara lain.

(1) Tingkat pemahaman petani tentang kelembagaan petani.

(2) Kondisi petani dan keluarganya.

(3) Kondisi usaha tani yang ada.

(4) Domisili dan sebaran penduduk, serta jenis usaha tani.

(5) Organisasi sosial masyarakat yang sebagian anggotanya belum menjadi anggota poktan.

(6) Jumlah petani yang belum menjadi anggota poktan, dalam satu wilayah RW/dusun dan/atau dalam satu desa/kelurahan.

b) Penyuluh pertanian melakukan advokasi (memberikan saran dan pendapat) serta informasi kepada tokoh-tokoh petani setempat dan aparat desa untuk menyampaikan penjelasan mengenai.

(1) Pengertian tentang poktan meliputi ruang lingkup poktan, tujuan dan manfaat berkelompok untuk kepentingan usaha tani dan hidup bermasyarakat yang lebih baik.

(2) Proses dan langkah-langkah dalam penumbuhan poktan.

(3) Penyusunan rencana kerja dan cara kerja poktan.

c) Penyuluh pertanian memberikan penyuluhan melalui pertemuan kelompok-kelompok sosial dan pertemuan di tingkat RW/dusun dalam satu desa/kelurahan, dengan materi sebagai berikut.

(1) Pemahaman tentang poktan, yang meliputi. pengertian poktan, tujuan serta manfaat berkelompok untuk pengembangan usaha tani agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, serta pendapatan.

(2) Kewajiban dan hak setiap petani yang menjadi anggota poktan, serta para pengurus poktan.

(3) Fungsi poktan.

(4) Ketentuan yang berlaku dalam poktan.

(5) Syarat-syarat menjadi calon anggota poktan.

(6) Ciri-ciri poktan yang kuat dan mandiri.

(7) dan lain-lain.

2) Proses Penumbuhan Kelompok Tani

a) Penyuluh pertanian memberikan sosialisasi tentang penumbuhan poktan kepada masyarakat, terutama tokoh-tokoh petani setempat dan aparat desa/kelurahan.

b) Penumbuhan poktan dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa/kelurahan, penyuluh pertanian sebagai mitra kerja petani dan instansi terkait.

c) Selanjutnya kesepakatan membentuk poktan dituangkan dalam surat pernyataan yang diketahui oleh penyuluh pertanian.

d) Pemilihan pengurus kelompok dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh anggota. Perangkat kepengurusan kelompok tani sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan, dan dituangkan dalam berita acara yang disahkan oleh kepala desa/lurah dan diketahui oleh penyuluh pertanian.

e) Sebagai tindak lanjut dari penumbuhan kelompok tani dan pemilihan pengurus, maka diadakan pertemuan lanjutan yang dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan/atau menetapkan rencana kerja kelompok.

3) Pengembangan Kelompok Tani

Pengembangan poktan diarahkan pada (a) penguatan poktan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri. (b) peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis. dan (c) peningkatan kemampuan poktan dalam menjalankan fungsinya.

a. Penguatan Poktan Menjadi Kelembagaan Petani yang Kuat dan Mandiri

Upaya penguatan poktan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri meliputi.

1) Melaksanakan pertemuan/rapat anggota, rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan.
2) Disusunnya rencana kerja kelompok dalam bentuk Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diselenggarakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir penyelenggaraan dilakukan evaluasi secara partisipatif.
3) Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama.
4) Memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi yang rapih.
5) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu sampai hilir.
6) Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar.
7) Sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya.
8) Menumbuhkan jejaring kerjasama antara poktan dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan.
9) Mengembangkan pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha kegiatan kelompok.
10) Melakukan penilaian klasifikasi kemampuan kelompok tani yang terdiri dari Kelas Pemula, Kelas Lanjut, Kelas Madya, dan Kelas Utama. Pedoman penilaian klasifikasi kemampuan kelompok tani diatur lebih

lanjut melalui Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompok tani.

b. Peningkatan Kemampuan Anggota dalam Pengembangan Agribisnis

Upaya peningkatan kemampuan petani anggota poktan dalam mengembangkan agribisnis meliputi.

1) Menciptakan iklim usaha yang kondusif agar para petani mampu untuk membentuk dan menumbuhkembangkan kelompoknya secara partisipatif.
2) Menumbuhkembangkan kreatifitas dan prakarsa anggota poktan untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi, dan akses permodalan yang tersedia.
3) Membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam usaha taninya.
4) Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi pasar dan peluang usaha serta menganalisis potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang dikembangkan/ diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang optimal.
5) Meningkatkan kemampuan anggota untuk dapat mengelola usaha tani secara komersial, berkelanjutan dan akrab lingkungan.
6) Meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi usaha masing-masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin permintaan pasar yang dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas.
7) Mengembangkan kemampuan anggota untuk menciptakan teknologi yang spesifik lokalita.
8) Mendorong dan mengadvokasi agar para petani mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha poktan.

c. Peningkatan Kemampuan Kelompok tani dalam Menjalankan Fungsinya

Pembinaan poktan dilaksanakan secara berkesinambungan dan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan poktan dalam melaksanakan fungsinya sebagai kelas belajar. wahana kerjasama. dan unit produksi, sehingga mampu mengembangkan usaha agribisnis dan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri.

1) Kelas Belajar

Agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik, poktan diarahkan untuk mempunyai kemampuan sebagai berikut.

a) Menggali dan merumuskan kebutuhan belajar.

b) Merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan belajar.

c) Menumbuhkan kedisiplinan dan motivasi anggota poktan.

d) Melaksanakan proses pertemuan dan pembelajaran secara kondusif dan tertib.

e) Menjalin kerjasama dengan sumber-sumber informasi yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang berasal dari sesama petani, instansi pembina maupun pihak-pihak lain.

f) Menciptakan iklim/lingkungan belajar yang sesuai.

g) Aktif dalam proses belajar-mengajar, termasuk mendatangkan dan berkonsultasi kepada kelembagaan penyuluhan pertanian, dan sumber- sumber informasi lainnya.

h) Mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat maupun masalah yang dihadapi anggota poktan.

i) Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan poktan.

j) Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam poktan, antar poktan atau dengan instansi terkait.

2) Wahana Kerjasama

Sebagai wahana kerjasama, hendaknya poktan memiliki kemampuan sebagai berikut.

a) Menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai dan selalu berkeinginan untuk bekerjasama.

b) Menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan diantara anggota poktan untuk mencapai tujuan bersama.

c) Mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja diantara sesama anggota poktan sesuai dengan kesepakatan bersama.

d) Mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab diantara sesama anggota poktan.

e) Merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan yang bermanfaat bagi anggota poktan.

f) Melaksanakan kerjasama penyediaan sarana dan jasa pertanian.

g) Melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan.

h) Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam poktan maupun pihak lain.

i) Menjalin kerjasama dan kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan/ atau permodalan.

j) Mengadakan pemupukan modal untuk keperluan pengembangan usaha anggota poktan.

3) Unit Produksi

Sebagai unit produksi, poktan diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut.

a) Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang

tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumberdaya alam lainnya.

b) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bersama, serta rencana kebutuhan poktan atas dasar pertimbangan efisiensi.

c) Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usaha tani oleh para anggota poktan sesuai dengan rencana kegiatan poktan.

d) Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usaha tani.

e) Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam poktan, maupun kesepakatan dengan pihak lain.

f) Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan poktan, sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang.

g) Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

h) Mengelola administrasi secara baik dan benar.

2. Penumbuhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

a. Dasar Penumbuhan Gabungan Kelompok Tani

1) Penumbuhan Gapoktan dimulai dari musyawarah yang partisipatif pada masing-masing kelompok tani untuk menyepakati keikutsertaan kelompoknya dalam Gapoktan. Dalam kesepakatan tidak ada unsur pemaksaan tergantung dari kesiapan poktan untuk bergabung dalam Gapoktan.

2) Penumbuhan Gapoktan, dapat dimulai dari poktan-poktan yang ada di desa/kelurahan, yang selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk menumbuhkan Gapoktan, yang terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam mengembangkan skala usaha tani yang lebih menguntungkan.

3) Penggabungan poktan dalam Gapoktan tersebut terutama dapat dilakukan oleh poktan yang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan atau penggabungan poktan yang berada dalam satu wilayah kecamatan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif. Wilayah kerja Gapoktan sedapat mungkin dalam wilayah administratif desa/ kelurahan atau kecamatan, tetapi sebaiknya tidak melewati batas wilayah kecamatan.

b. Prinsip-prinsip Penumbuhan Gabungaan Kelompok tani

Penumbuhan Gapoktan didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Kebebasan, artinya Gapoktan diberi kebebasan dalam mengembangkan unit jasa/usaha otonom sesuai kebutuhan, seperti. unit usaha tani, unit usaha pengolahan, unit usaha sarana dan prasarana produksi, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro/simpan-pinjam serta unit jasa penunjang lainnya.
2) Kepahaman, artinya semua anggota dari setiap kelompok tani yang akan bergabung dalam Gapoktan harus terlebih dahulu memahami tujuan dan manfaat dari Gapoktan.
3) Partisipatif, artinya semua anggota poktan yang terlibat memiliki peluang yang sama dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan dan pengembangan usaha Gapoktan.
4) Kesukarelaan, artinya keanggotaan Gapoktan bersifat sukarela atau atas dasar kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.
5) Keswakarsaan, artinya penumbuhan Gapoktan harus didasarkan pada kemauan dan inisiatif para anggota kelompok tani yang akan bergabung.
6) Keterpaduan, artinya penumbuhan Gapoktan harus didasarkan pada keinginan untuk saling mendukung dan saling melengkapi diantara anggotanya guna memperkuat dan mengembangkan kegiatan usaha taninya.
7) Kemitraan, artinya pengembangan pola-pola kerjasama dalam Gapoktan dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai,

saling menguntungkan, dan saling memperkuat antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh pertanian.

c. Pelaksanaan Penumbuhan Gabungan Kelompok tani

Penumbuhan Gapoktan, dilakukan melalui tahapan, yaitu persiapan dan proses penumbuhan sebagai berikut.

1) Persiapan Penumbuhan Gabungan Kelompok Tani

a) Penyuluh pertanian melakukan identifikasi terhadap poktan yang berpotensi untuk ditingkatkan kemampuannya melalui pengumpulan data dan informasi tentang perkembangan poktan yang meliputi antara lain.

(1) Klasifikasi kemampuan poktan yang menunjukkan kinerja poktan dari aspek manajemen dan kepemimpinan yang dikaitkan dengan fungsi poktan.

(2) Tingkat pemahaman tentang Gapoktan.

(3) Kondisi usaha tani yang ada pada poktan.

(4) Kelompok tani yang belum menjadi anggota Gapoktan.

b) Penyuluh pertanian melakukan advokasi (memberikan saran dan pendapat) serta informasi kepada tokoh-tokoh petani setempat dan aparat desa untuk menyampaikan penjelasan mengenai.

(1) Pengertian tentang Gapoktan, meliputi ruang lingkup Gapoktan, tujuan dan manfaat menumbuhkan Gapoktan.

(2) Proses dan langkah-langkah dalam penumbuhan Gapoktan.

(3) Penyusunan rencana kerja dan cara kerja Gapoktan.

2) Proses Penumbuhan Gabungan Kelompok Tani

a) Penyuluh pertanian memberikan sosialisasi melalui pertemuan kelompok-kelompok tani dan pertemuan RW/dusun dalam satu desa/kelurahan, dengan materi sebagai berikut.

(1) Pemahaman tentang Gapoktan, yang meliputi pengertian Gapoktan, tujuan serta manfaat menumbuhkan Gapoktan untuk pengembangan usaha tani agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, serta pendapatan dan fungsi Gapoktan.

(2) Kewajiban dan hak setiap petani anggota yang menjadi anggota Gapoktan, serta para pengurus Gapoktan.

(3) Ketentuan yang berlaku dalam Gapoktan.

(4) Syarat calon menjadi anggota Gapoktan.

b) Membuat surat pernyataan kesepakatan tertulis dari poktan-poktan tentang pembentukan Gapoktan.

c) Langkah-langkah membentuk kesepakatan Gapoktan, sebagai berikut.

(1) Penyuluh pertanian memfasilitasi pertemuan pembentukan Gapoktan yang dihadiri para ketua kelompok tani yang akan bergabung, aparat desa/pamong desa, tokoh masyarakat dan instansi terkait.

(2) Penyuluh pertanian memfasilitasi terbentuknya Gapoktan yang meliputi nama Gapoktan dan pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksinya sesuai kebutuhan).

(3) Pembentukan Gapoktan tersebut dituangkan dalam berita acara penumbuhan Gapoktan yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh penyuluh pertanian.

d) Daftar poktan yang memenuhi syarat untuk bergabung dalam Gapoktan selanjutnya dimasukkan dalam salah satu bahan dalam penyusunan programa desa/kelurahan.

e) Setelah programa desa disusun maka pengembangan Gapoktan menjadi bahan bagi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyuluh Pertanian.

d. Ketentuan Gabungan Kelompok tani

1) Gapoktan beranggotakan beberapa kelompok tani dengan syarat sebagai berikut.
   a) Pendirian poktan minimal telah berusia 2 tahun.
   b) Tingkat kemampuan poktan minimal kelas madya.
   c) Memiliki usaha kelompok yang sama atau saling melengkapi.
   d) Berada dalam wilayah satu desa/kelurahan atau kecamatan.
   e) Semua anggota kelompok sepakat membentuk gabungan kelompok tani yang dibuktikan dengan pernyatan tertulis.

2) Memiliki pengurus terdiri dari. Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai unit usaha yang dilakukan. Syarat pengurus sebagai berikut :
   a) Dipilih dari dan oleh perwakilan kelompok tani anggota secara demokratis.
   b) Berdomisili di wilayah Gapoktan.
   c) Mampu membaca dan menulis.
   d) Bukan aparat/pamong desa.
   e) Memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Gapoktan.
   f) Memiliki semangat, motivasi, dan kemampuan untuk memimpin Gapoktan.

e. Peningkatan Kemampuan Gapoktan

Peningkatan kemampuan Gapoktan dimaksudkan agar dapat berfungsi sebagai (1) unit usaha sarana dan prasarana produksi, (2) unit usaha tani, (3) unit usaha pengolahan, (4) unit usaha pemasaran, dan (5) unit usaha keuangan mikro (simpan-pinjam) serta unit jasa penunjang lainnya.

1) Unit Usaha Sarana dan Prasarana Produksi

Sebagai unit usaha sarana dan prasarana produksi, hendaknya Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut.

a) Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana produksi setiap anggota Gapoktan.

b) Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana dan prasarana produksi pertanian (pabrik dan kios saprodi).

c) Mengorganisasikan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dengan dinas terkait dan lembaga-lembaga usaha sarana dan prasarana produksi pertanian.

d) Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana dan prasarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan/ atau permodalan.

2) Unit Usaha Tani

Agar kegiatan usaha tani petani dapat berlangsung dengan baik, Gapoktan diarahkan agar mempunyai kemampuan sebagai berikut.

a) Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan usaha tani yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumber daya alam lainnya.

b) Menyusun rencana definitif Gapoktan dan melaksanakan kegiatan atas dasar pertimbangan efisiensi.

c) Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usaha tani kelompok tani sesuai dengan rencana kegiatan Gapoktan.

d) Menjalin kerjasama/kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usaha tani.

e) Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam Gapoktan maupun kesepakatan dengan pihak lain.

f) Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan Gapoktan, sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang.

g) Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

h) Mengelola administrasi secara baik.

i) Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan Gapoktan.

j) Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam Gapoktan, antar Gapoktan atau dengan poktan, serta dengan instansi/lembaga terkait.

3) Unit Usaha Pengolahan

Sebagai unit usaha pengolahan, hendaknya Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut.

a) Menyusun perencanaan kebutuhan peralatan pengolahan hasil usaha tani petani yang bergabung dalam poktan/Gapoktan.

b) Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pengusaha pengolahan hasil-hasil pertanian dan pasar.

c) Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia peralatan- peralatan pertanian dan penyedia saprodi.

d) Mengembangkan kemampuan anggota Gapoktan dalam pengolahan produk-produk hasil pertanian.

e) Mengorganisasikan kegiatan produksi anggota Gapoktan ke dalam unit-unit usaha pengolahan dan pemasaran.

4) Unit Usaha Pemasaran

Sebagai unit usaha pemasaran, hendaknya Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut.

a) Mengidentifikasi, menganalisis potensi dan peluang pasar berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi guna memberikan keuntungan usaha yang lebih optimal.

b) Merencanakan kebutuhan pasar berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dengan memperhatikan segmentasi pasar.

c) Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pemasok-pemasok kebutuhan pasar.

d) Mengembangkan penyediaan kebutuhan-kebutuhan pasar produk pertanian.

e) Mengembangkan kemampuan memasarkan produk-produk hasil pertanian.

f) Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak pemasok hasil-hasil produksi pertanian.

g) Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi usaha masing- masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin pada permintaan pasar dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas.

5) Unit Usaha Keuangan Mikro

Agar kegiatan usaha keuangan mikro dapat berlangsung dengan baik, Gapoktan diarahkan untuk mempunyai kemampuan sebagai berikut.

a) Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota Gapoktan untuk memanfaatkan setiap informasi dan akses permodalan yang tersedia.

b) Meningkatkan kemampuan anggota Gapoktan untuk dapat mengelola keuangan mikro secara komersial.

c) Mengembangkan kemampuan anggota Gapoktan untuk menggali sumber-sumber usaha yang mampu meningkatkan permodalan.

d) Mendorong dan mengadvokasi anggota Gapoktan agar mau dan mampu menyisihkan hasil usaha guna pengembangan modal usaha.

e) Mendorong dan mengadvokasi anggota Gapoktan agar mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha.

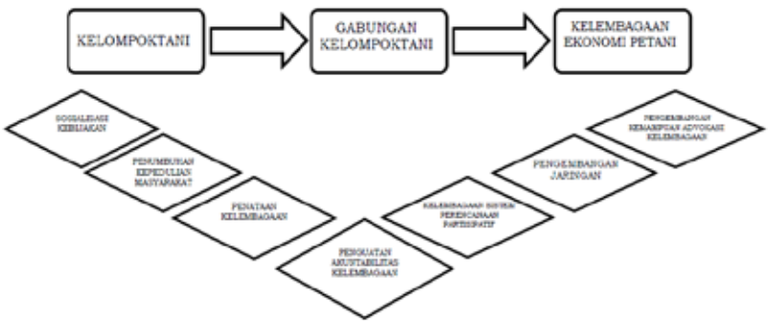

Gambar 1. Strategi Pengembangan Kelembagaan Petani

3. Rencana Definitif Kelompok tani (RDK) Dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK).

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian berkelanjutan tersebut, salah satu target utama pembangunan pertanian adalah pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Dalam rangka pencapaian program swasembada dan swasembada berkelanjutan, perlu disusun rencana/sasaran produksi dan produktivitas setiap tahun, termasuk gerakan operasional di tingkat lapangan.

Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, perlu memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan sasaran produksi dan produktivitas target pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Instrumen yang digunakan dalam menyusun perencanaan sasaran tersebut, dilakukan melalui penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif kebutuhan Kelompok (RDKK).

RDK merupakan rencana kerja usaha tani dari kelompok tani (poktan) untuk satu periode 1 (satu) tahun berisi rincian kegiatan tentang sumber daya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani. RDK dijabarkan lebih lanjut menjadi RDKK.

RDKK merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berdasarkan kredit/permodalan usaha tani bagi anggota poktan yang memerlukan maupun dari swadana petani.

Penyusunan RDK/RDKK merupakan kegiatan strategis yang harus dilaksanakan secara serentak dan tepat waktu, sehingga diperlukan suatu gerakan untuk mendorong poktan menyusun RDK/RDKK dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan petani. Mengingat kemampuan petani dalam penyusunan RDK/RDKK masih terbatas, maka penyuluh pertanian perlu mendampingi dan membimbing poktan.

Tujuan

Penyusunan RDK dan RDKK bertujuan untuk memberikan arah dan kebijakan dalam penyusunan rencana kegiatan usaha tani. meningkatkan kapasitas poktan dalam penyusunan rencana kegiatan usaha tani meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dalam membimbing poktan untuk menyusun rencana kegiatan usaha tani.

a. Rencana Definitif Kelompok

Rencana Definitif Kelompok (RDK) disusun untuk perencanaan kegiatan pengembangan usaha tani kelompok, termasuk kebutuhan sarana produksi pertanian (saprotan), dalam jangka waktu satu tahun.

RDK merupakan bahan dalam penyusunan programa penyuluhan desa dan selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan usulan penyelenggaraan penyuluhan tingkat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).

1) Penyusunan RDK

RDK disusun dengan tahapan sebagai berikut.

a) Pertemuan pengurus poktan yang didampingi oleh penyuluh pertanian dalam rangka persiapan penyusunan RDK dengan ruang lingkup antara lain (a) evaluasi pelaksanaan kegiatan poktan tahun sebelumnya, (b) evaluasi produksi dan produktivitas rata-rata yang dicapai anggota poktan, dan (c) rencana penyusunan RDK/RDKK.

b) Pertemuan anggota poktan dipimpin oleh ketua poktan, didampingi oleh penyuluh pertanian, dengan ruang lingkup antara lain (a) mengidentifikasi potensi dan masalah dalam pengembangan usaha tani. (b) menetapkan jenis komoditas yang akan diusahakan dan sasaran produksi. (c) membahas pola tanam/pola usaha tani, kebutuhan sarana produksi dan teknologi yang akan digunakan. (d) merencanakan kegiatan poktan lainnya, misalnya gerakan perbaikan irigasi, pemberantasan OPT, pemupukan modal, dll. (e) mengorganisasikan dan menyusun pembagian kerja. dan (f) menyusun dan menyepakati RDK kegiatan usaha tani.

c) Rencana Definitif Kelompok dituangkan dalam bentuk format 1 yang ditandatangani oleh ketua poktan dan menjadi pedoman bagi anggota poktan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha taninya.

d) RDK disusun paling lambat pada akhir bulan Januari sebelum pelaksanaan musrenbangdes.

e) Penyuluh pertanian bersama pengurus Gapoktan melakukan rekapitulasi RDK tingkat desa/kelurahan dalam bentuk format 2, sebagai bahan untuk penyusunan rencana kegiatan Gapoktan dan rencana pendampingan penyuluh di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP).

2) Materi RDK

Materi RDK meliputi :

a) Pola tanam dan pola usaha tani yang disusun atas dasar pertimbangan.

b) Aspek teknis, meliputi agroekosistem dan teknologi.

c) Aspek ekonomi, meliputi permintaan pasar, harga, dan keuntungan usaha tani.

d) Aspek sosial, meliputi kebijakan pemerintah, kerja sama poktan dan dukungan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

(1) Sasaran produktivitas didasarkan atas.

- Potensi di wilayah poktan.
- Produktivitas dari masing-masing komoditas.

(2) Teknologi usaha tani

- Ketersediaan teknologi.
- Rekomendasi teknologi.

(3) Sarana produksi dan permodalan, didasarkan atas.

- Luas areal usaha tani poktan.
- Teknologi yang akan diterapkan.
- Kemampuan permodalan anggota poktan.

(4) Kegiatan penguatan kapasitas poktan.

- Pertemuan rutin poktan.
- Kursus tani/sekolah lapang.
- Demplot atau demfarm.
- Penilaian kelas kelompok tani.

(5) Jadwal kegiatan, mengacu kepada rencana kegiatan usaha tani.

(6) Pembagian tugas disesuaikan dengan kesediaan dan kesepakatan poktan.

b. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

1) Penyusunan RDKK

RDKK disusun mengacu kepada RDK masing-masing poktan dengan tahapan sebagai berikut.

a) Pertemuan pengurus poktan yang didampingi oleh penyuluh pertanian dalam rangka persiapan penyusunan RDKK dengan ruang lingkup antara lain : (a) evaluasi realisasi RDKK musim sebelumnya, dan (b) rencana penyusunan RDKK.

b) Pertemuan anggota poktan dipimpin oleh ketua poktan, didampingi penyuluh pertanian, dengan ruang lingkup antara lain : (a) membahas dan menetapkan sarana produksi dan alat mesin

pertanian yang akan digunakan, (b) menghitung dan menyepakati daftar kebutuhan sarana produksi untuk memenuhi 6 tepat (tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu), dan (c) menetapkan kebutuhan sarana produksi yang akan dibiayai swadana petani, kredit, atau sumber pembiayaan usaha tani lainnya termasuk dari subsidi pemerintah.

c) RDKK disusun dan ditandatangani oleh ketua poktan.

d) Selanjutnya RDKK tersebut diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh penyuluh pertanian.

e) Penyusunan RDKK dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum jadwal tanam.

f) RDKK yang telah disusun dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk Gapoktan, lembar kedua untuk penyuluh, dan lembar ketiga sebagai arsip poktan.

g) Pengurus Gapoktan melakukan rekapitulasi RDKK dari poktan dan dituangkan ke dalam format 4, dan ditandatangani oleh ketua Gapoktan. Selanjutnya rekapitulasi RDKK tersebut diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh penyuluh pertanian, dan diketahui oleh kepala desa/lurah.

h) Rekapitulasi RDKK dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk Balai Penyuluhan Kecamatan/BP3K, lembar kedua untuk penyuluh pertanian, dan lembar ketiga sebagai arsip Gapoktan. Rekapitulasi RDKK disusun paling lambat satu bulan sebelum jadwal tanam.

2) Materi RDKK

Materi RDKK terdiri dari :

a) Jenis dan luas masing-masing komoditi yang diusahakan.

(1) Perhitungan kebutuhan, benih/bibit, pupuk, pestisida.

(2) Biaya garapan dan pemeliharaan. Biaya alat dan mesin pertanian (panen dan pasca panen).

b) Kebutuhan biaya lain yang terkait dengan jenis usaha yang dikelola anggota poktan seperti untuk sub sektor peternakan dan jenis usaha pengolahan pangan disesuaikan dengan sarana produksi yang diperlukan.

(1) Jadwal penggunaan sarana produksi (sesuai kebutuhan lapangan).

(2) Masing-masing kebutuhan tersebut ditentukan jumlah maupun nilai uangnya dan diperinci yang akan dibiayai secara swadana, kredit, dan fasilitasi pembiayaan lainnya.

3) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi

Dalam rangka peningkatan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan petani, pekebun, peternak dan petambak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi.

Tujuan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi adalah membantu petani, pekebun, peternak dan petambak untuk merencanakan usulan pengadaan pupuk dengan penyediaan pupuk bersubsidi sesuai azas 6 (enam) tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga).

RDKK Pupuk Bersubsidi merupakan rencana kebutuhan pupuk poktan selama satu tahun, yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Hasil rekapitulasi tersebut digunakan sebagai dasar usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tingkat nasional tahun berikutnya. RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut sekaligus juga digunakan sebagai alat pesanan pupuk bersubsidi kepada penyalur/pengecer resmi pupuk bersubsidi.

Fasilitasi pupuk bersubsidi diberikan kepada petani dengan luas lahan maksimal seluas dua hektar dan satu hektar bagi petambak serta hanya akan diberikan kepada setiap petani yang bergabung dalam poktan.

Pengurus poktan diharapkan dapat memotivasi petani lainnya untuk bergabung dalam poktan serta bersama-sama menyusun RDKK Pupuk Bersubsidi.

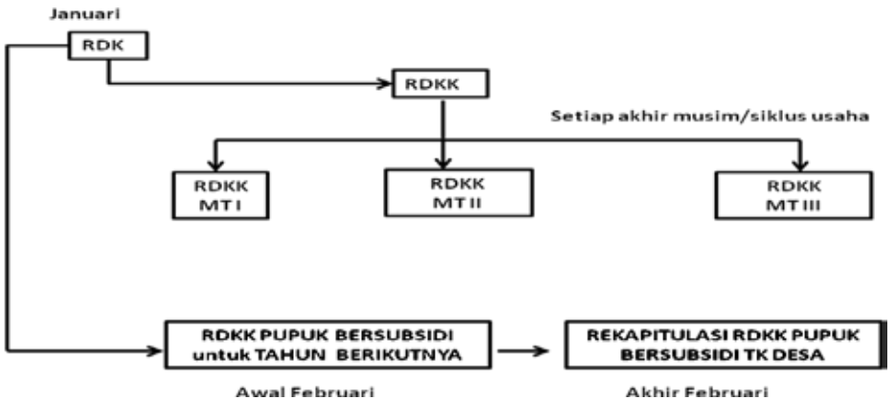

Gambar 2. Bagan Alur Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi

4) Gerakan Penyusunan Dan Pelaksanaan RDK Dan RDKK

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan usaha tani dengan menerapkan teknologi yang direkomendasikan diperlukan gerakan penumbuhan partisipasi petani maupun aparat pembina dan pemangku kepentingan lainnya dalam gerakan penyusunan dan pelaksanaan RDK dan RDKK termasuk RDKK pupuk bersubsidi. kegiatan tersebut, diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan petani dalam melaksanakan kegiatan usaha tani berkelompok secara berencana dengan azas musyawarah untuk menjamin penerapan teknologi sesuai anjuran.

Dalam penyusunan RDK/RDKK poktan agar dibimbing dan difasilitasi oleh penyuluh pertanian. Hal ini melekat dengan tugas para penyuluh untuk menuangkan kegiatan tersebut dalam rencana kerja penyuluh di WKPP.

Fasilitasi tentang penyusunan RDK/RDKK perlu dilakukan dalam bentuk praktek langsung dan simulasi sehingga proses penyusunan tersebut dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil petani.

a) Persiapan Penyusunan RDK/RDKK

(1) Penyuluh pendamping melakukan sosialisasi manfaat dan kegunaan RDK/RDKK bagi para petani, pengurus poktan sebagai alat perencanaan dalam peningkatan dan pengembangan usaha tani.

(2) Penyuluh pendamping melakukan inventarisasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha tani anggota poktan.

(3) Anggota poktan mempersiapkan data-data untuk menyusun RDK/RDKK.

b) Pelaksanaan Gerakan RDK DAN RDKK

(1) Pencanangan gerakan penyusunan RDK/RDKK di tingkat desa dapat dilakukan oleh kepala desa dengan melibatkan tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

(2) Pencanangan gerakan penyusunan RDK/RDKK diharapkan dapat juga dilaksanakan di setiap tingkatan, hal ini bertujuan Sebagai sosialisasi kegiatan dan membangun kesadaran serta motivasi petani dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.

(3) Gerakan penyusunan RDK/RDKK di desa dilaksanakan secara serentak pada bulan januari. Gerakan yang perlu dilakukan antara lain.

- Mengadakan pertemuan dengan ketua dan pengurus poktan yang ada di desa/WKPP untuk mengatur dan menetapkan jadwal musyawarah poktan.
- Menggerakkan anggota poktan untuk hadir dan aktif dalam musyawarah poktan.
- Memotivasi petani lain untuk bergabung di dalam poktan.
- Menghadirkan kepala/pamong desa dalam musyawarah poktan.

- Instansi pembina di masing-masing tingkatan, melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyusunan RDK/RDKK.

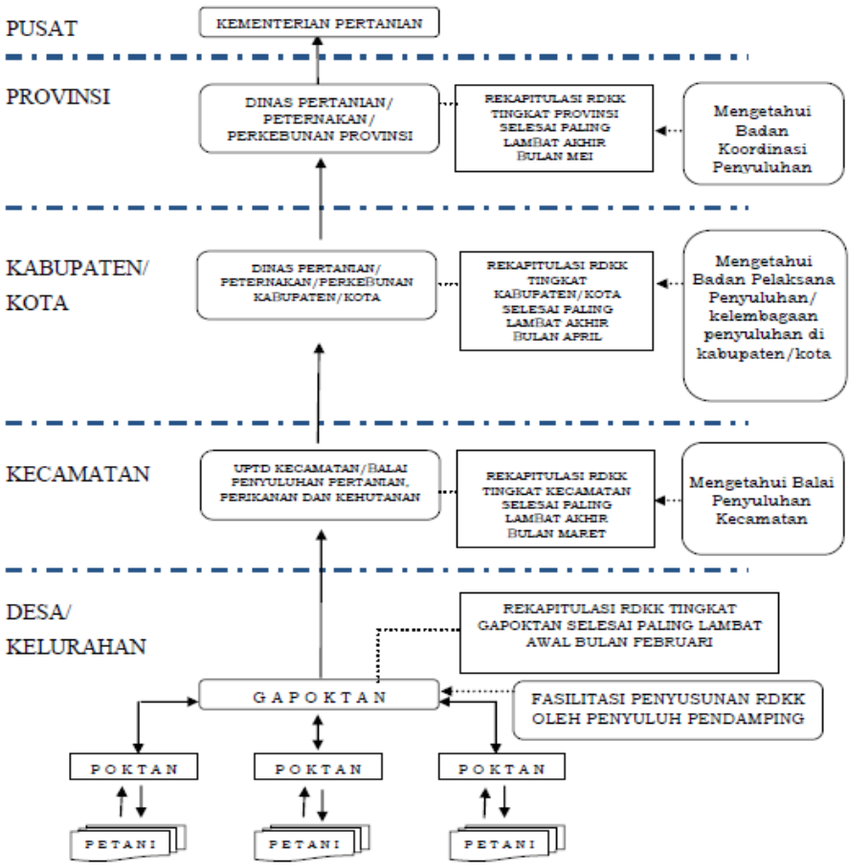

Gambar 3. Pelaksanaan Gerakan RDK DAN RDKK

4. Latihan dan Kunjungan, Supervisi (LAKU SUSI)

Sistem Kerja Latihan, Kunjungan, dan Supervisi yang selanjutnya disebut Sistem Kerja LAKU SUSI adalah pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh yang ditindaklanjuti dengan Kunjungan berupa pendampingan kepada Petani/Poktan secara terjadwal dan didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior serta ketersediaan informasi teknologi sebagai materi Kunjungan.

LAKU SUSI merupakan sistem kerja penyuluhan pertanian untuk mewujudkan petani yang profesional, andal, berkemampuan manajerial, dan kewirausahaan, melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan Petani yang perlu

disesuaikan dengan perkembangan teknologi pertanian, teknologi informasi dan komunikasi, dan kebutuhan pelatihan bagi Petani dan Penyuluh Pertanian. Supervisi pendampingan penyuluh kepada Petani dilakukan oleh pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan/atau Penyuluh Urusan Supervisi (*Supervisor*).

Pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI merupakan kegiatan strategis yang harus dilaksanakan secara terjadwal, teratur, terarah dan berkelanjutan sebagai suatu sistem penyiapan SDM Pertanian menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan. Tujuan sistem Kerja LAKU SUSI bertujuan untuk. memberikan acuan bagi penyelenggara penyuluhan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan LAKU SUSI di Pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Menetapkan prosedur operasional pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI. dan meningkatkan kinerja Penyuluh Pertanian untuk melakukan pengawalan dan pendampingan.

a. Penyelenggaraan Sistem Kerja Latihan Dan Kunjungan

1) Persiapan Penyelenggaraan Latihan dan Kunjungan

   a) Melakukan *review* Programa Penyuluhan Desa dan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dari masing-masing poktan melalui Rembug Tani Desa.

   b) Melakukan inventarisasi masalah dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh poktan dalam pengembangan usaha tani.

   c) Menyusun dan menyepakati jadwal kunjungan penyuluh yang diajukan petani/poktan.

   d) Menyusun materi dan metode yang dibutuhkan petani/pokta sebagai materi kunjungan.

   e) Menyesuaikan antara Rencana Kegiatan Penyuluh Tahunan (RKT) dengan jadwal kunjungan penyuluh yang diajukan oleh petani/ poktan.

f) Koordinator penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) melaksanakan pertemuan penyuluh untuk membahas identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang dihadapi poktan di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP).

g) Melakukan penilaian kesenjangan kemampuan (discrepancy) penyuluh dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi petani/poktan dalam pengembangan usaha taninya.

h) Menetapkan jadwal dan materi latihan bagi penyuluh.

i) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) mengirimkan jadwal dan materi penyuluhan kepada Badan Pelaksana Penyuluhan/kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan latihan yang diperlukan oleh penyuluh di BP3K.

j) Menyusun dan menyepakati jadwal pelaksanaan kunjungan kepada petani/poktan.

2) Pelaksanaan Latihan dan Kunjungan

Dalam Sistem Kerja LAKU, latihan bagi penyuluh pertanian diselenggarakan secara berkala/rutin, terjadwal sekali dalam dua minggu dan berkesinambungan. Tempat latihan di BP3K atau di tempat lain yang disepakati oleh penyuluh pertanian. Proses latihan (belajar-mengajar) difasilitasi oleh penyuluh pertanian yang menguasi materi, maupun narasumber dari instansi/lembaga terkait lainnya, seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, dinas teknis, perguruan tinggi, praktisi, dan lainnya.

3) Mekanisme Sistem Kerja LAKU

a) Jadwal Pelaksanaan Sistem Kerja LAKU

Setiap penyuluh pertanian di WKPP dapat membina 8-16 poktan dan dijadwalkan mengunjungi setiap kelompok minimal sekali dalam dua minggu dengan jadwal sebagai berikut :

Minggu I.

- Penyuluh pertanian di WKPP melakukan kunjungan kepada empat poktan selama empat hari kerja pada minggu I. Kunjungan penyuluh dapat dilakukan ke tempat pertemuan poktan, lapangan dalam rangka pendampingan demonstrasi maupun ke usaha tani anggota poktan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pengembangan usaha.
- Hari ke-5, penyuluh pertanian melakukan pertemuan di BP3K untuk mereview hasil kunjungan ke petani/poktan yang disupervisi oleh Kepala BP3K/supervisor/ koordinator penyuluh tingkat kecamatan.

Minggu II.

- Penyuluh pertanian di WKPP melanjutkan melakukan kunjungan kepada minimal empat poktan selama empat hari pada minggu II.
- Hari ke-5, penyuluh di BP3K mendapatkan pelatihan dari narasumber dari instansi/lembaga terkait lainnya, seperti BPTP, dinas teknis, perguruan tinggi, praktisi, atau pihak lain yang terkait dengan materi yang dibutuhkan oleh penyuluh.
- Pada pelaksanaan pelatihan juga dilakukan supervisi teknis oleh penyuluh senior dan pejabat dari Badan Pelaksana Penyuluhan/ kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota.
- Setiap kunjungan penyuluh ke poktan agar dapat memperoleh umpan balik sebagai bahan diskusi pada kegiatan pertemuan penyuluh di BPK/BP3K.
- Perumusan jadwal latihan dan kunjungan dilakukan secara partisipatif pada pertemuan koordinasi di BPK/BP3K yang dihadiri oleh semua penyuluh dan wakil dari poktan dan Gapoktan.

Jadwal kunjungan penyuluh ke poktan dapat disesuaikan dengen kesepakatan pada rembug tani. Apabila jumlah poktan yang ada di WKPP lebih dari 8 poktan, maka penyuluh dapat melakukan kunjungan lebih dari satu poktan per hari nya.

Apabila ada poktan yang ada di WKPP menjadi pelaksanan kegiatan program tertentu, maka penyuluh dapat menambahkan intensitas waktu kunjungan ke poktan tersebut.

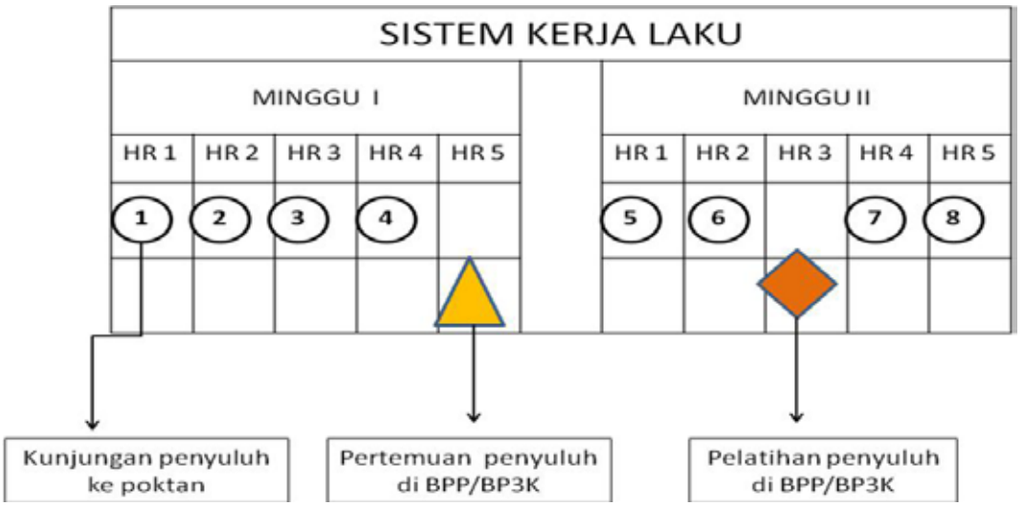

Gambar 4. Contoh jadwal Latihan dan Kunjungan

b) Ruang Lingkup Materi dan metoda

(1) Materi latihan

Latihan penyuluh di BPK/BP3K dilakukan oleh penyuluh senior, peneliti, praktisi maupun petugas dari dinas/instansi yang terkait dengan topik yang telah ditetapkan. Penyuluh senior di BPK/BP3K dapat ditugaskan menjadi penanggung jawab program penyuluhan yang merencanakan pola, materi dan pelaksanaan latihan penyuluh sesuai dengan programa penyuluhan dan hasil identifikasi kebutuhan latihan para penyuluh di wilayah yang bersangkutan.

Materi latihan disesuaikan dengan hasil analisa kesenjangan kemampuan (*discrepancy*) penyuluh dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi poktan dan Gapoktan serta materi lain yang menyangkut pembangunan pertanian, yaitu :

- Pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan wilayah.
- Pengembangan dan penguatan poktan dan Gapoktan.

- Program pembangunan pertanian yang sedang dan akan dikembangkan di desa yang bersangkutan.
- Materi pelatihan dilengkapi dengan bahan ajar dan jadwal pelaksanaan pelatihan.

(2) Materi Kunjungan

Kunjungan penyuluh ke poktan harus tercantum dalam rencana kerja penyuluh, untuk itu dalam setiap kunjungan penyuluh harus mencatat pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakannya pada buku kerja penyuluh yang telah dibagikan, yang mencakup; kegiatan yang dilakukan, masalah yang dihadapi petani, tindak lanjut yang dilakukan oleh poktan maupun penyuluh, dan lain-lain.

Ruang lingkup materi yang disampaikan pada kunjungan penyuluh ke poktan diantaranya.

- Teknologi tepat guna yang membantu poktan dan Gapoktan dalam memecahkan permasalahan usaha taninya.
- Pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan wilayah.
- Pengembangan dan penguatan poktan dan Gapoktan.
- Program pembangunan pertanian yang sedang dan akan dikembangkan di desa yang bersangkutan.

(3) Metoda Latihan dan Kunjungan

Metode latihan dilakukan dengan pendekatan *andragogy*, pemecahan masalah dan dapat dikombinasikan pengamatan langsung dengan memanfaatkan lahan percontohan di BP3K sebagai sarana pembelajaran.

Metoda kunjungan kepada poktan dan Gapoktan dilakukan secara terjadwal sesuai kesepakatan bersama antara penyuluh dengan poktan dan Gapoktan melalui metode anjangsana, pertemuan, diskusi petani untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi pengembangan usaha tani. Kegiatan kunjungan dapat merupakan

bagian dari pelaksanaan kursus, demonstrasi (cara dan hasil) dan sekolah lapangan.

(4) Supervisi dan Pendampingan Penyuluh

i. Supervisi

- Supervisi dilakukan oleh Kepala BP3K bertujuan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh di WKPP sekaligus membantu memecahkan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan di lapangan sebagai pengendalian agar kunjungan terlaksana sesuai jadwal yang direncanakan serta berjalan dengan efektif dan efisien.
- Materi supervisi diperoleh dari laporan yang tercantum dalam buku kerja penyuluh, laporan poktan/Gapoktan atau informasi lainnya yang membutuhkan adanya supervisi dari kepala BPK/BP3K.
- Hasil supervisi disusun sebagai bahan perencanaan kegiatan penyuluhan dalam dua minggu yang akan datang serta sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan kegiatan penyuluhan.
- Hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala BPK/BP3K secara terjadwal dilaporkan kepada Bapeluh sebagai bahan perencanaan fasilitasi yang akan dilakukan oleh penyuluh di kabupaten mapun sebagai bahan untuk disampaikan kepada pihak lain yang dapat memberikan dukungan untuk menjadi narasumber pada pertemuan latihan di BPK/BP3K.

ii. Pendampingan

- Pendampingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kunjungan penyuluh yang dilakukan secara intensif untuk satu kegiatan pioritas yang hasilnya menjadi

indikator pencapaian program pembangunan pertanian, yang meliputi.

- Penerapan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan penerapan rekomendasi untuk komoditas program-program prioritas.
- Pengembangan (peningkatan kelas kemampuan poktan) dan penguatan poktan dan Gapoktan.
- Penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
- Pendampingan dapat dilakukan ditempat petani melakukan usaha tani seperti di sawah, di kebun atau ditempat petani/ poktan berkumpul/ saung.

C. RANGKUMAN

Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Memiliki peran dan fungsi sebagai wahana kerjasama, kelas belajar dan unit produksi. Dengan prinsip prinsip kebebasan, keterbukaan, partisipatif, keswadayaan, kesetaraan, kemitraan. Dalam penumbuhan dilakukan dengan tahapan periapan, pelaksanaan dan proses penumbuhan. Dalam pengembangan kelompok tani diarahkan pada : a) penguatan poktan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri, b) peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis dan c) peningkatan kemampuan poktan dalam menjalankan fungsinya.

Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha, Gapoktan memiliki fungsi dan peran, Unit Usaha Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi, Unit Usaha tani/Produksi, Unit Usaha Pengolahan, Unit Usaha Pemasaran, dan Unit Usaha Keuangan Mikro (simpan-pinjam).

Penumbuhan Gapoktan didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut; Kebebasan, Kepahaman, Partisipatif, Kesukarelaan, Keswakarsaan, Keterpaduan, dan Kemitraan.

Rencana Definitif Kelompok (RDK) adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk satu tahun, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian tentang sumberdaya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian kelompok tani kepada Gapoktan atau lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi.

Sistem Latihan dan Kunjungan serta Supervisi merupakan metode yang dapat dilakukan untuk penumbuhkembangkan kelompok tani dan Gapoktan. Sistem Kerja Latihan, Kunjungan, dan Supervisi yang selanjutnya disebut Sistem Kerja LAKU SUSI adalah pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh yang ditindaklanjuti dengan Kunjungan berupa pendampingan kepada Petani/Poktan secara terjadwal dan didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior serta ketersediaan informasi teknologi sebagai materi Kunjungan.

D. SOAL LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, kerjakanlah latihan soal berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan kelompok tani dan gabungan kelompok tani?
2. Bagaimana proses penumbuhan kelompktani ?
3. Bagiamana proses penumbuhan gabungan kelompok tani ?
4. Bagaimana ciri ciri dari kelompok tani dan gabungan kelompok tani

5. Apakah peran dan fungsi dari kelompok tani ?
6. Apakah fungsi dari gabungan kelompok tani ?
7. Bagaimana usaha untuk pengembangan kelompok tani ?
8. Bagaimana usaha untuk pengembangan gabungan kelompok tani?
9. Bagaimana strategi pengembangan kelembagaan petani yang dimulai dari kelompok tani ?
10. Apakah maksud dari Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif kebutuhan Kelompok (RDKK) ?
11. Bagaimana tahapan penyusunan RDK dan RDKK ?
12. Bagaimana pengorganisasian dalam pengelolaan RDK dan RDKK ?
13. Apakah materi yang dapat disampaikan dalam penyusunan RDK dan RDKK ?
14. Apakah yang dimaksud dengan Latihan dan kunjungan serta superisi dalam rangka penumbuhan kelompok tani dan Gapoktan ?
15. Jelaskan materi dapat disusun untuk sistem latihan dan kunjungan yang dapat disampaikan.
16. Bagaimakah mekanisme sistim latihan dan kunjungan serta supervisi dapat berjalan pada satu wilayah kerja penyuluh pertanian.

E. TUGAS PRAKTIKUM

a. Praktik penumbuhan kelompok tani

1) Mahasiswa membentuk kelompok yang tediri dari 2-4 orang untuk melakukan kegiatan mengidentifikasi suatu daerah pedesaan terhadap kelompok-kelompok sosial yang ada serta berkomunikasi dengan para tokoh masyarakat sebagai tahap persiapan penumbuhan.
2) Melaksanakan proses penumbuhan poktan dengan berdasarkan prinsip-prinsip penumbuhan kelompok tani.
3) Berembug dengan kelompktani hasil penumbuhan (poin 2) untuk menyusun rencana pengembangan yang disepakati untuk dapat dijadikan dilakukan.

4) Hasil dari kegiatan praktek terebut disusun dalam laporan untuk dipresentasikan di dalam kelas serta untuk dapat tukar fikiran dengan sesama mahasiswa serta dosen pengampuh.

5) Penyempurnaan dari presentasi untuk disusun sebagai laporan oleh setiap mahasiswa, dan disampikan kepada dosen pengampu.

b. Praktik penumbuhan Gapoktan

1) Mahasiswa membentuk kelompok yang tediri dari 2-4 orang untuk melakukan kegiatan mengidentifikasi suatu daerah pedesaan terhadap kelompok tani yang ada serta berkomunikasi dengan para pengurus kelompok tani sebagai tahap persiapan penumbuhan Gapoktan.

2) Melaksanakan proses penumbuhan Gapoktan dengan berdasarkan prinsip prinsip penumbuhan Gapoktan.

3) Berembug dengan Gapoktan (poin 2) hasil penumbuhan untuk menyusun rencana pengembangan yang disepakati untuk dapat dijadikan kegiatan.

4) Hasil dari kegiatan praktek terebut disusun dalam laporan untuk dipresentasekan di dalam kelas serta untuk dapat tukar fikiran dengan sesama mahasiswa serta dosen pengampuh.

5) Penyempurnaan dari presentasi untuk disusun sebagai laporan oleh setiap mahasiswa, dan disampikan kepada dosen pengampuh.

c. Praktik penyusunan RDK dan RDKK

1) Mahasiswa membentuk kelompok yang tediri dari 2-4 orang untuk melakukan kegiatan mengidentifikasi kebutuhan kelompok tani untuk suatu kegiatan usaha tani.

2) Bersama kelompok tani mempelajari cara menyusun RDK dan RDKK untuk jangka waktu satu tahun atau setiap musim tanam.

3) Menginput data / informasi yang diperoleh dari rembug bersama anggota kelompok tani kedalam format yang telah ditentukan.

4) Menganalisis dari hasil penginputan sebagai bahan RDK dan RDKK pada kelompok tani yang dijadikan tempat praktik.

5) Hasil dari kegiatan praktek terebut disusun dalam laporan untuk dipresentasekan di dalam kelas serta untuk dapat tukar fikiran dengan sesama mahasiswa serta dosen pengampuh.

6) Penyempurnaan dari presentasi untuk disusun sebagai laporan oleh setiap mahasiswa, dan disampikan kepada dosen pengampuh.

d. Praktik Penyusunan Kegiatan latihan kunjungan dan supervisi

1) Mahasiswa mengdentifikasi suatu wiyalah kerja penyuluh pertanian yang terdapat lebih dari 8 kelompok taninya.

2) Identitifikasi kebutuhan materi yang diperlukan setiap kelompok.

3) Hasil dari kebutuhan materi kelompok dijadikan untuk bahan penyusunan pelatihan dan kunjungan.

4) Buatlah jadwal latihan dan kunjungan untuk wilayah kerja penyuluh pertanian.

5) Hasil dari kegiatan praktek terebut disusun dalam laporan untuk dipresentasekan di dalam kelas serta untuk dapat tukar fikiran dengan sesama mahasiswa serta dosen pengampuh.

6) Penyempurnaan dari presentasi untuk disusun sebagai laporan oleh setiap mahasiswa, dan disampikan kepada dosen pengampuh.

F. SUMBER INFORMASI DAN REFERENSI

Kementerian Pertanian, 2013. *Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani*. Kementerian Pertanian. Jakarta.

Kementerian Pertanian, 2016. *Pembinaan Kelembagaan Petani*. Kementerian Pertanian RI. Jakarta.

Mardikanto, T 2012. *Sistem Penyuluhan Pertanian*, UNS Press. Solo.

Kementerian Pertanian, 2009. *Metode Penyuluhan Pertanian*. Kementarian Pertanian.

Syamsiah, 2000. *Pembinaan Kelompok Tani*. Universitas Terbuka. Jakarta.

BAB VI.

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI (KEP)

A. PENGANTAR MATERI

1. Deskripsi Singkat

Bab VI ini memberikan informasi gambaran tentang ruang lingkup penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani serta membekali mahasiswa untuk menguasai kompetensi dalam mengidentifikasi, mempertunjukkan, menumbuhkan dan mengembangkan dengan mempelajari: 1) Penumbuhan kelembangan ekonomi petani, 2) Pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

2. Manfaat Pembelajaran

Fungsi pembelajaran adalah agar tercapainya tujuan belajar, yaitu terjadinya perubahan dalam diri seseorang ke arah yang positif dan terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.

Setelah mahasiswa melalui proses pembelajaran pada bab ini diharapkan dapat membentuk kemampuan intelektual, berfikir kritis dan munculnya kreatifitas serta perubahan perilaku atau pribadinya berdasarkan praktik atau pengalaman belajar tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

3. Capaian Pembelajaran (CP Sub Mata Kuliah/Materi Pokok Bahasan)

Mahasiswa mampu dalam mengidentifikasi, memilih, mengambil keputusan dan menguasai kompetensi tentang : 1) Penumbuhan kelembangan ekonomi petani, dan 2) Pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Penguasaan kompetensi ini sebagai dasar untuk menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani dalam wilayah kerja penyuluh pertanian.

4. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan pada bab ini sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan agar mahasiswa dapat memiliki

kompetensi sub pokok bahasan ini. Dengan demikian metode yang digunakan berupa :

a. Discovery Learning yaitu mencari dan mengumpulkan informasi deskripsi pengetahuan tentang penumbuhan kelembagaan Petani.
b. Contextual Instruction yaitu membahas teori kaitannya situasi nyata dan melakukan studi lapang/terjun di dunia nyata.
c. Cooperative learning yaitu membahas masalah penumbuhan kelembagaan ekonom petani secara berkelompok.
d. Small Group Discussion yaitu Membentuk kelompok kecil, memilih bahan sub pokok bahasan, diskusi dan presentasi.

B. MATERI PEMBELAJARAN

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam rangka mengembangkan penyuluhan pertanian yang dihela pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan. Dengan adanya model ini diharapkan dapat diperoleh alternatif pemberdayaan petani dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh petani secara profesional di sektor pertanian. Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani bertujuan : 1) Meningkatkan jumlah kelembagaan ekonomi petani yang tumbuh dari kelembagaan petani (poktan/ gapoktan), 2) Meningkatkan pengembangan kegiatan usaha agribisnis yang dilakukan oleh kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan daerah sesuai potensi wilayah, 3) Meningkatkan kinerja pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani, dan 4) Strategi yang ditempuh dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani, sebagai berikut:

Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani

a. Identifikasi kelembagaan petani (poktan/kelompok wanita tani/gapoktan) sebagai calon pelaksana.

b. Peningkatan kemampuan kelembagaan petani dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif yang dilakukan melalui pelaksanaan rembug tani.

c. Fasilitasi pengembangan organisasi petani oleh Tim Pengembangan Organisasi Petani (TPOP).

d. Pembelajaran peningkatan kapasitas kelembagaan petani.

Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)

a. Identifikasi kelembagaan ekonomi petani yang telah tumbuh untuk dikembangkan kualitas usahanya (skala usaha, pengembangan komoditas unggulan, jaringan dan kemitraan usaha).

b. Pertemuan rencana pengembangan usaha.

c. Pembelajaran dalam upaya pengembangan kualitas usaha (antara lain: penyusunan bisnis plan, diversifikasi produk, perbaikan pasca panen dan pengolahan hasil, dan lain-lain).

1. Kriteria Umum Penumbuhan dan Pengembagan KEP

Kriteria umum bagi kelembagaan petani yang akan membentuk kelembagaan ekonomi petani, sebagai berikut:

a. Telah melakukan kegiatan usaha berkelompok yang berorientasi pasar.

b. Struktur organisasi kelembagaan petani telah memiliki kepengurusan yang melakukan kegiatan usaha atau unit usaha agribisnis.

c. Memiliki perencanaan usaha yang disusun secara partisipatif dalam kurun waktu atau siklus usaha tertentu.

d. Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha.

e. Telah membangun jejaring dalam pengembangan usaha dengan kelembagaan petani lainnya.

f. Telah membangun kemitraan usaha dengan pengusaha atau kelembagaan ekonomi petani lainnya.

g. Membutuhkan dukungan aspek legal formal untuk memperkuat pengembangan usaha.

2. Sasaran

a. Penumbuhan

i. Kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang telah melakukan kegiatan usaha berbasis komoditas unggulan.

ii. Diutamakan pada poktan/gapoktan yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi tujuh komoditas unggulan.

iii. Minimal 20% KEP ditumbuhkan dari usaha yang dikelola oleh perempuan (Kelompok wanita tani/KWT).

b. Pengembangan

i. Kelembagaan ekonomi petani, baik yang belum berbadan hukum (KUB, LKMA) maupun telah berbadan hukum (koperasi/PT).

ii. Diutamakan pada kelembagaan ekonomi petani yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi tujuh komoditas unggulan.

Pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani dilakukan pada sasaran yang berbeda. Pelaksana/ sasaran kegiatan penumbuhan tidak dapat sekaligus difasilitasi untuk kegiatan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

c. Persiapan

1) Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani.

Bimbingan teknis penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat untuk menyamakan persepsi, koordinasi dan sinergitas dalam rangka

menyusun rencana kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

Tujuan :

Melakukan sinkronisasi kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani melalui kegiatan Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/ kota.

a) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

b) Mendiskusikan hasil pendataan kelembagaan petani yang akan ditumbuhkan menjadi kelembagaan ekonomi petani dan kelembagaan ekonomi petani yang telah tumbuh serta berpeluang untuk ditingkatkan kapasitasnya dalam mengembangkan agribisnis komoditas unggulan.

c) Menyusun dan menyepakati matrik kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

2) Sosialisasi Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).

Sosialisasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi untuk menyamakan persepsi, koordinasi dan sinergitas dalam rangka menyusun rencana kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

Tujuan :

a) Melakukan sinkronisasi kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani melalui kegiatan Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan di kabupaten/kota.

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

c) Mendiskusikan hasil pendataan kelembagaan petani yang akan ditumbuhkan menjadi kelembagaan ekonomi petani dan kelembagaan ekonomi petani yang telah tumbuh serta berpeluang untuk ditingkatkan kapasitasnya dalam mengembangkan agribisnis komoditas unggulan.

3) Menyusun dan menyepakati matrik kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

3. Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani

Kegiatan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani dilakukan melalui langkah/tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi kelembagaan petani calon kelembagaan ekonomi petani

Identifikasi ini bertujuan untuk menyusun daftar dan profil kelembagaan petani yang akan memperoleh fasilitasi dalam penumbuhan menjadi kelembagaan ekonomi petani. Adapun langkah-langkah identifikasi adalah sebagai berikut:

1) Identifikasi kelembagaan petani baik poktan dan gapoktan yang telah berorientasi agribisnis berdasarkan tujuh kriteria umum.

2) Hasil identifikasi tersebut dipergunakan sebagai bahan pertemuan perencanaan pada rembug tani di kecamatan.

3) Metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi yaitu: a) analisa data kelembagaan petani di kecamatan (BPP), dan b) kunjungan untuk verifikasi data kepada calon kelembagaan ekonomi petani.

Keluaran :

i. Tersedianya daftar dan profil calon kelembagaan ekonomi petani yang akan ditumbuhkan.

ii. Diketahuinya kebutuhan materi pembelajaran yang diperlukan oleh masing-masing sasaran/ pelaku kegiatan.

b. Rembug Tani

Rembug tani merupakan pertemuan diantara anggota calon kelembagaan ekonomi petani untuk membahas dan mengambil kesepakatan yang menyangkut pengembangan kelembagaan maupun usaha.

Topik yang dibahas dalam rembug tani sesuai dengan hasil identifikasi kegiatan penumbuhan yang diperlukan oleh masing-masing sasaran/ pelaku, diantaranya sebagai berikut:

1) Pengenalan bentuk kelembagaan ekonomi petani.
   a) Manfaat penumbuhan kelembagaan ekonomi petani
   b) Bentuk organisasi/badan usaha/badan hukum yang akan ditumbuhkan, misalnya:
2) Kelembagaan yang akan dibentuk berupa kelompok usaha bersama (KUB), maka perlu disepakati adanya kegiatan dengan jenis usaha yang sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
3) Kelembagaan yang akan dibentuk berupa koperasi tani (koptan), maka perlu disepakati adanya kegiatan usaha agribisnis dengan menerapkan azas dan prinsip koperasi.
4) Kegiatan rembug tani dapat dilakukan sesuai dengan jadwal kunjungan penyuluh ke poktan/ gapoktan, dengan topik diantaranya :
   a) Review materi serta metode fasilitasi oleh fasilitator pada pembelajaran dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan petani menjadi kelembagan ekonomi petani;
   b) Menyepakati proses rencana pembentukan kelembagaan ekonomi petani;
   c) Menyusun struktur organisasi dan penyiapan kelengkapan administrasi dalam pembentukan kelembagaan ekonomi petani termasuk penyusunan draf AD/ART;
   d) Menyusun rencana pengembangan usaha;
   e) Evaluasi proses penumbuhan kelembagaan ekonomi petani.

c. Fasilitasi Pengembangan Organisasi Petani oleh Tim Pengembangan Organisasi Petani (TPOP)

Fasilitasi penumbuhan kelembagaan ekonomi dilaksanakan oleh TPOP yang terdiri dari 2–3 orang Penyuluh Pertanian dan/atau petugas teknis dari Bapeluh/BP4K/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan tingkat kabupaten dengan tugas mengembangkan organisasi/kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

Fasilitasi pengembangan organisasi petani merupakan kegiatan yang melekat dengan fungsi Bapeluh/BP4K/ Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten sehingga pelaksanaannya dilakukan secara rutin.

Kegiatan fasilitasi TPOP melalui Dana Dekonsentrasi berupa anggaran yang dapat digunakan untuk konsumsi, pertemuan, honorarium, penggandaan bahan, dan fotocopy sesuai dengan kebutuhan. Diharapkan kegiatan fasilitasi TPOP mendapat dukungan dari dana APBD.

Fasilitasi TPOP dapat dilaksanakan dalam bentuk kunjungan lapangan dan pertemuan oleh TPOP, dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Identifikasi calon KEP yang ditumbuhkan dari poktan/gapoktan yang berorientasi agribisnis, maupun organisasi petani lainnya yang telah ada di kabupaten/kota.
2) Fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas organisasi petani dalam manajemen organisasi dan usaha.
3) Bimbingan dan pendampingan untuk penumbuhan dan pengembangan KEP.
4) Memfasilitasi calon KEP dalam penyusunan draf AD/ART serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
5) Membantu untuk menghubungkan dengan mitra usaha atau kelembagaan yang dapat menyediakan sumberdaya lainnya (teknologi, permodalan, pemasaran, dan lain-lain).

6) Keluaran Tumbuhnya kelembagaan ekonomi petani yang berasal dari kelembagaan petani. Profil dan kinerja hasil penumbuhan kelembagaan ekonomi petani.

4. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani

Fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi petani dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan ekonomi petani yang sudah tumbuh agar menjadi kuat dan mandiri. Sasaran atau pelaku kegiatan pengembangan kelembagaan ekonomi ditetapkan dari hasil identifikasi yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan identifikasi sasaran/pelaku kegiatan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani.

Kelembagaan Ekonomi Petani yang dikembangkan ini dapat berbentuk kelompok usaha bersama (KUB), koperasi petani (koptan) maupun BUMP yang sudah melakukan kegiatan usaha namun masih memerlukan peningkatan dalam manajemen usaha dan tata kelola organisasi.

a. Pertemuan Rencana Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (usaha/ manajerial/ kelembagaan)

Pertemuan rencana pengembangan kelembagaan ekonomi petani difasilitasi oleh TPOP bersama-sama dengan pengurus atau pengelola kelembagaan ekonomi petani yang akan ditingkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan usahanya.

Topik/materi yang dibahas dalam kegiatan ini, antara lain:

1) Evaluasi Pelaksanaan Usahatani

Mengevaluasi kegiatan usaha yang sudah dilakukan dan sedang berlangsung, meliputi :

a) Identifikasi potensi pasar guna menelaah kesesuaian produk yang dihasilkan dengan kebutuhan dan permintaan pasar.

b) Identifikasi peluang peningkatan teknologi pengolahan, pengemasan hasil yang ramah lingkungan dengan membantu

petani menghubungkan dengan lembaga atau instansi terkait selaku penyedia layanan petani dalam pengembangan agribisnis (*external service provider*).

2) Identifikasi jejaring dan kemitraan usaha kelembagaan ekonomi petani dengan poktan, gapoktan, asosiasi petani, atau dengan pihak luar penyedia layanan luar (BPTP, BPSB, Koperasi, PT, swasta).

3) Penyusunan rencana pengembangan jejaring dan kemitraan usaha serta perumusan kesepakatan kemitraan (MOU) dengan calon mitra.

4) Penyusunan rencana pembelajaran pengembangan KEP.

b. Pembelajaran dalam rangka pengembangan agribisnis komoditi unggulan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani

1) Tujuan Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi petani dalam membangun jejaring dan kemitraan usaha serta pelayanan informasi. meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi petani dalam pengembangan kawasan agribisnis komoditi unggulan.

2) Keluaran Berkembangnya kegiatan agribisnis komoditi unggulan kelembagaan ekonomi petani melalui jejaring dan kemitraan usaha.

3) Materi pembelajaran

Materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan petani dalam mengembangkan usaha dan menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani, dengan fokus antara lain sebagai berikut:

a) Perencanaan usaha yang berorientasi pasar/pembuatan bisnis plan.

b) Analisis rantai nilai dan pasokan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk.

c) Pengorganisasian kegiatan usahatani atau unit- unit usaha agribisnis.

d) Pengembangan skala usaha, jejaring kerjasama dan kemitraan usaha.

e) Pengembangan pelayanan informasi usaha.

4) Metode

Metode pembelajaran pengembangan agribisnis komoditi unggulan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani diantaranya pemaparan, diskusi dan menggali pengalaman peserta secara partisipatif.

Fasilitator/narasumber berasal dari pengurus/ pengelola kelembagaan ekonomi petani yang berhasil mengembangkan agribisnis komoditas unggulan. Apabila memungkinkan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di kelembagaan ekonomi petani yang telah berhasil.

5. Istilah-Istilah dalam Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani

a. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan petani dalam bentuk poktan dan gapoktan.

b. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/ pekebun yang dibentuk oleh petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

c. Gabungan kelompok tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja- sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

d. Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kumpulan beberapa kelompok tani/gapoktan yang bergabung dan bekerjasama dengan jenis komoditas usaha yang sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha seperti produksi, pasca panen dan pengolahan hasil serta jasa (keuangan, alsintan, dan lain-lain).

e. Kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki

kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuh- kembangkan oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha.

f. Korporasi adalah kelembagaan formal yang terbentuk dari kumpulan kapital yang dimiliki oleh petani dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen usaha yang berorientasi keuntungan berupa Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang berbentuk koperasi tani (koptan) atau Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya dimiliki oleh petani;

g. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah lembaga keuangan mikro yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh petani/masyarakat tani di perdesaan yang melaksanakan fungsi pelayanan kredit/pembiayaan dan simpanan di lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis;

h. Badan Usaha Milik Petani (BUMP) adalah kelembagaan usaha berbadan hukum yang mensinergikan kegiatan bisnis dengan pemberdayaan masyarakat tani yang dijalankan secara korporasi yang berorientasi keuntungan untuk mendorong kemandirian petani;

i. Badan Usaha Milik Petani berbentuk Koperasi Tani (Koptan) adalah badan usaha yang beranggotakan petani baik secara individu maupun yang tergabung dalam poktan dan gapoktan yang melakukan kegiatan usaha agribisnis berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi petani yang berdasarkan azas kekeluargaan sesuai Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992;

j. Badan Usaha Milik Petani berbentuk Perseroan Terbatas (PT) adalah wadah petani yang didirikan berdasarkan perjanjian dan berbadan hukum untuk menjalankan usaha pertanian secara korporasi dalam bentuk perusahaan dengan modal dasar yang terbagi dalam saham sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);

k. Tim Pengembangan Organisasi Petani (TPOP) adalah tim yang terdiri dari petugas teknis/penyuluh pada kelembagaan penyuluhan di kabupaten/ kota yang ditugaskan untuk mengembangkan organisasi/ kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;

l. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu: a) subsistem sarana prasarana, yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian; b) subsistem budidaya pertanian primer, yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu; c) subsistem pengolahan, yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian; dan d) subsistem penunjang, yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi, penyuluhan dan lain-lain.

C. RANGKUMAN

Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani bertujuan : 1) Meningkatkan jumlah kelembagaan ekonomi petani yang tumbuh dari kelembagaan petani (poktan/ gapoktan), 2) Meningkatkan pengembangan kegiatan usaha agribisnis yang dilakukan oleh kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan daerah sesuai potensi wilayah, dan 3) Meningkatkan kinerja pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

Dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani diperlukan strategi, kriteria yang sasaran berasal dari kelompok tani atau gapoktan. Kelembagaan ekonomi petani diarah dalam bentuk KUB, Koperasi Petani, BUMP, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis. Dalam penumbuhan pengembangan diawali dengan persipan, pelaksanaan dengan menggunakan berbagai macam metode penyuluhan dianataranya rembug tani, diskusi dan partisipatif.

D. SOAL LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai penumbuhkembangan kelembagaan ekonomi petani, kerjakanlah latihan soal berikut ini:

1. Apakah yang dimaksud dengan kelembagaan ekonomi petani ?
2. Apakah kriteria dalam penumbuhan kelembagaan ekonomi petani ?
3. Apakah tujuan dari penumbuhan dan pengembang kelembagaan ekonomi petani ?

4. Jelaskan persiapan dalam penumbuhan kelembagaan ekonomi petani!
5. Apakah jenis kelembagaan ekonomi petani yang dapat dibentuk oleh para petani!
6. Jelaskan langkah langkah didalam penumbuhan kelembagaan ekonomi petani!
7. Jelaskan langkah langkah untuk pengembangan kelembagaan ekonomi petani!

E. TUGAS PRAKTIKUM

1. Praktik Case Studi Pustaka

a. Lakukan studi pustaka atau penelusuran jurnal terkait penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani yang dipandang memungkinkan dan relevan untuk dikembangkan.

b. Review hasil penelusuran jurnal tersebut dan presentasikan secara berkelompok.

2. Praktik penumbuhan kelembagaan ekonomi petani

a. Mahasiswa membentuk kelompok yang tediri dari 2-4 orang untuk melakukan kegiatan mengidentifikasi suatu daerah perdesaan terhadap kelompok tani/ gapoktan berkomunikasi dengan para pengurus sebagai tahap persiapan penumbuhan.

b. Melaksanakan proses penumbuhan dengan berdasarkan kriteria persyaratan untuk penumbuhan kelembagaan ekonomi petani.

c. Selengarakan rembug tani dengan kelompk tani /gapoktan untuk menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani serta menyusun rencana pengembangan yang disepakati untuk dapat dilaksanakan.

d. Hasil dari kegiatan praktek terebut disusun dalam laporan untuk dipresentasekan di dalam kelas serta untuk dapat tukar fikiran dengan sesama mahasiswa serta dosen pengampuh.

e. Penyempurnaan dari presentasi untuk disusun sebagai laporan oleh setiap mahasiswa, dan disampikan kepada dosen pengampuh.

F. SUMBER INFORMASI DAN REFERENSI

Kementerian Pertanian, 2016. *Pembinaan Kelembagaan Petani*. Kementerian Pertanian RI. Jakarta.

Kementerian Pertanian, 2016. *Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani*. Kementerian Pertanian RI. Jakarta.

Kementerian Pertanian, 2009. *Metode Penyuluhan Pertanian*. Kementarian Pertanian.

Mardikanto, T 2012. Sistem Penyuluhan Pertanian, UNS Press. Solo.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah dan Purwanto, 2006. Dinamika Kelompok. Refika Aditama. Bandung.

Agus Purbathin Hadi, 2000. *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam* Pembangunan. Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA).

Arturo Israel, 1987. Institutional Development; Incentives To Performance. Published for the World Bank by Johns Hopkins University Press, London, 1987,214 pp.

Beard, Victoria A. and Aniruddha Dasgupta, 2006 Collective Action and Community-driven Development in Rural and Urban Indonesia. Urban Studies, Vol. 43, No. 9, 1451–1468, August 2006. Sage Publication and Urban Studies Journal Limited.

Brayden King, 2008. A Social Movement Perspective of Stakeholder Collective Action and Influence. Sage Publication and International Association for Business and Society.http://bas.sagepub.com. 2008.

Christiaan Grootaert, 2001. Does Social Capital Help the Poor?: A Synthesis of Findings from the Local Level Institutions Studies in Bolivia, Burkina Faso and Indonesia. The World Bank: Social Development Family Environmentally and Socially Sustainable Development Network. Local Level Institutions Working Paper No. 10, June 2001.

Darmawan Salman, 2009. Kerangka Community Development Untuk Pengelolaan Social Forestry. Web Percik Pemikiran. Post : 10 Mei 2009. http://darmawansalman.blogspot.co.id/2009/05/ kerangka-community-development-untuk.html.

Elizabeth R dan Darwis V., 2003. *Karakteristik Petani Miskin dan Persepsinya* Terhadap Program JPS di Propinsi Jawa Timur. Tahun 2003. SOCA. Bali.

Elizabeth, R dan Anugrah IS., 2010. Kelembagaan Ekonomi pada Komunitas Petani Sayuran di Provinsi Bali. Prosiding Seminar Nasional. PESKP. Bogor. Tahun 2010.

Faisal Basri, 2005. *Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah*. Universitas

Brawijaya, Malang. (http://128.8.56.108/iris-data/PEG/Bahasa/malang/Malangtantangan. pdf., 22 Maret 2005).

Hayami dan Kikuchi, 1987. *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi* terhadap *Perubahan Kelembagaan di Asia*, Editor: Gunawan Wiradi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1987.

Hermanto R., 2007 *Rancangan Kelembagaan Petani Dalam Implementasi Prima Tani* Di Provinsi Sumatera Selatan. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 2, Juni 2007 : 110-125.

Jochen Gottwald, 2003. Is rational choice the best choice for understanding the peasant?: A constructivist reading of the Rational Choice Controversy. 2003.

Jon Hellin, Mark Lundy; and Madelon Meijer., 2007. Farmer Organization, Collective Action and Market Access in Meso-America. Capri Working Paper No. 67 • October 2007. Research Workshop on Collective Action and Market Access for Smallholders. October 2-5, 2006 - Cali, Colombia. International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington. 2007.

Jose R Molinas, 1998. Who Cooperates?: A Study of Membership in Peasant Cooperatives. Instituto Desarrollo. Asunción, Paraguay. 2005. Paper prepared for the XXI International Congress of the Latin American Studies Association, Chicago, IL, September 24-26, 1998. Universidad Católica Asunción, Paraguay e-mail: jmolinas@infonet.com.py.

Kementerian Pertanian, 2013 Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani. Kementerian pertanian RI. Jakarta. Tahun 2013.

Kementerian Pertanian, 2015. Pedoman Teknis Pemberdayaan Kelompok tani di Lokasi Sentra Pangan. Pusat Penyuluhan Pertanian. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Jakarta. Tahun 2015.

Kementerian Pertanian, 2016 Permentan No. 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Jakarta. Tahun 2016.

Kementerian Pertanian, 2006 *Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian,* Perikanan dan Kehutanan, Nomor 16. Tahun 2006. Jakarta Tahun 2006.

Lone B Badstue. Mauricio R. Bellon; Julien Berthaud; Xo chitl Juarez; Irma Manuel

Rosas; Ana Marıa Solano; and Alejandro Ramırez. 2006. ”Examining the Role of Collective Action in an Informal Seed System: A Case Study from the CentralValleysof Oaxaca, Mexico”. Human Ecology, Vol. 34, No. 2, April 2006.

Mardikanto T., 1999. Penyuluhan Pembangunan. UNS Press. Solo Tahun 1999.

Mardikanto T., 2009. System Penyuluhan Pertanian. UNS Press. Solo Tahun 2009.

Mardikanto T., 2009. B.U.M.P. Badan Usaha Milik Petani. *Sebuah Inovasi Kelembagaan Untuk Pengembangan Ekonomi Perdesaan*. Diterbitkan atas kerjasama FACILITATOR dan PT. GAPOKTAN FACILITATOR SEJAHTERA. Sukoharjo-Solo. Tahun 2009.

Mardikanto, T., 2010 Model- Model Perberdayaan Masyarakat. UNS Press. Solo Tahun 2010.

Michael R. Dove, 1986. Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi. Yayasan Obor Indonesia . Tahun 1986.Norman Uphoff, 1986. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases. Kumarian Press, Cornell University, USA. 1986.

Norman Uphoff. Local Institutions and Participation for Sustainable Development. Gatekeeper Series SA31. IIED, London. 1992.

Payne, M., 1997. Modern Social Work Theory. Second Edition. McMilan Press Ltd. London. Tahun 1997.

Peter Davis, 2009. Everyday Forms of Collective Action in Bangladesh: Learning from Fifteen Cases. CAPRi Working Paper No. 94. International Food Policy Research Institute: Washington,DC. 2009.

Phil Simmons, 2002. Overview of Smallholder Contract Farming in Developing Countries. ESA Working Paper No. 02-04. Agricultural and Development Economics Division The Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Richard W. Scott, 2008. Institutions and Organizations: Ideas an Interest. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage Publication. Third Edition. 266 hal. 2008.

Richard W. Scott, 1995. Institutions and OrganizationsFoundations for Organizational

Science:Foundations for Organizational Science. A Sage Publications Series. Sage Publications, Inc. 1995.

Rosganda Elizabeth, 2007. Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. PUSLITBANGTAN.

Satyawan Sunito dan Saharuddin, 2001. Farmer Organizations in Upland Natural Resource Management in Indonesia. Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 29. This report is part of the ASB Project in Indonesia. The Asian Development Bank, under RETA 5711, financially supported this specific work. Tahun 2001.

Syahyuti, 2007. *Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)* Sebagai Kelembagaan Ekonomi Di Perdesaan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian Jl A. Yani No. 70 Bogor 16161. Tahun 2007.

Syahyuti, 2012. Rekonseptualisasi Lembaga dan Organisasi untuk Teori dan Praktek *Penyuluhan Pertanian Yang Lebih Efektif.* Makalah Pertemuan Nasional Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Indonesia, di Universitas Padjajaran tanggal 25-26 Januari 2012.

Syahyuti, 2007. *Strategi dan Tantangan Dalam Pengembangan Gabungan Kelompok tani (GAPOKTAN) sebagai Kelembagaan Ekonomi di* Perdesaan. Kelembagaan DAS. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Jl A. Yani 70 Bogor. Tahun 2007.

Syamsiah, 2000. Pembinaan kelompok tani . Universitas Terbuka. Jakarta. Tahun 2000.

Taufik Tanasaldy, 2007. Politik Identitas Etnis Di Kalimantan Barat, Politik Local Di Indonesia, KITLV-Jakarta, pp. 461-490. 2007.

Walter W. Powell, Paul J. DiMaggio. 1991. The New Institutionalism in Organizational Analysis. University of Chicago Press, Oct 25, 1991.

Victor Nee, 2005. The New Institutionalism in Economics and Sociology. Dalam: *The Handbook of Economic Sociology*. 2nd ed. Niel J. Smelser dan Richard Swedberg (eds.) Princeton University Press. 2005.

Lampiran 1. Form RDK, Rekapitulasi RDK, RDKK, Rekapitulasi RDKK, dan RDKK Pupuk Bersubsidi

Format 1

RENCANA DEFINITIF KELOMPOK TANI (RDK)
TAHUN .....

I DATA KELOMPOK TANI

1	Nama Poktan	:	.....
2	Tanggal berdiri	:	.....
3	Alamat/Telpon/Email	:	.....
		:	.....
4	Nama Ketua/No. HP	:	.....
5	Kelas Kemampuan Poktan	:	.....
6	Jumlah Anggota	:	..... orang (Laki-laki: ..... orang; Perempuan: ..... orang)
7	Nama Penyuluh Pendamping	:	.....
	No. HP	:	.....

II POTENSI SUMBERDAYA DAN ASET POKTAN

A. Potensi Sumberdaya Poktan

No	Potensi		Luas/Jumlah
1	Luas Lahan Sawah:		
	Jenis Irigasi:		
	a. Teknis	(ha)	
	b. Non Teknis	(ha)	
2	Luas Lahan Kering	(ha)	
3	Luas Pekarangan	(ha)	
4	Luas Kebun:		
	a. Komoditas perkebunan	(ha)	
	b. Buah	(ha)	
	c. Sayuran	(ha)	
	d. Tanaman Hias	(ha)	
	e. Tanaman Obat	(ha)	
5	Ternak:		
	a. Sapi/Kerbau	(ekor)	
	b. Kambing/domba	(ekor)	
	c. Unggas	(ekor)	

B. **Aset Poktan**

No	A s e t	Jumlah	Sumber
1	Sekretariat		
2	Perlengkapan sekretariat (meja, kursi, komputer, dll)		
3	Buku-buku administrasi		
4	Alat dan mesin pertanian		
5	Lain-lain		

III SASARAN PRODUKTIVITAS

A Sasaran Produktivitas dan Pola Usaha :

No	Komoditas	Tahun sebelumnya		Tahun Berjalan		Teknologi yang akan digunakan	Pola Tanam/ Pola Usahatani
		Areal/ Jumlah	Produktivitas rata-rata	Areal	Produktivitas rata-rata		
		ha/ekor	kw/ha	ha/ekor	kw/ha		
A.	Tanaman Pangan						
B.	Hortikultura						
C.	Perkebunan						
D.	Peternakan						

B Rencana Tanam/Usahatani dan Kebutuhan Sarana Produksi Kelompok Tani

No	Sub Sektor/ Komoditas	MT I										
		Luas Tanam (ha)	Kebutuhan Sarana Produksi									Rencana Tanam (bulan)
			Benih (kg)	Urea (kg)	SP36 (kg)	ZA (kg)	NPK (kg)	Organik (kg)	Pestisida (kg atau ltr)	Alsintan (unit)	Sumber Permodalan (Rp)	
1	Tanaman Pangan											
2	Hortikultura											
3	Perkebunan											

No	Sub Sektor/ Komoditas	MT I										
		Luas Tanam (ha)	Kebutuhan Sarana Produksi									Rencana Tanam (bulan)
			Benih (kg)	Urea (kg)	SP36 (kg)	ZA (kg)	NPK (kg)	Organik (kg)	Pestisida (kg atau ltr)	Alsintan (unit)	Sumber Permodalan (Rp)	
1	Tanaman Pangan											
2	Hortikultura											
3	Perkebunan											

No	Sub Sektor/ Komoditas	MT I										
		Luas Tanam (ha)	Kebutuhan Sarana Produksi									Rencana Tanam (bulan)
			Benih (kg)	Urea (kg)	SP36 (kg)	ZA (kg)	NPK (kg)	Organik (kg)	Pestisida (kg atau ltr)	Alsintan (unit)	Sumber Permodalan (Rp)	
1	Tanaman Pangan											
2	Hortikultura											
3	Perkebunan											

No	Sub Sektor/ Komoditas	J U M L A H										
		Luas Tanam (ha)	Kebutuhan Sarana Produksi									Rencana Tanam (bulan)
			Benih (kg)	Urea (kg)	SP36 (kg)	ZA (kg)	NPK (kg)	Organik (kg)	Pestisida (kg atau ltr)	Alsintan (unit)	Sumber Permodalan (Rp)	
1	Tanaman Pangan											
2	Hortikultura											
3	Perkebunan											

4 Peternakan

No	Jenis Ternak	Jumlah Ternak	Jenis Sarana produksi Yang Dibutuhkan																		Total Biaya
			Bibit		Pakan		Obat/ Vaksin		Kandang		Hijauan Makanan Ternak										
											Urea		SP36		ZA		NPK		Organik		
			ekor	Rp	Kg	Rp	Vol	Rp	Unit	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	

IV KESEPAKATAN POLA TANAM/POLA USAHATANI

No	Komoditas	Areal (ha) / Populasi (ekor)	Sasaran Produktivitas (kw/ha) / ekor	Pola Tanam/Pola Usahatani/Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Tanaman Pangan														
A	Lahan Sawah														
	- Padi														
	- Palawija (sebutkan)														
B	Lahan Kering														
	- Padi Gogo														
	- Palawija (sebutkan)														
II	Hortikultura														
III	Perkebunan														
IV	Peternakan														

V RENCANA KEGIATAN KELOMPOK TANI

No	Kegiatan/Gerakan	Bulan												Penanggung Jawab
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penyusunan RDK													
2	Penyusunan RDKK													
3	Penyampaian RDKK													
4	Persiapan Usahatani													
	- Pengadaan saprodi													
	- Perbaikan saluran irigasi/drainase													
5	Pembiayaan Usahatani													
	- Pengajuan Kredit													
	- Pemupukan modal anggota													
	- Pengembalian kredit													
	- Fasilitasi pembiayaan lainnya													
6	Kegiatan Produksi													
	- Pengolahan tanah													
	- Pesemaian/Pembibitan													
	- Penanaman													
	- Pemupukan													
	- Pemeliharaan													
	- Panen													
7	Pasca Panen													
	- Pengolahan hasil													
	- Pemasaran													
8	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani													
	- Pertemuan rutin poktan													
	- Kursus tani/Sekolah Lapang													
	- Demplot/demfarm													

No	Kegiatan/Gerakan	Bulan												Penanggung Jawab
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	- Penilaian kelas kelompok tani													
9	Lain-lain													

....., ...

Disetujui:
Penyuluh Pertanian Pendamping

Ketua Kelompok Tani

(.....)

(.....)

REKAPITULASI RENCANA DEFINITIF KELOMPOKTANI (RDK)

TAHUN.....

DESA/KELURAHAN .....

I DATA GAPOKTAN

1 Nama Gapoktan : .....

2 Tanggal berdiri : .....

3 Alamat/Telpon/email : .....

.....

4 Nama Ketua/No. HP : .....

5 Jumlah Poktan : ..... poktan : ..... orang (Laki-laki: ..... orang; Perempuan: ..... orang)

6 Keragaan Kelas Kemampuan Poktan : Pemula : ..... poktan; Lanjut : ..... poktan; Madya : ..... poktan; Utama : ..... poktan

7 Unit Usaha/jasa Gapoktan (lingkari sesuai dengan kondisi Gapoktan) :

a Unit Usaha Penyedia Saprodi

b Unit Usahatani/Produksi

c Unit Usaha Pengolahan

d Unit Usaha Pemasaran

e Unit Usaha Keuangan Mikro

f Lain-lain (sebutkan)

8 Nama Penyuluh Pertanian Pendamping : .....

No HP : .....

II POTENSI SUMBERDAYA DAN ASET GAPOKTAN

A. Potensi Sumberdaya Poktan

No	Potensi		Luas/Jumlah
1	Luas Lahan Sawah:		
	Jenis Irigasi:		
	a. Teknis	(ha)	
	b. Non Teknis	(ha)	
2	Luas Lahan Kering	(ha)	
3	Luas Pekarangan	(ha)	
4	Luas Kebun:		
	a. Komoditas perkebunan	(ha)	
	b. Buah	(ha)	
	c. Sayuran	(ha)	
	d. Tanaman Hias	(ha)	
	e. Tanaman Obat	(ha)	
5	Ternak:		
	a. Sapi/Kerbau	(ekor)	
	b. Kambing/domba	(ekor)	
	c. Unggas	(ekor)	

B. **Aset Gapoktan**

No	A s e t	Jumlah	Sumber
1	Sekretariat		
2	Perlengkapan sekretariat (meja, kursi, komputer, dll)		
3	Buku-buku administrasi		
4	Alat dan mesin pertanian		
5	Lain-lain		

III SASARAN PRODUKTIVITAS

A Sasaran Produktivitas dan Pola Usaha :

No	Komoditas	Tahun Sebelumnya				Tahun Berjalan			
		Areal/ Jumlah	Produktivitas rata-rata	Teknologi yang akan digunakan	Pola Tanam/ Pola Usaha tani	Areal/ Jumlah	Produktivitas rata-rata	Teknologi yang akan digunakan	Pola Tanam/ Pola Usahatani
		ha/ekor	kw/ha			ha/ekor	kw/ha		
A.	Tanaman Pangan								
B.	Hortikultura								
C.	Perkebunan								

D.	Peternakan								
E.	Lain-lain								

B **Rencana Tanam/Usahatani dan Kebutuhan Sarana Produksi Gapoktan**

No	Sub Sektor/ Komoditas	MT I										
		Luas Tanam (ha)	Kebutuhan Sarana Produksi									Rencana Tanam (bulan)
			Benih (kg)	Urea (kg)	SP36 (kg)	ZA (kg)	NPK (kg)	Organik (kg)	Pestisida (kg atau ltr)	Alsintan (unit)	Sumber Permodalan (Rp)	
1	Tanaman Pangan											
2	Hortikultura											
3	Perkebunan											

No	Sub Sektor/ Komoditas	MT II										
		Luas Tanam (ha)	Kebutuhan Sarana Produksi									Rencana Tanam (bulan)
			Benih (kg)	Urea (kg)	SP36 (kg)	ZA (kg)	NPK (kg)	Organik (kg)	Pestisida (kg atau ltr)	Alsintan (unit)	Sumber Permodalan (Rp)	
1	Tanaman Pangan											
2	Hortikultura											
3	Perkebunan											

No	Sub Sektor/ Komoditas	MT III										
		Luas Tanam (ha)	Kebutuhan Sarana Produksi									Rencana Tanam (bulan)
			Benih (kg)	Urea (kg)	SP36 (kg)	ZA (kg)	NPK (kg)	Organik (kg)	Pestisida (kg atau ltr)	Alsintan (unit)	Sumber Permodalan (Rp)	
1	Tanaman Pangan											
2	Hortikultura											
3	Perkebunan											

No	Sub Sektor/ Komoditas	J u m l a h									
		Luas Tanam (ha)	Kebutuhan Sarana Produksi								Rencana Tanam (bulan)
			Benih (kg)	Urea (kg)	SP36 (kg)	ZA (kg)	NPK (kg)	Organik (kg)	Pestisida (kg atau Ltr)	Alsintan (unit)	Sumber Permodalan (Rp)	
1	Tanaman Pangan											
2	Hortikultura											
3	Perkebunan											

4 Peternakan

No	Jenis Ternak	Jumlah Ternak	Jenis Sarana produksi Yang Dibutuhkan																		Total Biaya
			Bibit		Pakan		Obat/ Vaksin		Kandang		Hijauan Makanan Ternak										
											Urea		SP36		ZA		NPK		Organik		
			ekor	Rp	Kg	Rp	Vol	Rp	Unit	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	

IV KESEPAKATAN POLA TANAM/POLA USAHATANI

No	Komoditas	Areal (ha) / Populasi (ekor)	Sasaran Produktivitas (kw/ ha) / ekor	Pola Tanam/Pola Usahatani/Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Tanaman Pangan														
A	Lahan Sawah														
	- Padi														
	- Palawija (sebutkan)														
B	Lahan Kering														
	- Padi Gogo														
	- Palawija (sebutkan)														
II	Hortikultura														
III	Perkebunan														
IV	Peternakan														

V RENCANA KEGIATAN GAPOKTAN

No	Kegiatan/Gerakan	Bulan												Penanggung Jawab
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Rekapitulasi RDK													
2	Rekapitulasi RDKK													
3	Penyampaian RDKK													
4	Persiapan Usahatani													
	- Pengadaan saprodi													
	- Perbaikan saluran irigasi/drainase													
5	Pembiayaan Usahatani													
	- Pengajuan Kredit													
	- Pemupukan modal anggota													
	- Pengembalian kredit													
	- Fasilitasi pembiayaan lainnya													
6	Kegiatan Produksi													
	- Pengolahan tanah													
	- Pesemaian/Pembibitan													
	- Penanaman													
	- Pemupukan													
	- Pemeliharaan/Pengendalian OPT													
	- Panen													
7	Pasca Panen													
	- Pengolahan hasil													

No	Kegiatan/Gerakan	Bulan												Penanggung Jawab
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	- Pemasaran													
8	Peningkatan Kapasitas Gapoktan													
	- Pertemuan rutin													
	- Kursus tani/Sekolah Lapang													
	- Demfarm													
	- FFD													
	- Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani													
9	Lain-lain													

....., ...

Disetujui:
Penyuluh Pertanian Pendamping

Ketua Gapoktan

(.....)

(.....)

Format 3

RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)

Kelompok Tani : Gapoktan/Kios : Desa/Kelurahan : Kecamatan :

A. Subsektor : Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan

1 Musim tanam : MT I/MT II/MT III *)

2 Komoditas : .....

No	Nama Petani	Luas Tanam	Kebutuhan dan Biaya Sarana Produksi Pertanian (A)																		Biaya lainnya (B)		Jumlah (A + B)	Sumber Pembiayaan	Waktu Penggunaan
			Benih		Urea		SP36		ZA		NPK		Organik		Pestisida		.....**)		.....**)		Garapan/ pemeli-haraan	Alsintan (Panen dan Pasca Panen)			
		Ha	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg/Lt	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Rp	Rp	Rp		
Jumlah																									

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi sesuai kebutuhan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota poktan

B. Subsektor : Peternakan Komoditas : .....

No	Nama Petani	Jumlah Ternak	Kebutuhan dan Biaya Sarana Produksi Pertanian (A)																		Biaya lainnya (B)		Jumlah (A + B)	Sumber Pembiayaan	Waktu Penggunaan
			Bibit		Pakan		Obat/ Vaksin		Kandang		Hijauan Makanan Ternak										Pemeliharaan	Alsintan			
											Urea		SP36		ZA		NPK		Organik						
		Ekor	Ekor	Rp	Kg	Rp	Vol	Rp	Unit	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Rp	Rp	Rp		
Jumlah																									

C. Jenis Usaha : Pengolahan Pangan Komoditas : .....

No	Nama Petani	Volume per Siklus Usaha	Kebutuhan dan Biaya Sarana Produksi Pertanian (A)										Biaya lainnya (B)				Jumlah (A + B)	Sumber Pembiayaan ***)	Waktu Penggunaan
			Bahan Baku		Alat dan Mesin			Pengemasan		Lainnya			Tenaga Kerja		Transportasi				
		Kg	Kg	Rp	Jenis	Unit	Rp	unit	Rp	....	Rp		Org	Rp	Unit	Rp	Rp		
Jumlah																			

***) Sebutkan sumber-sumber pembiayaan

....., ...

Disetujui:

Penyuluh Pertanian Pendamping

Ketua Kelompok Tani

(.....)

(.....)

Format 4a

REKAPITULASI RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)

(Direkapitulasi oleh Pengurus Gapoktan)

Gapoktan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

A. Subsektor : Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan
   1 Musim Tanam : MT I/MT II/MT III
   2 Komoditas :

No	Nama Poktan	Luas Tanam	Kebutuhan dan Biaya Sarana Produksi Pertanian (A)																		Biaya lainnya (B)		Jumlah (A + B)	Sumber Pembiayaan	Waktu Penggunaan
			Benih		Urea		SP36		ZA		NPK		Organik		Pestisida		..... **)		..... **)		Garapan/ pemeliharaan	Alsintan (Panen dan Pasca Panen)			
		Ha	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg/ Ltr	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Rp	Rp	Rp		
Jumlah																									

B. Subsektor : Peternakan

Komoditas :

No	Nama Poktan	Jumlah Ternak	Kebutuhan dan Biaya Sarana Produksi Pertanian (A)																Biaya lainnya (B)		Jumlah (A + B)	Sumber Pembiayaan	Waktu Penggunaan
			Bibit		Pakan		Obat/ Vaksin		Kandang		Hijauan Makanan Ternak								Pemeli-haraan	Alsintan			
											Urea		SP36		ZA		NPK		Organik						
		Ekor	Ekor	Rp	Kg	Rp	Vol	Rp	Unit	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Rp	Rp	Rp		
Jumlah																									

C. Jenis Usaha : Pengolahan Pangan

Komoditas :

No	Nama Poktan	Volume per Siklus Usaha	Kebutuhan dan Biaya Sarana Produksi Pertanian (A)										Biaya lainnya (B)				Jumlah (A + B)	Sumber Pembiayaan ***)	Waktu Penggunaan
			Bahan Baku		Alat dan Mesin			Pengemasan		Lainnya			Tenaga Kerja		Transportasi				
		Kg	Kg	Rp	Jenis	Unit	Rp	unit	Rp	....	Rp		Org	Rp	Unit	Rp	Rp		
Jumlah																			

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi sesuai kebutuhan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota Poktan

***) Sebutkan sumber-sumber pembiayaan

....., ...

Diketahui:
Kepala Desa/Lurah

(.....)

Disetujui:
Penyuluh Pertanian Pendamping

(.....)

Ketua Gapoktan

(.....)

Format 4b

REKAPITULASI RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)
BAGI POKTAN YANG BELUM BERGABUNG DALAM GAPOKTAN
(Direkapitulasi oleh Penyuluh Pertanian Pendamping)

W K P P :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

A. Subsektor : Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan
1 Musim tanam : MT I/MT II/MT III *)
2 Komoditas :

No	Nama Poktan	Luas Tanam	Kebutuhan dan Biaya Sarana Produksi Pertanian (A)																		Biaya lainnya (B)		Jumlah (A + B)	Sumber Pembiayaan	Waktu Penggunaan
			Benih		Urea		SP36		ZA		NPK		Organik		Pestisida		..... **)		..... **)		Garapan/ pemeliharaan	Alsintan (Panen dan Pasca Panen)			
		Ha	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg/Ltr	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Rp	Rp	Rp		
Jumlah																									

B. Subsektor : Peternakan Komoditas :

No	Nama Poktan	Jumlah Ternak	Kebutuhan dan Biaya Sarana Produksi Pertanian (A)																		Biaya lainnya (B)		Jumlah (A + B)	Sumber Pembiayaan	Waktu Penggu-naan
			Bibit		Pakan		Obat/ Vaksin		Kandang		Hijauan Makanan Ternak										Pemeliharaan	Alsintan			
											Urea		SP36		ZA		NPK		Organik						
		ekor	ekor	Rp	Kg	Rp	Vol	Rp	Unit	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Rp	Rp	Rp		
Jumlah																									

C. Jenis Usaha : Pengolahan Pangan Komoditas :

No	Nama Poktan	Volume per Siklus Usaha	Kebutuhan dan Biaya Sarana Produksi Pertanian (A)									Biaya lainnya (B)				Jumlah (A + B)	Sumber Pembiayaan ***)	Waktu Penggunaan
			Bahan Baku		Alat dan Mesin			Pengemasan		Lainnya		Tenaga Kerja		Transportasi				
		Kg	Kg	Rp	Jenis	Unit	Rp	unit	Rp	....	Rp	Org	Rp	Unit	Rp	Rp		
Jumlah																		

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi sesuai kebutuhan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota Poktan

***) Sebutkan sumber-sumber pembiayaan

……, ……

Diketahui:
Kepala Desa/Lurah

(……)

Disetujui:
Penyuluh Pertanian Pendamping

(……)

Format 5

RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK) PUPUK BERSUBSIDI

Kelompok Tani :
Gapoktan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Subsektor : Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan/Peternakan*)
Komoditas :

No	Nama Petani	Luas Tanam	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			Urea				SP36				ZA				NPK				Organik			
		Ha	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

....., ...

Disetujui:
Penyuluh Pertanian Pendamping

(.....)

Ketua Kelompok Tani

(.....)

Format 6a

REKAPITULASI RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)
PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT GAPOKTAN/DESA/KELURAHAN
(Direkapitulasi oleh Pengurus Gapoktan)

Gapoktan : Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Subsektor : Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan/Peternakan *)

No	Nama Poktan	Luas Tanam	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			Urea				SP36				ZA				NPK				Organik			
		Ha	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

……., ……

Diketahui:	Disetujui:	
Kepala Desa/Lurah	Penyuluh Pertanian Pendamping	Ketua Gapoktan
(……)	(……)	(……)

Format 6b

REKAPITULASI RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)
PUPUK BERSUBSIDI BAGI POKTAN YANG BELUM BERGABUNG DALAM GAPOKTAN
(Direkapitulasi oleh Penyuluh Pertanian Pendamping)

W K P P :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Subsektor : Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan/Peternakan *)

No	Nama Poktan	Luas Tanam	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			Urea				SP36				ZA				NPK				Organik			
		Ha	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

....., ...

Diketahui:
Kepala Desa/Lurah

Penyuluh Pertanian Pendamping

(.....)

(.....)

PUPUK BERSUBSIDI KECAMATAN

Kecamatan :

Subsektor : Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan/Peternakan *)

No	Nama Gapoktan	Luas Tanam	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (kg)																			
			Urea				SP36				ZA				NPK				Organik			
		Ha	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

....., ...

Diketahui:
Camat

(.....)

Disetujui:
Kepala satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan

(.....)

Kepala satuan kerja yang melaksanakan tugas prasarana dan sarana pertanian di kecamatan

(.....)

PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota : Provinsi:

Subsektor : Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan/Peternakan*)

No	Nama Kecamatan	Luas Tanam	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			Urea				SP36				ZA				NPK				Organik			
		Ha	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

……., …….

Kepala Dinas Pertanian/Satuan Kerja yang Melaksanakan
Urusan Prasarana dan Sarana Pertanian, Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perkebunan, dan/atau Peternakan
di Kabupaten/Kota

(……..)

PUPUK BERSUBSIDI PROVINSI

Provinsi :

Subsektor : Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan/Peternakan *)

No	Nama Kabupaten/Kota	Luas Tanam	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			Urea				SP36				ZA				NPK				Organik			
		Ha	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah
Total																						

*) Coret yang tidakperlu

....., ...
Kepala Dinas Pertanian/Satuan Kerja yang Melaksanakan
Urusan Prasarana dan Sarana Pertanian, Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perkebunan, dan/atau Peternakan
di Provinsi

Lampiran 2. Form LAKU SUSI

Format 1 Identifikasi Potensi Pengembangan Usahatani dan Manajemen Kelembagaan Petani/KEP

No	Petani/ Poktan/ Gapoktan/ KEP	Potensi yang Dapat Dikembangkan		Materi yang Dibutuhkan		Permasalahan	Pemecahan Masalah/ Tindak Lanjut
		Pengembangan Usahatani	Manajemen Kelembagan Petani/KEP	Pengembangan Usahatani	Manajemen Kelembagan Petani/KEP		

Format 2 Identifikasi Kebutuhan Pelatihan

No	Materi Yang Dibutuhkan	Materi yang Dikuasai Penyuluh	Materi yang Belum Dikuasai Penyuluh	Materi yang Dilatihkan

Format 3. Narasumber dan Rencana Waktu Pelaksanaan Pelatihan

No	Materi yang Dilatihkan	Narasumber	Rencana Waktu Pelaksanaan

Format 4 Data Kelompok Tani (diisi oleh Penyuluh)

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :

No.	Desa/Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota/Provinsi *)	Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok Tani	Alamat Lengkap Sekretariat	Tahun Pembentukan	Nomor Register	Jenis Kelompok Tani								Anggota								Anggota																	Klasifikasi Kelas Kemampuan (pilih salah satu)				Tahun Penetapan Kelas	Keanggotaan dengan Kelembagaan Lainnya			
							Domisili	Perempuan	TP	Hor	Nak	Bun	Olahan	Lainnya	Nama	Jenis Kelamin		Komoditas utama yg diusahakan (pilih salah satu) (dalam					Komoditas utama yg diusahakan (pilih salah satu) (dalam hektar/ekor/unit)																									
																		Tanaman Pangan (ha)					Perkebunan (ha)					Hortikultura (ha)					Peternakan (ekor)					Pengolahan (unit)										
																L	P	Padi	Jagung	Kedele	Aneka Umbi	Aneka Kacang	Kopi	Kakao	Tebu	Karet	Kelapa Sawit	Bawang Merah	Aneka Cabai	Jeruk	Tan. Obat	Tan. Hias	Sapi/ Kerbau	Kambing/ Domba	Babi	Ayam	Itik	Hasil	Limbah	Pemula	Lanjut	Madya	Utama		Gapoktan	KUB	Koperasi	PT/BUMP
1		1													1																																	
															2.																																	
		2													1																																	
															2.																																	
2		1																																														
		2																																														
3		1																																														
		2																																														
4		1																																														
		2																																														
5		1																																														
		2																																														

Keterangan:

*) Pilih yang sesuai

Yang dimaksud dengan jenis kelompok sesuai dengan data SIMLUHTAN:

1 Kelompok berbasis domisili

2 Kelompok berbasis jenis kelamin

3 Kelompok berbasis komoditas (Tanaman Pangan/TP, Hortikultura/Hor, Peternakan/Nak, Perkebunan/Bun, Olahan, Lainnya)

Format 5 Data Gabungan Kelompoktani (diisi oleh Penyuluh)

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :

No.	Desa/Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota/ Provinsi *)	Gapoktan	Nomor Register	Nama Poktan	Alamat Lengkap Sekretariat	Tahun Pembentukan	SK Pengukuhan		Nama Pengurus Gapoktan			Unit Usaha (multiple choice)							Unit Usaha (multiple choice)			Alat dan Mesin Pertanian yang dimiliki							Keanggotaan dengan Kelembagaan Lainnya		
							Ada	Tidak Ada	Ketua	Bendahara	Sekretaris	Sarana dan Prasarana Produksi	Usahatani (single choice)				Pengolahan (single choice)		Pemasaran	Keuangan Mikro/ Simpan Pinjam	Jasa Lainnya	Traktor	Hand Tractor	Pompa Air	Mesin Penggiling Padi	Mesin Pengering	Mesin Pencacah (chopper)	Lainnya (sebutkan)	KUB	Koperasi	PT/BUMP
													TP	Hor	Bun	Nak	Hasil	Limbah												
1.		1		1.																										
				2.																										
				3.																										
		2		1.																										
				2.																										
				3.																										
2.		1		1.																										
				2.																										
		2																												
3		1																												
		2																												

*) Pilih yang sesuai

Format 6 Data Kelembagaan Ekonomi Petani

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :

No.	Desa/Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/Kota/ Provinsi *)	Nama Kelembagaan Ekonomi Petani	Bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani 1 = Koperasi Tani 3 = PT 2 = P T 4 = CV 5 = KUB 6= UKMA	Alamat	No. Telpon	E-mail	Nama Direktur/ Ketua	Tahun Pembentukan	Akta Badan Hukum (Ada/Tidak)	Legalitas 1= Akta Notaris 2= Notaris dan Menkum ham	Modal dasar Kelembagaan (Rp)	Jumlah Pemegang Saham/ Anggota*)	Jumlah anggota	Jumlah Kelembagaan Petani yang menjadi anggota		Total Aset	Tanaman Pangan								Perkebunan							
																	Luas Lahan yang diusahakan (Ha)	Volume Usaha (ton per bulan)					Pemasaran <mulcho>		Luas Lahan yang diusahakan (Ha)	Volume Usaha (ton per bulan)					Pemasaran	
												(org)	(org)	Poktan	Gapoktan	(Rp)		Padi	Jagung	Kedelai	Aneka Umbi	Aneka Kacang	Regional	Ekspor		Kopi	Kakao	Tebu	Karet	Kelapa Sawit	Regional	Ekspor

Hortikultura								Peternakan								Pengolahan					Kemitraan Usaha									Sertifikat Mutu Produk
Luas Lahan yang diusahakan (Ha)	Volume Usaha (ton per bulan)					Pemasaran		Jumlah Ternak yang dimiliki (ekor)	Volume Usaha (ekor per bulan)					Pemasaran		Unit Pengolahan yang dimiliki (unit)	Volume Usaha (ton per bulan)		Pemasaran		Jenis Mitra (multiple choice)					Bentuk Kemitraan <mulcho>			
	Bawang Merah	Aneka Cabai	Jeruk	Tanaman Obat	Tanaman Hias	Regional	Ekspor		Sapi/ Kerbau	Kambing/ Domba	Babi	Ayam	Itik	Regional	Ekspor		Hasil	Limbah	Regional	Ekspor	Perusahaan			Koperasi	Perorangan	Pemasaran	Sarana Produksi	Pendampingan	(ISO, dll)
																					Internasional	Nasional	Lokal						

Format 7

Form 7a : Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditas (Padi/Jagung/Kedelai*)

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

No.	Uraian	Rata-Rata 5 Tahun Terakhir	20....[1)]				20....[2)]			
			Target	Realisasi			Target	Realisasi		
				Okt-Mar	Apr-Sep	Jumlah		Okt-Mar	Apr-Sep	Jumlah
1	Luas Tanam (ha)									
2	Luas Panen (ha)									
3	Produksi (ton)									
4	Produktivitas (ton/ha)									
5	Standing crop									

*) Pilih salah satu
1) Tahun berjalan
2) Tahun sebelumnya

Form 7b Data Produksi Daging, Susu, Telur dan Komoditas Utama Peternakan 5 tahun terakhir (20..... s.d.

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

No	Uraian	Produksi (ton)					Rata-rata (ton)
		Thn…..	Thn…..	Thn…..	Thn…..	Thn…..	
1	Sapi						
2	Kerbau						
3	dst						

Form 7c Data Populasi Ternak 5 tahun terakhir (20..... s.d. 20.....)

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

No	Uraian	Populasi (ekor)					Rata-rata (ekor)
		Thn…..	Thn…..	Thn…..	Thn…..	Thn…..	
1	Sapi						
2	Kerbau						
3	dst						

Format 8 Hasil Kunjungan Penyuluh Pertanian ke Poktan/Gapoktan/KEP*)

Hari/Tanggal	
Waktu Kunjungan	
Nama Poktan/Gapoktan/KEP *) dan Alamat	
Jumlah anggota yang hadir	.....orang laki-laki dan ..... orang perempuan
	..... poktan
Kegiatan yang dilakukan dan materi yang dibahas	
Masalah yang dihadapi	
Pemecahan masalah	
Masalah yang belum dapat dipecahkan dan perlu tidak lanjut	
Keterangan	

Ketua Poktan/Gapoktan/KEP*) yang dikunjungi,

(.....)

Diperiksa Pimpinan Satuan Kerja yang Melaksanakan Tugas Penyuluhan di Kecamatan

(.....) NIP.

*) pilih salah satu

Format 9

Format 9a Hasil Pelatihan Penyuluh Pertanian di Satker yg melaksanakan tugas penyuluhan di kec

Satker yg melaksanakan tugas penyuluhan di kec :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Hari, Tanggal
- Pelatihan I :
- Pelatihan II :

No.	Nama Penyuluh Pertanian Yang Dilatih	WKPP	Materi Pelatihan	Narasumber	Permasalahan	Pemecahan Masalah/ Tindak Lanjut	Keterangan

……., ……..20….
Pimpinan Satuan Kerja yang Melaksanakan Tugas Penyuluhan di Kecamatan

(……)
NIP.

Format 9b Hasil Kunjungan Penyuluh Pertanian di Wilayah Kerja Satker yg melaksanakan tugas penyuluhan di kec

Satker yg melaksanakan tugas penyuluhan di kec :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	WKPP	Hari, Tanggal	Nama Penyuluh Pertanian	Nama Poktan	Nama Gapoktan	Nama KEP	Materi Kunjungan	Metode Penyampaian Materi	Permasalahan	Pemecahan Masalah/ Tindak Lanjut	Keterangan

……., ……..20….
Pimpinan Satuan Kerja yang Melaksanakan Tugas Penyuluhan di Kecamatan

(…….)
NIP.

Format 9c Hasil Supervisi di Wilayah Kerja Satker yg melaksanakan tugas penyuluhan di kec

Satker yg melaksanakan tugas penyuluhan di kec :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Penyuluh Pertanian Supervisor :

No	Hari/ Tanggal Supervisi	Nama Penyuluh Pertanian Supervisor/ Pimpinan Satuan Kerja yang Melaksanakan Tugas Penyuluhan di Kecamatan/ Penyuluh Pertanian Senior*)	WKPP	Materi Supervisi	Permasalahan	Pemecahan Masalah/ Tindak Lanjut	Keterangan

……., ……..20….
Pimpinan Satuan Kerja yang Melaksanakan Tugas Penyuluhan di Kecamatan

(……..)
NIP.

Format 10

Kabupaten/Kota*) :
Provinsi :

A LATIHAN

No.	Kecamatan/ Kabupaten/ Kota/ Provinsi*)	Jumlah Penyuluh Pertanian Yang Dilatih (orang)	Materi Pelatihan	Narasumber	Permasalahan	Pemecahan Masalah/ Tindak Lanjut	Keterangan

B KUNJUNGAN

No	Kecamatan/ Kabupaten/ Kota/ Provinsi*)	Jumlah Penyuluh Pertanian Yang Melakukan Kunjungan (orang)	Jumlah Kelembagaan Petani dan KEP yang dikunjungi (unit)			Materi Kunjungan	Metode Penyampaian Materi	Permasalahan	Pemecahan Masalah/ Tindak Lanjut	Keterangan
			Poktan	Gapoktan	K E P					

C SUPERVISI

No	Kecamatan/ Kabupaten/ Kota/ Provinsi*)	Jumlah Penyuluh Pertanian Supervisor/ Pimpinan Satker yg melaksanakan tugas penyuluhan di kec/ Penyuluh Pertanian Senior*) (orang)	Materi Supervisi	Permasalahan	Pemecahan Masalah/ Tindak Lanjut	Keterangan

*) Pilih salah satu

……..., ……..20….
Kepala satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan pertanian di kabupaten/ kota/provinsi

(……..……..)
NIP.